



**LAPORAN HASIL PENELITIAN**  
**KAJIAN POLITIS INTEGRASI PAPUA KE INDONESIA**  
**MELALUI PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT**  
**(PEPERA) DI TAHUN 1969**

**Disusun oleh :**  
**Indah Novitasari, M.Si (Han)**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITK**  
**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**  
**JAKARTA**  
**2020**

## Abstrak

Penelitian ini menguraikan tentang kajian politik proses integrasi Papua ke Indonesia yang berujung pada PEPERA 1969. Oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan situasi sosial politik di Papua pada masa sebelum masa kolonial, masa kolonial, masa peralihan dari Belanda ke Papua, hingga masuknya UNTEA, dan Indonesia pada tahun 1963. Penelitian ini tidak akan menjelaskan kebenaran sejarah namun akan menjelaskan mengenai hak politik, nasionalisme, dan integrasi, untuk menjawab kenyataan di Papua saat ini yang penuh dengan praktek separatisme, kekerasan, termarjinalkan dan terisolasi.

Adapun pokok permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana situasi sosial dan politik masyarakat Papua sebelum integrasi hingga PEPERA pada tahun 1969?, Bagaimana proses integrasi hingga PEPERA pada tahun 1969?, Kritik politik seperti apakah yang dapat diajukan dalam membahas integrasi Papua hingga PEPERA tahun 1969?. Konsep yang digunakan dalam membahas permasalahan ini adalah konsep Integrasi, nasionalisme. dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian *historical research* dan jenis penelitian kajian pustaka.

Akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa proses integrasi Papua ke Indonesia seolah merupakan misi mulia oleh Indonesia dan PBB, namun di saat yang sama mereka tidak memperdulikan akan hak politik masyarakat Papua. Hak politik yang telah hidup lama di antara masyarakat Papua yang kemudian memunculkan nasionalisme Papua, sehingga sangat tidak dibutuhkan adanya integrasi dengan Indonesia. Namun dalam usaha penentuan nasib Papua tersebut tidak ada satupun orang Papua yang diikutsertakan. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya integrasi telah melanggar hak politik bangsa Papua, pelanggaran HAM, dan pengkhianatan terhadap konstitusi Indonesia juga demokrasi.

*Kata Kunci: Kajian Politis, Integrasi Papua, Pepera 1969.*

## Daftar Isi

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Abstraksi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rasional .....	7
C. Identifikasi Masalah .....	8
D. Pertanyaan Penelitian .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Metodologi Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>Bab II Kajian Pustaka.....</b>	<b>18</b>
A. Integrasi Politik.....	18
B. Nasionalisme.....	21
C. Sejarah Papua.....	25
<b>Bab III Gambaran Peristiwa Politik Di Papua Sebelum Pepera 1969.....</b>	<b>33</b>
A. Munculnya Partai Politik Di Papua Pra Pepera 1969.....	33
B. Pembentukan Dewan Perwakilan Masyarakat Papua (Dewan Nieuw Guinea).....	45
C. Perdebatan Tentang Kemerdekaan Dan Nasionalisme Papua .....	53
<b>Bab IV Analisis Proses Integrasi Hingga Pepera 1969.....</b>	<b>59</b>
A. Perundingan Dan Konferensi Mengenai Papua .....	59
B. Proses Integrasi .....	65
C. Pembahasan .....	72
<b>Bab V Penutup.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
<b>Daftar Pustaka</b>	
<b>Lampiran</b>	

## **Daftar Tabel**

Tabel 1 Narasumber Dalam Pengumpulan Data.....	13
Tabel 2. Surat Kabar dan Majalah di Papua pada 1966.....	46
Tabel 3. Berikut Daftar Dewan Musyawarah PEPERA tahun 1969 .....	70

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Globalisasi yang telah menjalar dalam sendi kehidupan setiap bangsa di dunia tidak memandang ras dan wilayah, arus informasi yang membawanya menjadikan setiap bangsa berada dalam suatu situasi yang menyatukan dunia dalam satu kesatuan nilai dan pemahaman. Globalisasi dengan segala kebaikan dan keburukannya berjalan beriringan dengan kapitalis, Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor utama bagi kedua hal ini untuk mendapatkan keuntungan serta menjadi objek dari kedua ideologi tersebut. Bagai dua sisi mata uang keduanya tidak dapat dipisahkan, ekonomi menjadi faktor perekat dari kedua paham tersebut. Persoalan mengenai HAM dapat diputarbalikkan demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi, hal ini kemudian menjadi pembius utama seperti candu bagi masyarakat dunia untuk bergelut mendapatkan keuntungan dengan mengesampingkan aspek humanitas serta hak-hak kepemilikan. Dalam persaingan global yang terbenam dalam sistem kapitalis akan menempatkan pihak yang kalah dalam posisi sebagai “korban penghisapan” SDA dan SDM miliknya oleh pihak yang menang.

Papua hari ini sebagai pulau terbesar di Indonesia menyimpan SDA yang menggiurkan yang mampu membuat jutaan bangsa menjadi rakus untuk memiliki Papua. Kandungan perut bumi yang kaya akan batuan mulia dan migas dalam skala besar menjadikan banyak bangsa berlomba untuk “merayunya” agar terbuai dengan nyanyian kapitalis. Isi perut bumi yang berlimpah yang tak mungkin habis jika masyarakat Papua sendiri yang hanya berjumlah kurang lebih 2 juta jiwa memanfaatkan untuk kesejahteraan mereka sendiri. Namun kenyataan saat ini, segala kekayaan alam Papua menjadi pembicaraan hangat di dunia, karena kekayaan yang begitu berlimpah tersebut menjadi rebutan berbagai bangsa, hingga masyarakat Papua harus hidup dalam keterasingan, terisolasi, cap primitif dan bodoh yang dilekatkan kepada masyarakat Papua menjadi ironi dengan segala kekayaan yang dimiliki alamnya. Awal pemicu permasalahan berkepanjangan di Papua adalah pada peristiwa di Port Numbay pada tanggal 1 juli 1961

dimana kesadaran politik masyarakat Papua telah terjadilah sebuah deklarasi kemerdekaan Papua Barat (Ideologi) dengan semboyan dan kerangka Negara lengkap dengan atribut bendera, lambang Negara dan lagu kebangsaan dari situlah kesadaran politik masyarakat Papua telah terjadi pada tahun 1961 itu maka, masyarakat Papua sudah menanam ideologi mereka dalam benak hati dan benar-benar tanam sampai akar rumput sampai saat ini. Hal ini kemudian menjadi pemicu awal Indonesia mengklaim Papua Barat sebagai bagian dari Negara Indonesia.

Mengenal masalah Papua akan memperkenalkan kita pada Indonesia yang sebenarnya: suatu negeri yang proses negosiasi kebangsaannya belum selesai, apalagi harga mati. Membicarakan Papua berarti memikirkan apa yang harus diubah oleh Indonesia terhadap Papua, dan bukan sebaliknya. Karena masalah sekaligus solusi bagi persoalan Papua terletak di Jakarta. Banyak sekali tawaran cara menilai masalah Papua dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi orang Papua maupun orang Indonesia. Di tahun 1996, dalam manifestonya, Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah yang pertama mengakui adanya persoalan kebangsaan di Maubere (Timor Leste), Aceh dan Papua sekaligus memberi keberpihakan pada upaya-upaya penentuan nasib sendiri rakyat Papua. Demikian halnya dengan Gus Dur yang tidak ragu mengembalikan nama Papua pada 1 Januari tahun 2000, dan penggunaan simbol bintang kejora sebagai identitas orang Papua. Oleh karena itu, sepertinya, Gus Dur lah satu-satunya elit Indonesia yang mendapat penghargaan dari orang Papua atas keberpihakan demokrasi untuk Papua.

Namun setelah era Gus Dur, khususnya akibat implementasi Otsus (UU No. 21/2001) dan pemekaran Provinsi Papua (Inpres No. 1 tahun 2003), hubungan Papua-Jakarta semakin memburuk. Frans Maniagasi, dari Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua (Pokja Papua), di tahun 2004, memandang persoalan Papua berakar pada ketiadaan kepercayaan antara Indonesia terhadap Papua, dan sebaliknya (The Jakarta post, 30 november 2004). Ketidakpercayaan itu timbul oleh karena inkonsistensi kebijakan pemerintah Jakarta terhadap Papua. Amiruddin al Rahab, dalam bukunya *Heboh Papua* menyebutkan tak ada yang baru dalam *landscape* HAM dan sosial politik di Papua (Amiruddin Al Rahab 2000), Sejak 40 tahun yang lalu masalah dasar di Papua sama, yaitu “seputar kemiskinan, ketidakadilan dan trauma akibat tindakan kekerasan, yang terjadi

karena pemerintah dan tokoh-tokoh Papua disandera oleh sengketa – yang dalam literatur politik disebut gerakan separatisme”.

Sebelumnya, di dalam Papua Road Map yang diterbitkan oleh LIPI (2009), satu pengakuan sekaligus harapan terobosan jalan keluar terhadap persoalan Papua tersaji. Terdapat empat kategori persoalan: *Sejarah Integrasi, Status Politik, Dan Identitas Politik; Kekerasan Politik Dan Pelanggaran HAM; Kegagalan Pembangunan; Inkonsistensi Kebijakan Otsus Dan Marjinalisasi Orang Papua*. Secara historis, penafsiran terhadap sejarah integrasi, status politik, dan identitas politik Papua muncul sebagai hasil pertarungan politik kekuasaan pada masa dekolonisasi Papua. Sedangkan kekerasan politik dan kegagalan pembangunan merupakan implikasi dari rezim otoritarianisme Orde Baru. Sementara itu, inkonsistensi pemerintah dalam implementasi Otonomi Khusus lebih merupakan persoalan yang muncul pada masa pasca-Orde Baru (Muridan, 2009). Moderasi, negosiasi, dan kompromi antara nasionalis Indonesia dengan nasionalis Papua merupakan salah satu kunci penyelesaian konflik Papua menurut tim LIPI. Berdasarkan analisis konflik tersebut Jaringan Damai Papua (JDP) hadir mengusung agenda dialog.

Pada tanggal 5-7 Juli 2011 di Jayapura Papua diselenggarakan Konferensi Damai Papua yang dihadiri oleh 500 perwakilan rakyat Papua dan 300 orang peninjau. Namun hasil rekomendasi dialog damai tidak disikapi dengan positif oleh pemerintah. Bahkan berbagai kekerasan masih terus berlangsung ketika masyarakat Papua mengajak berdialog dengan Jakarta. Komunikasi konstruktif tidak pernah terjadi. Dengan demikian, solusi yang paling *visible* ini pun semakin hari semakin suram karena tidak ada keberpihakan dan perubahan pendekatan dari Jakarta. Di tengah sulitnya meyakinkan Jakarta akan kepentingan terhadap dialog dengan Papua, Socratez Sofyan Yoman, menambahkan bahwa dialog damai yang harus dilakukan antara pemerintah Papua dan rakyat Papua Barat haruslah tanpa syarat, dan dimediasi oleh pihak ketiga (internasional). Hal ini dilandasi oleh sejarah politik integrasi Papua ke Indonesia yang cacat partisipasi demokratis serta pelanggaran pemerintahan Orde Baru terhadap perjanjian New York, 15

Agustus 1962 (Yoman, 2011).<sup>1</sup> Artinya, ditengah syarat dan tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat Papua terhadap dialog yang dimaksud, pemerintahan di Jakarta bahkan telah lebih dulu mundur teratur dan tak menunjukkan sikap-sikap kompromi dalam bentuk apapun. Peningkatan kekerasan di Papua oleh militer Indonesia justru menjadi jawaban pemerintah atas tuntutan rakyat Papua, yang sebetulnya tidak berhasil “diintegrasikan” selama kekuasaan Orde Baru.

Menurut Herman Katmo, dari organisasi *National Papua Solidarity* (NAPAS) mengatakan bahwa “untuk memperoleh konsensus politik terkait format dialog di antara orang Papua, ruang demokrasi harus dibuka seluasnya agar ada kesempatan bagi seluruh masyarakat Papua mengkonsolidasikan diri. Intimidasi, ancaman, campur tangan, dan bentuk-bentuk kamufase politik yang sengaja diadakan untuk menghambat proses ini harus ditiadakan. Protes damai orang Papua jangan disikapi dengan kekerasan. Para tahanan politik Papua harus dibebaskan tanpa syarat agar mengikuti proses ini. Tidak perlu menyangkal atau menutupi keberadaan para tahanan politik Papua ke publik internasional. Seluruh pasukan non-organik harus ditarik dari tanah Papua, kiat pembangunan milisi harus dihentikan, dan pendekatan militeristik harus diganti. Tanpa semua itu, sulit membayangkan adanya kata sepakat untuk penyelesaian Papua secara damai. Jakarta akan jalan sesuai maunya, demikian juga rakyat Papua akan jalan dengan kebenarannya sendiri, ibarat kata pepatah ‘anjing menggonggong kafilah tetap berlalu.

---

<sup>1</sup> Sesuai dengan perjanjian New York (New York Agreement), Belanda menyerahkan administrasi wilayah New Guinea Barat ke suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bernama: United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang kemudian diserahkan ke Indonesia pada 1 Mei 1963. Empat poin Perjanjian New York (New York Agreement) tersebut antara lain: Penyerahan tersebut terbatas pada “tanggung jawab administrasi seluruhnya,” bukan penyerahan kedaulatan (Pasal XIV); selama periode transisi, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan “intensifikasi terhadap pendidikan rakyat, memberantas buta huruf, dan pemajuan pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan” (Pasal XV); di akhir tahun 1969, di bawah pengawasan Sekretaris Jenderal PBB, diselenggarakan the act of free choice bagi rakyat Papua untuk menentukan status politiknya “apakah mereka hendak tetap bersama Indonesia atau mereka memutuskan ikatan mereka dengan Indonesia (Pasal XVIII); Indonesia “akan menghormati komitmen tersebut” (Pasal XXII paragraf 3) untuk menjamin sepenuhnya hak rakyat Papua, termasuk hak-hak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul dan melakukan pergerakan (Artikel XII paragraf 1).

Oleh sebab itulah, pada kenyataannya, suka tidak suka, persoalan Papua menurut kacamata sebagian besar orang Papua, dan orang Indonesia, tidaklah sama. Norman Vob, koordinator *West Papua Network*, sebuah perkumpulan solidaritas Papua berbasis di Jerman, dalam satu kunjungannya ke sekretariat NAPAS, mencontohkan betapa sulitnya meyakinkan orang Papua terhadap kemungkinan peluang reformasi kebijakan dan pemerintahan di Jakarta dan di Papua dalam mengatasi, sekalipun parsial, persoalan-persoalan rakyat Papua. Sementara bagi para pekerja HAM dan gerakan sosial Indonesia perubahan pendekatan Jakarta dalam menangani Papua, sekecil apapun, adalah target advokasi politik yang sangat penting, tidak saja bagi Papua namun bagi iklim demokrasi seluruh rakyat Indonesia. Di sinilah tepatnya dimensi dialektis dalam peta masalah Papua kita letakkan: dialektika antara kehendak orang Papua dengan pembukaan ruang politik di Indonesia.

Kini, setelah 50 tahun penyerahan administrasi Papua ke Indonesia sejak 1 Mei 1963, hampir seluruh spektrum politik di Papua bersepakat bahwa situasi Papua semakin memburuk. Mereka bersepakat bahwa persoalan Papua begitu kompleks meliputi sejarah dan status politik, diskriminasi dan marjinalisasi masyarakat asli, konflik agraria dan lingkungan, serta pelanggaran hak-hak sipil-politik dan ekonomi, sosial, budaya. Memposisikan satu masalah lebih utama dari yang lain adalah tindakan yang merugikan, khususnya di tengah situasi kemanusiaan yang semakin memburuk bagi rakyat Papua di berbagai sisi saat ini. Demikian pula kerugian ketika memisahkan dan mengisolasi satu masalah dari masalah lainnya, karena justru solusi yang dikehendaki mayoritas rakyat tidak akan ditemukan.

Kekhawatiran sebenarnya menjadi sangat relevan dengan hadirnya PT Freeport Indonesia (PTFI). Ada adagium dalam percaturan politik dunia, di mana ada kepentingan ekonomi, maka di sana akan ada kehadiran militer. Papua yang selalu menjadi perhatian khusus dari dunia internasional, bisa menjadi titik pangkal bagi kepentingan di kawasan untuk melakukan intervensi atas nama kemanusiaan. Entah momentum apa yang akan menjadi pemicunya. Paling tidak ada dua momen yang bisa menjadi tolak ukur stabilitas di Papua. *Pertama*, pergerakan organisasi sparatisme yang menginginkan Papua merdeka. *Kedua* adalah kepentingan ekonomi akan SDA Papua. Semua hal ini mudah sekali dipicu,

apalagi kontrol atas stabilitas keamanan di Papua harus juga memenuhi prosedural politik di parlemen, sebagai wujud Indonesia sebagai negara demokrasi.

Rakyat Indonesia tentu memahami bagaimana selama puluhan tahun terakhir ini, AS melalui beberapa korporat multinasionalnya telah terlalu dalam ‘merampok’ kekayaan bangsa ini. Karena Papua merupakan salah satu pemasok sumber daya alam bagi pengembangan industri Amerika Serikat. Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) dalam artikelnya yang dimuat oleh situs *the global-review.com* menyebutkan sejak 2001 Amerika terlibat dalam pengelolaan LNG Tangguh. Berdasarkan perkiraan, cadangan LNG di kawasan tersebut adalah 23, 7 triliun kaki kubik dan di antaranya sebesar 14, 4 triliun kaki kubik telah disertifikasi (Arrahmah, 2011).

Sejak 2008 lalu, Indonesia telah menjadi pemasok langsung energi bagi kawasan pantai barat Amerika yang diambil dari Tangguh di Papua. Perusahaan Connoco Phillips yang merupakan gabungan dari Conoco dan Phillips Petroleum Company, telah beroperasi di Indonesia selama 36 tahun. Pada 1998, perusahaan pembangunan serta konstruksi milik Pertamina dan Sembawang telah mencapai kesepakatan dengan Conoco untuk menjual 325 juta kubik gas alam per hari melalui pipa ke Singapura. Melalui kerjasama dengan BP MIGAS, Conoco juga membangun pertambangan minyak di pinggir pantai Balida dan pertambangan gas alam Blok B di wilayah pedalaman Papua. Sementara perusahaan Global Santa Fe yang juga milik Amerika, mengoperasikan tambang minyak di daerah Klamono di Papua.

BP yang bekerjasama dengan BP MIGAS melakukan pengeboran gas alam cair di kawasan lepas pantai (*offshore*) dan daratan (*onshore*) di sekitar kawasan Teluk Bintuni. BP merupakan perusahaan minyak milik Inggris yang bergabung dengan perusahaan-perusahaan minyak milik Amerika seperti Standard Oil of Indiana, Standard Oil of Ohio, Atlantic Richfield Company (Arco) dan Amoco, yang beroperasi di bawah bendera British Petroleum. Inilah nilai strategis Papua sebagai salah satu sumber pemasok tambang bagi Amerika. Setidaknya tercatat tiga perusahaan energi Amerika yang beroperasi di Papua yaitu: PT-Freeport McMoran, Conoco Phillips, dan British Petroleum (BP). Dengan total investasi keseluruhan mencapai US\$ 10. 000 miliar di Provinsi Papua.

Hubungan saling mencurigai antara Papua-Jakarta diselubungi sikap saling mencurigai dan ketidakpercayaan, Jakarta mencurigai setiap gejolak di Papua mengarah kepada separatisme, sedangkan Papua melihat Jakarta penuh dengan kebohongan. Berbagai upaya dialog yang didorong untuk menyelesaikan problem sosial di Papua menjadi susah dilaksanakan karena sikap saling tidak percaya tersebut. Namun pemerintah pusat di Jakarta seolah meringkas segala persoalan tersebut dengan memberikan solusi yang cenderung sekuritisasi, atau lebih memihak kepada solusi keamanan yang tentunya bersifat kekerasan. Ditambah problem eksploitasi SDA serta pembangunan infrastruktur di Papua yang tidak pernah diperhatikan secara serius oleh pemerintah pusat, aspek pendidikan, kesehatan, serta sosial yang masih terbelakang dibandingkan daerah lainnya di Indonesia maka ide serta pemikiran yang telah bertransformasi menjadi aksi-aksi anti-Indonesia semakin menguat di kalangan masyarakat Papua.

Berbagai persoalan di Papua tersebut berawal dari Pepera 1969 yang merupakan langkah pertama Papua masuk menjadi bagian dari propinsi Indonesia. Seperti diketahui bahwa sebelum Pepera 1969 Papua telah menjadi wilayah dengan otonomi sendiri, namun karena pergolakan politik antara Belanda dan Indonesia yang dimulai dengan Perjanjian New York 1962, hingga Pepera tahun 1969. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara politis proses Integrasi Papua ke Indonesia, serta mengkaji hasil integrasi politik tersebut setelah 46 tahun, penelitian ini bersifat kajian pustaka dengan telaah sejarah integrasi, dan didukung dengan kajian lapangan berupa pengumpulan data wawancara mengenai situasi politik dan sosial Papua saat ini. Oleh karena itu penulis beri judul Kajian Politis Integrasi Papua Ke Indonesia Melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Di Tahun 1969.

## **B. RASIONAL**

Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak politik sebuah bangsa atau sekelompok manusia. Dimana dalam penjelasan tentang hak politik didasarkan pada asas kebebasan, kesetaraan, dan hak sosial budaya. Pemenuhan hak politik merupakan kewajiban bagi semua bangsa. Indonesia menuliskannya sebagai salah satu kewajiban untuk mengakui

hak kemanusiaan ini dalam pembukaan UUD NKRI 1945. Sehingga penjelasan ini akan mengkaji faktor sejarah, perkembangan gerakan politik, dan kehendak politik masyarakat Papua sebagai bagian dari tuntutan mereka untuk terpenuhinya hak politik.

### C. IDENTIFIKASI MASALAH

Wilayah Indonesia sejak awal kemerdekaan adalah mencakup semua wilayah Hindia Belanda, atau yang dijajah oleh Belanda. Hal ini kemudian dengan dikeluarkannya keputusan PBB tentang wilayah Indonesia, dan dipertegas lagi oleh pidato Bung Karno dan keinginan BPUPKI pada 12 Mei 1945 yang membahasnya dalam keputusan mengenai Penentuan Batas Wilayah yang mencakup dari Sabang hingga Merauke (ujung timur Papua). Sehingga secara *de facto* dan *de jure* wilayah Papua yang dahulu akrab disebut Irian Barat masuk menjadi wilayah Indonesia. Sehingga berdasarkan pada hal tersebut maka kita setuju bahwa Papua adalah wilayah Indonesia sejak 1945, bukan setelah 1969. Penyebab terjadinya PEPERA yang ditandai dengan Integrasi Politik tersebut adalah karena Belanda masih menduduki wilayah Papua meski setelah Indonesia Merdeka. Sampai pada fakta sejarah tersebut kita harus menyetujuinya.

PEPERA 1969 ditandai sebagai kembalinya Papua ke pangkuan Indonesia. Visi jelas sebuah Negara adalah bersama menuju kemakmuran dan kesejahteraan warga Negara secara keseluruhan. Ini visi besar yang harus dicapai oleh suatu Negara, tentu diharuskan adanya keadilan dalam segala hal selama proses menuju visi besar tersebut. Namun fakta sejarah dan situasi kekinian di Papua pasca PEPERA 1969 seolah bertolak belakang dengan pemahaman tersebut. Persoalan HAM, HIV/AIDS, kemiskinan, terisolasi, eksploitasi SDA, kebodohan, ketiadaan infrastruktur, birokrat korup, dan masih banyak lagi persoalan lainnya seolah menjadi ciri khas dan stigma tentang Papua. PEPERA 1969 adalah titik awal dimulai semua ini, oleh karena itu patut dipertanyakan tentang proses integrasi politik melalui PEPERA 1969, yaitu keadaan masyarakat Papua dari sisi sosial politik sebelum proses integrasi yang dimulai pada tahun 1962-1969, kelembagaan politik apa saja yang muncul di Papua, reaksi dan gejala sosial yang muncul pasca keputusan dimulai integrasi hingga proses PEPERA dan pasca pengumuman hasil PEPERA 1969. Karena penelitian ini merupakan penelitian di bidang ilmu politik maka

pembahasan dan kajian sejarah hanya dikonsentrasikan pada aspek politik bukan menjelaskan kebenaran sejarah maupun aspek lainnya.

Berbicara mengenai kata sifat secara politis maka tidak terlepas dari pergolakan politik itu sendiri seperti kepentingan politik berbagai pihak, pressure grup, budaya politik, partisipasi politik, dan proses berjalannya system politik. Namun juga tentang aspek lainnya yang memiliki hubungan kausal dengan politik, seperti kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya.

#### **D. PERTANYAAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka saya dapat mengemukakan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan judul antara lain :

1. Bagaimana situasi sosial dan politik masyarakat Papua sebelum integrasi hingga PEPERA pada tahun 1969?
2. Bagaimana proses integrasi hingga PEPERA pada tahun 1969?
3. Kritik politik seperti apakah yang dapat diajukan dalam membahas integrasi Papua hingga PEPERA tahun 1969?

#### **E. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Integrasi Papua Ke Indonesia Melalui PEPERA Di Tahun 1969 dan khususnya untuk :

1. Mengetahui dan menjelaskan Integrasi Papua Ke Indonesia Melalui PEPERA Di Tahun 1969.
2. Menjelaskan faktor-faktor sosial politik yang mewarnai dinamika sosial di Papua sebelum dan sesudah integrasi.
3. Menjelaskan kekurangan dan legitimasi PEPERA 1969 bagi masyarakat Papua maupun dalam kaitannya dengan konsep nasionalisme, integrasi, maupun konsep kemanusiaan.

## F. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis:
  - a. Sebagai bahan masukan terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya dalam bidang Politik.
  - b. Sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti dan pembaca tentang Integrasi Papua Ke Indonesia.
2. Kegunaan Praktis:
  - a. Sebagai tambahan bacaan bagi mahasiswa jurusan Ilmu Politik.

## G. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Secara harafiah, sesuai dengan namanya, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata. Oleh karena itu, bentuk data yang digunakan bukan berbentuk bilangan, angka, skor atau nilai, peringkat atau frekuensi, yang biasanya dianalisis dengan menggunakan perhitungan matematik atau statistik (Creswell, 2002).

Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode Historical Research dengan pendekatan kajian pustaka. Penelitian Sejarah (*Historical Research*): adalah penelitian yang berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. *Historical research* adalah penelitian yang dimaksudkan untuk merekonstruksi kondisi masa lampau secara objektif, sistematis, dan akurat. Melalui penelitian ini, bukti-bukti dikumpulkan, dievaluasi, dianalisis, dan disintesis. Selanjutnya, dirumuskan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti itu. Adakalanya penelitian historis digunakan untuk menguji hipotesis tertentu. Peneliti historis biasanya memperoleh data melalui catatan-catatan, artifak-artifak, atau laporan-laporan verbal. Hasil penelitian biasanya berupa narasi deskriptif (*narrative*

*description*) atau analisis terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul pada rentang waktu lama atau cukup lama di masa lampau.

Langkah-langkah umum penelitian historis adalah (Suryabrata, 2008):

1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah.
2. Mendefinisikan masalah dengan mengajukan pertanyaan: (1) apakah pendekatan ini paling cocok untuk masalah yang menjadi fokus? (2) apakah peneliti akan dapat menemukan data yang diperlukan di dalam penelitian? (3) apakah penelitian itu nantinya akan melahirkan kesimpulan yang berguna?
3. Merumuskan tujuan penelitian dan jika mungkin menyusun hipotesis yang akan menjadi arah fokus penelitian.
4. Mengumpulkan data, dengan membedakan data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data ini, biasanya diperlukan kartu atau lembaran catatan.
5. Evaluasi atas data yang diperoleh dengan mengajukan kritik internal dan kritik eksternal.
6. Menuangkan hasil penelitian ke dalam bentuk laporan.

Berikut ini adalah ciri-ciri *Historical Research* yang diuraikan oleh Suryabrata (Suryabrata, 2008):

1. Penelitian historis lebih tergantung kepada data yang diobservasi orang lain daripada yang diobservasi oleh sang peneliti sendiri.
2. *Historical Research* haruslah tertib-ketat, sistematis dan tuntas, bukan sebuah koleksi informasi-informasi yang tak layak, tak reliabel dan berat sebelah.
3. *Historical Research* tergantung pada dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber primer, yaitu si peneliti secara langsung melakukan observasi atau penyaksian kejadian-kejadian yang dituliskan. Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu peneliti melaporkan hasil observasi orang lain yang satu kali atau lebih lepas dari kejadian aslinya. Dari kedua data tersebut, data primerlah yang dipandang memiliki otoritas sebagai bukti tangan pertama dan diberikan prioritas dalam pengumpulan datanya.
4. Dalam menentukan bobot data biasa dilakukan dua macam kritik, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal menanyakan "Apakah dokumen relik atau otentik" sedangkan kritik internal menanyakan "apabila data itu otentik, apakah data tersebut akurat dan relevan?".
5. Cara pendekatan *Historical Research* adalah lebih tuntas, mencari sumber informasi dari sumber yang lebih luas.

## **1. Subjek Penelitian**

Menurut Suharsimi Arikunto subjek penelitian adalah benda, hal atau organisasi tempat data atau variabel penelitian yang dipermasalahkan melekat (Suharsimi, 1998). Tidak ada satu pun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya subjek penelitian,

karena seperti yang telah diketahui bahwa dilaksanakannya penelitian karena adanya masalah yang harus dipecahkan, maksud dan tujuan penelitian adalah untuk memecahkan persoalan yang timbul tersebut. Hal ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari informan.

Dalam penelitian ini, pengambilan sumber data penelitian menggunakan teknik “*purpose sampling*”. Nana Syaodih Sukmadinata menyatakan, *sampel purposive* adalah sampel yang dipilih karena memang menjadi sumber dan kaya dengan informasi tentang fenomena yang ingin diteliti (Sukmadinata, 2005). Pengambilan sampel ini didasarkan pada pilihan peneliti tentang aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu dan saat initerus-menerus sepanjang penelitian, *sampling* bersifat *purposive* yaitu tergantung pada tujuan fokus suatu saat. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek adalah pihak-pihak yang terlibat sebagai pengamat politik Papua, penulis buku, peneliti integrasi politik Papua dan Pelaku PEPERA 1969 yang masih hidup.

Melihat keterbatasan peneliti dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka subyek penelitian ditentukan berdasarkan ciri dan karakteristik tertentu. Adapun ciri dan karakteristik yang digunakan yaitu: pihak yang menjadi pelaku politik dan ekonomi di Papua, Organisasi pembela aspirasi masyarakat Papua, dan pengamat politik. Kriteria ini dipilih untuk lebih memudahkan dan memfokuskan penelitian pada satu objek. Hal tersebut dilakukan agar peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitian.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Kajian Kepustakaan**

Peneliti menekankan pada kajian kepustakaan karena penelitian ini merupakan *Historical Research*, artinya peneliti melakukan kajian sejarah dengan fokus menganalisis aspek politis. Kajian kepustakaan dilaksanakan untuk pengumpulan data primer. Maklumat yang dikumpulkan merangkumi teori-teori dan landasan yuridis yang berkaitan dengan integrasi politik, ntegrasi kebangsaan, integrasi Papua ke Indonesia serta berbagai latar belakang penyebab integrasi. Kesemua maklumat ini diperlukan untuk mendukung landasan teori kajian dan mengukuhkan pemahaman peneliti terhadap Integrasi Papua ke Indonesia melalui Pepera 1969.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007). Wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan subjek penelitian sehingga diperoleh data-data yang diperlukan. Teknik wawancara ini diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan. Data yang didapat dari wawancara merupakan data sekunder, atau data pendukung.

Tabel 1 Narasumber Dalam Pengumpulan Data

Nama	Status Narasumber Dalam Penelitian
Pdt. Kebabo Wanimbo	Pelaku PEPERA 1969
Filep Jakob Samuel Karma	Nasionalis Papua Merdeka/Tahanan Politik
Natalius Pigay	Aktivis/Penulis buku Papua

### 3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dalam edisi sebelumnya adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang (Suharsimi, 2006). Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman wawancara dan pedoman kajian kepustakaan.

- a. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi dilapangan. Menurut Moleong Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah ia sekaligus

merupakan perencanaan, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Untuk membantu peneliti sebagai instrumen pokok, maka peneliti membuat instrumen penunjang. Dalam penyusunan instrumen penunjang tersebut, Arikunto Suharsimi mengemukakan pemilihan metode yang akan digunakan peneliti ditentukan oleh tujuan penelitian, sampel penelitian, lokasi, pelaksana, biaya dan waktu, dan data yang ingin diperoleh. Dari tujuan yang telah dikemukakan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan kajian kepustakaan.

- b. Instrumen Kedua yaitu dengan metode kajian kepustakaan, peneliti mengkonstrusikan data yang difokuskan pada data mengenai Integrasi Papua Ke Indonesia Melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Di Tahun 1969.
- c. Instrumen Ketiga dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara. Secara umum, menurut Arikunto Suharsimi penyusunan instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini: Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada didalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian, Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel, Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel, Menderetkan deskriptor menjadi butir-butir instrument, Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Setela memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian, selanjutnya dilakukan pengelompokkan data dengan menyeleksi data yang sesuai dengan pokok permasalahan. Klasifikasi data dilakukan berdasarkan indikator dalam teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang didapat akan dianalisa secara kualitatif sehingga dapat memperoleh kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu metode analisa dengan mempergunakan teori yang bersifat umum dihubungkan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini akan dijalankan dengan kaedah kualitatif serta menggunakan

strategi induktif dalam melakukan analisis data, di mana peneliti akan mengumpulkan data-data untuk dibandingkan dengan teori-teori yang dijadikan rujukan untuk mencari suatu kesamaan dari data-data tersebut.

Untuk menganalisis data yang ditemukan baik melalui studi kepustakaan maupun kajian lapangan melalui wawancara dan pengamatan kondisi konflik, penulis menggunakan konsep maupun teori yang berkaitan dengan Integrasi Politik yang defenisinya dimuat dalam Bab Tinjauan Pustaka (Bab II). Pemahaman konsep dan teori tersebut akan membantu penulis untuk menggambarkan proses Integrasi Politik Papua ke Indonesia melalui PEPERA 1969.

Marshall dan Rossman mengajukan teknik analisa data kualitatif untuk proses analisis data dalam penelitian ini. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, diantaranya (Kabalmay, 2002).

a. Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mendalam (*indepth inteviewer*), dimana data tersebut direkam dengan *tape recorder* dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara *verbatim*. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.

b. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan pola

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan *coding*. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkrip wawancara dan melakukan *coding*, melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokan atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti. Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh peneliti dicoba untuk

dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

c. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-faktor yang ada.

d. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penjelesaian. Berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitanya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatu alternatif penjelasan lain tentang kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu ada alternatif penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terpikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternatif lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

e. Menulis Hasil Penelitian

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang membantu penulis untuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan *significant other*. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan *significant other*, dibaca berulang kali sehingga penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interpretasi

secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan Latar Belakang perlunya pembahasan mengenai integrasi politik Papua melalui PEPERA 1969, penelitian ini dibatasi dalam perumusan masalah, berdasarkan ini pula tergambar Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan metodologi penelitian yang akan digunakan, serta tak lupa menggambarkan Sistematika Penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini penulis menguraikan tentang teori, maupun konsep serta regulasi yang digunakan untuk membahas rumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini. Konsep dan teori yang dikemukakan dalam bab ini antara lain pemahaman tentang Integrasi politik, dan Nasionalisme serta Sejarah Papua,

### **BAB III GAMBARAN PERISTIWA POLITIK SEBELUM PEPERA 1969**

Bab ini menggambarkan tentang kronologis sejarah integrasi politik Papua melalui PEPERA 1969, antara lain proses perundingan, konflik, serta situasi sosial sebelum 1969, dan saat dilakukannya PEPERA 1969.

### **BAB IV ANALISIS PROSES INTEGRASI HINGGA PEPERA 1969**

Pada bab ini penulis akan menggambarkan situasi politik Papua terkini, penjelasan mengenai data hasil wawancara, serta analisis data, dan membuat analisis mengenai data, fakta sejarah, yang dianalisis berdasarkan teori atau konsep yang digunakan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dari penelitian ini, dikemukakan Kesimpulan (jawaban atas permasalahan penelitian), dan diakhiri dengan Saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini akan menjelaskan tentang Integrasi Politik, Nasionalisme, serta sejarah Papua. Integrasi Politik dan Nasionalisme akan membantu pembaca untuk melihat proses Integrasi serta Nasionalisasi Papua, sementara itu Sejarah Papua memberikan dasar bagi pembaca untuk melihat Papua hari ini.

#### **A. INTEGRASI POLITIK**

Integrasi politik menunjuk pada sebuah ‘proses kepada’ atau sebuah ‘produk akhir’ penyatuan politik di tingkat global atau regional di antara unit-unit nasional yang terpisah. Menurut pandangan Nazaruddin Sjamsuddin (1989) tentang integrasi politik menekankan pada aspek integrasi sebagai proses. integrasi politik mengandung bobot politik dan karenanya prosesnya bersifat politik pula. Ronald L. Watts mengatakan bahwa integrasi politik adalah penyatuan kelompok yang berbeda, masyarakat maupun wilayah, kedalam suatu organisasi politik yang bisa bekerja atau bertahan hidup. Menurut kamus bahasa Indonesia integrasi adalah penyatuan supaya menjadi bulat atau menjadi utuh, dan nasional adalah yang berkenaan dengan atau berasal dari bangsa sendiri, kebangsaan, dari 2 pengertian itu dapat diambil kesimpulan bahwa integrasi nasional adalah penyatuan suatu bangsa agar menjadi bangsa yang utuh. Bagi suatu negara yang memiliki keanekaragaman atas suku, bangsa, agama, yang hidup di dalam suatu wilayah tertentu yang amat luas dan besar tanpa integrasi dapat mempengaruhi ketenteraman dan keamanan bagi negara itu. sebab mereka tidak merasa menyatu dan secara bebas memainkan peranannya sebagaimana warga negara biasa.

Sedangkan konsep integrasi nasional mengacu pada suatu proses atau kondisi penyatuan bagian-bagian bangsa yaitu masyarakat yang hidup di wilayah negara yang bersangkutan memiliki persamaan sejarah, kesatuan simbol dan perasaan subjektif yang mengikat antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Penyatuan masyarakat dengan sistem politik melalui kelima jenis integrasi ini merupakan proses pembentukan

bangsa-negara. Proses pembentukan bangsa-negara atau proses integrasi politik merupakan salah satu bentuk pembangunan politik (Surbakti, 1992).

Weiner menunjukkan betapa pentingnya integrasi politik bagi suatu negara. Integrasi ini menurut Weiner adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik (Surbakti, 1992). Maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa integrasi politik adalah menyatukan bagian-bagian berupa masyarakat yang majemuk, pluralitas keagamaan, linguisme, budaya peradaban termasuk Wilayah kehidupan mereka ke dalam satu kesatuan sistem politik nasional (*nation-state*). Dengan melihat pengertian tersebut maka integrasi politik ini menurut Weiner dibagi dalam lima jenis yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit dan khalayak, dan perilaku integratif. Namun secara umum yang dapat berinteraksi secara konkret adalah tiga jenis antara lain integrasi bangsa, integrasi wilayah dan integrasi elit-massa.

Orang-orang tidak mengarahkan rasa kesetiaan pada bangsanya sebagai satu keseluruhan tetapi lebih mementingkan pada kelompok-kelompok kedaerahan, etnis, keagamaan, bahasa mereka masing-masing oleh karena itu integrasi bangsa ini sangat penting sebab menyatukan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional. Apabila, masyarakat itu berupa masyarakat majemuk yang meliputi berbagai suku bangsa ras dan agama (Surbakti, 1992). Hal ini diperkuat dengan pandangan Howard Wrigings bahwa :”Integrasi bangsa berarti menyatukan bagian-bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa”.

Tetapi harus diperhatikan bahwa minoritas-minoritas yang berbicara dalam bahasa yang berlainan dan hidup dengan tata cara kebudayaan yang berlainan pula masih terdapat di dalam negara-negara baru itu. Dalam setiap hal, pemerintah-pemerintah nasional yang baru itu berusaha mempercepat integrasi suku-suku bangsa minoritas menjadi satu bangsa dengan jalan mengesahkan suatu bahasa nasional dan memaksakan program-program pendidikan. Dalam banyak hal, begitu banyak rasa jengkel atau sakit hati timbul di kalangan minoritas-minoritas ini akibat tekanan dari kekuasaan pusat sehingga mereka

menjadi lebih menentang. Laju integrasi alamiah diperlambat oleh pemerintah yang tidak sabar.

Dalam pengintegrasian bangsa ini Weiner melihat ada beberapa kebijakan pemerintah pusat untuk menyatukan seluruh masyarakat kepada satu negara nasional yakni :*Pertama*, penghapusan sifat kultural utama dari kelompok minoritas dan rnembangkan semacam kebudayaan nasional biasanya kebudayaan kelompok suku bangsa yang dominan dan kebijakan inilah yang disebut sebagai asimilasi. *Kedua*, pembentukan nasional tanpa menghapuskan kebudayaan kelompok kecil (Surbakti, 1992).

Di samping kedua jenis integrasi yang dibagi oleh Weiner, salah satu cara yang revolusional untuk mengintegrasikan masyarakat agar menyatu dengan negara-bangsa adalah dengan cara kekerasan dan intimidasi militer, tidak sedikit pula negara-negara baru yang otoriter menggunakan cara ini untuk memaksa rakyat dari suatu masyarakat yang kebanyakan penduduknya buta huruf itu agar setia kepada negaranya. Negara yang menggunakan cara kekerasan ini gampang muncul pula benih-benih separatisme sebagai ungkapan kekecewaan mereka.

Integrasi politik pada masyarakat majemuk bukan hanya kesulitan-kesulitan di dalam mengembangkan kata “sepakat” mengenai batas-batas teritorial dan sosialisasi yang harus dihadapi oleh masyarakat majemuk, akan tetapi kesulitan-kesulitan yang jauh lebih besar di dalam mengembangkan sistem pemerintahan atau aturan main proses-proses politik yang mapan. Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal baru sesudah Republik ini berusia di atas tiga puluhan tahun merupakan suatu contoh yang menarik. Menghadapi beragam kesulitan, suatu masyarakat bangsa yang bersifat majemuk sering kali harus mengambil jalan pintas mengembangkan suatu sistem politik yang sangat otoritarian, antara lain melalui birokratisasi dan korporatisasi hampir semua organisasi kemasyarakatan (Nasikun, 1993).

Secara fundamental persoalan yang muncul dalam proses integrasi nasional bersumber pada terjadinya pergeseran-pergeseran di dalam struktur kekuasaan yang diakibatkan oleh berdirinya suatu negara-bangsa. Oleh karena itu, integrasi nasional sebenarnya melibatkan persoalan kedaulatan, terutama menyangkut bagaimana

kekuasaan beralih dalam kelompok-kelompok masyarakat dan bagaimana mereka membagi menggunakan kekuasaan di antara mereka (McAlister, 1973). Bila dilihat dari sudut kekuasaan seperti ini maka menurut Claude Ake :”Integrasi politik pada dasarnya mencakup dua masalah utama: *Pertama*, bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh kepada tuntutan negara. *Kedua*, bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik masyarakat atau individu-individu yang ada didalamnya” (Ake, 1967).

Hal yang kedua ini menyangkut perilaku integratif masyarakat yakni kesediaan masyarakat untuk ikut ambil bagian dan bekerja sama dalam kebijakan politik untuk mencapai tujuan negara dengan cara di mana masyarakat harus mengesampingkan individu, perbedaan kelompok dan perbedaan pendapat bahkan persaingan sekalipun, tidak harus dipertentangkan dengan kesediaan bekerja sama, sebab bekerja sama yang baik tidak dilandasi dengan kelemahan individu, keseragaman dan sikap pasrah melainkan dengan kemampuan individu, perbedaan pendapat, persaingan sehat, dan sikap yang tegar (Surbakti, 1992).

Bagi negara otoriter dan militeristik perbedaan ini tidak dibenarkan, ia menggunakan berbagai macam dalil dengan kekerasan, paksaan, intimidasi, dan ultra-hegemoni negara untuk membungkam kenyataan diversifitas dalam segala dimensi, biasanya, cara seperti ini sering digunakan bagi suatu negara yang rakyatnya diintegrasikan secara paksa ke dalam negaranya dan perjalanan selanjutnya rakyat dipaksa untuk menerima simbol-simbol kenegaraan sekalipun di dalam benaknya menolak atas paksaan itu tetapi ia dengan terpaksa harus menerimanya (Pigay, 2000).

## **B. NASIONALISME**

Nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang timbul karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat dan maju dalam satu kesatuan bangsa, negara dan cita-cita bersama guna mencapai dan memelihara serta mengabadikan identitas persatuan, kemakmuran dan kekuatan atau kekuasaan negara kebangsaan yang bersangkutan (Populer, 1983). Oleh karena itu nasionalisme sering digandang sebagai suatu ideologi

pemelihara negara bangsa. Nasionalisme juga merupakan filsafat politik dan sosial yang menganggap kebaikan bangsa paling utama. Perkataan tersebut menggambarkan semangat yang berlebih-lebihan untuk kesejahteraan dan kemajuan nasional sehingga menjadi suatu gerakan sosial atau aliran rohaniah yang mempersatukan rakyat ke dalam bangsa yang membangkitkan massa dalam keadaan politik dan sosial yang aktif maka dengan ini negara menjadi milik seluruh rakyat sebagai keseluruhan. Hal inilah yang membuat nasionalisme dilihat sebagai suatu dasar ideologi (Isjwara, 1992). Sekalipun definisi yang pasti tidak mungkin diberikan, nasionalisme ditandai oleh patriotisme dan oleh keyakinan nilai-nilai kultural dalam suatu bangsa tetapi tidak dapat disangkal bahwa nasionalisme sebagai suatu kekuatan ideologi dunia yang sangat mempengaruhi Berpolitikan global (Populer, 1983).

Secara etimologis Nasionalisme, *Natie* dan Nasional, kesemuanya berasal dari bahasa Latin *Natio* yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran, dari kata *Nasci* yang berarti dilahirkan, maka jika dapat dihubungkan secara objektif maka yang paling lazim dikemukakan adalah bahasa, ras, agama dan peradaban (*civilization*), wilayah, negara dan kewarganegaraan (Kohn, 1958). Ini merupakan faktor-faktor atau unsur-unsur pokok nasionalisme yang objektif dan yang amat kuat membentuk nasionalisme dan membantu mempercepat proses evolusi nasionalisme ke arah pembentukan negara nasional. Pada mulanya persamaan faktor-faktor tersebut di atas kemudian lambat-laun ada unsur tambahan yaitu adanya persamaan hak bagi setiap orang untuk memegang peranan dalam kelompok atau masyarakatnya serta adanya persamaan kepentingan ekonomi inilah yang kemudian dikenal dengan istilah nasionalisme modern, sehingga selanjutnya nasionalisme telah memainkan peranan yang sangat penting dan positif di dalam menopang tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Menurut Douglas Weeks: “Nasionalisme merupakan formalisasi dan kesadaran nasional inilah yang membentuk *natie* dalam arti politik yaitu negara nasional” (Weeks, 1992).

Orientasi ke negara nasional dari konsep nasionalisme ini menampilkan diri pertama-tama dan terutama sebagai suatu gerakan kemerdekaan dari dominasi kolonial dan baru kemudian sebagai sebagai gerakan demokrasi (Nasikun, 1996), karena itu menurut Aditjondro: Nasionalisme bukanlah sesuatu yang begitu saja jatuh dari langit,

ada akar historisnya, ironisnya akar historis tersebut tidak jarang bermula dari sejarah kolonialisme (Aditjondro, 1998). Sehingga menurut Schulz nasionalisme pada umumnya merupakan gerakan yang bertujuan akan eksistensi politik yang tersendiri dengan otonomi menentukan nasib sendiri yang seluas-luasnya. Nasionalisme tidak pernah puas dengan pemerintah sendiri yang sebagian (*partial self- government*) tetapi selalu menghendaki pemerintah sendiri yang lengkap. Nasionalisme karena itu juga merupakan sumber dari pada apa yang dinamakan penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa (*the principle of self determination*).

Nasionalisme juga muncul ketika suatu kelompok suku, bangsa, bahasa dan budaya sama yang hidup di suatu wilayah tertentu berhadapan dengan manusia-manusia yang berasal dari luar wilayah kehidupan mereka. Dalam masyarakat tradisional kaya akan mitos-mitos yang sekuler tetapi dalam pandangan hidupnya terintegrasikan secara terpadu antara kepercayaan dan dalam kenyataan hidup. Keterpaduan dalam pandangan ini hanya terjadi dalam internal sehingga pada saat dihadapkan dengan masyarakat luar, mereka menganggap sebagai lawannya, misalnya ketika seseorang berada di dalam lingkungan keluarga ia memandang keluarga di luar mereka sebagai lawan atau musuhnya, tetapi ketika ia berada di dalam lingkungan sukunya ia membela mati-matian atas perkataan orang yang menyinggung sukunya dan akhirnya memprovokasi untuk menyampaikan perkataan orang lain tersebut kepada sukunya, akibatnya terjadi perang antar suku dan lain-lain. Pola berpikir inilah yang disebut pola berpikir Nasionalisme yang menurut Aditjondro: “Tentu saja kita tidak boleh lupa bahwa nasionalisme ikut disuburkan oleh gerakan-gerakan rasu adil (mesianis) dan mitos-mitos di berbagai suku” (Aditjondro, 1998).

Sehingga menurut Clifford Geertz, faktor-faktor primordial seperti ras, bahasa, agama dan adat istiadat dapat menentukan nasionalisme etnik ini. Nasionalisme khusus berupa itu dapat berwujud suatu falsafah, dogma atau ideologi yang ditandai dengan ciri-ciri khusus yang mendominasi nasionalisme bangsa itu. Hal ini menurut Organski: “Nasionalisme tahap I dari tahap perkembangan politik kesatuan nasional primitif (*the political of primitive unification*)”.

Kesetiaan kepada kelompok suku, umpamanya, merupakan kesetiaan yang terbentuk di dalam diri setiap orang secara otomatis dan alami, kesetiaan kepada keluarga yang menjadi kesetiaan kepada suku menjadi dasar dari solidaritas kelompok primordial suku. Kesetiaan seperti ini tidak perlu digembar-gemborkan atau didorong untuk dikembangkan karena ia muncul dengan sendirinya bahkan kampanye untuk membesarkan primordial suku dapat dicurigai sebagai gerakan sektarian yang dapat merongrong kesetiaan yang lebih luas yaitu nasionalisme (Rauf, 1984). Geertz lebih menekankan bahwa pemanfaatan kesetiaan primordialisisme untuk kepentingan politik menghasilkan kesetiaan politik yang fanatik. Kesetiaan politik yang fanatik akan menciptakan konflik politik yang hebat, luas mendalam dan sulit diselesaikan. Konsekuensi logis dari terjadinya konflik politik seperti ini adalah ketidakstabilan politik yang akhirnya dapat mengancam integrasi nasional, selanjutnya pendapat tersebut ada relevansinya dengan hipotesis yang diajukan oleh Jhon R. G. Jopari di atas.

Hipotesis Jopari ini berbeda dengan nasionalismenya pemimpin pemikir Indonesia terutama oleh Bung Karno, sering kali ditegaskan bahwa pengertian bangsa atau kebangsaan Indonesia didasarkan pada teori atau pemikiran dan definisi dari Ernest Renan tentang pengertian bangsa sebagai konsep politik. Menurut Organski, perkembangan nasionalisme dapat dibagi dalam empat fase yakni :*Pertama*, nasionalisme fase I dari tahap perkembangan politik kesatuan nasional primitif (*The Political Of Primitive Unification*). *Kedua*, Nasionalisme fase II dari tahap perkembangan politik industrialisasi (*The Political Of Industrialization*). *Ketiga*, Nasionalisme fase III dari tahap perkembangan politik kesejahteraan nasional (*The Political Of National Welfare*). *Keempat*, Nasionalisme fase IV dari tahap perkembangan politik kemakmuran (*The Political Of National Welfare*) (Nasikun, 1996).

Fase pertama ini merupakan cerminan dari perkembangan nasionalisme terutama negara-negara dunia ketiga yang kebanyakan telah mengalami penjajahan oleh kaum kolonial. Dimana masyarakat pada awalnya adalah kesetiaan berdasarkan suku, agama, bahasa namun demikian selanjutnya ketika berhadapan dengan bangsa kolonial mereka bersatu untuk membela tanah air tanpa memperdulikan suku, bangsa, agama dan ras. Prof. Hertz menyebut empat macam cita-cita nasionalisme yang diilhami oleh seluruh bangsa:

*Pertama*, Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi persatuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, keagamaan, kebudayaan dan perSekutuan serta adanya solidaritas. *Kedua*, Perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebebasan dari penguasa asing atau campur tangan dunia luar dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan intern yang tidak bersifat nasional atau yang hendak menyampingkan bangsa dan negara. *Ketiga*, Perjuangan untuk mewujudkan kesendirian (*separateness*), pembedaan (*distinctiveness*), individualitas, keaslian (*originality*) atau keistimewaan. *Keempat*, Perjuangan untuk mewujudkan pembedaan di antara bangsa-bangsa yang memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi, dan pengaruh (Isjwara, 1992).

Pada butir kedua di atas perjuangan untuk membebaskan diri dari negara asing dan campur tangan dunia luar ini terutama terdapat pada negara-negara dunia ketiga yang hampir pernah mengalami penderitaan di masa penjajahan dari negara-negara di belahan bumi bagian utara (Negara Kolonial). Ada banyak pendapat para ahli yang mengatakan bahwa negara adalah salah satu elemen dari bangsa (rakyat). Mungkin juga pada saat timbulnya bangsa itu belum ada negara akan tetapi dalam hal ini senantiasa ingatan kita akan adanya negara di zaman lampau dan adanya cita-cita bernegara di hari kemudian merupakan ciri yang khas. Walaupun secara nyata masih praduga sebab bangsa tidak selalu sama dengan negara, ada bangsa yang belum punya negara tetapi ada negara yang meliputi berbagai bangsa sehingga pendapat Prof. Kohn bukan berarti mutlak harus memiliki negara pada masa lampau maupun juga pada masa yang akan datang. Namun demikian kecenderungan masyarakat yang modern dan telah rnengetahui pentas politik mempunyai keinginan kuat untuk ingin membentuk sebuah negara dan ingin bebas dari keterikatan bangsa-bangsa yang lainnya (Pigay, 2000).

## **C. SEJARAH PAPUA**

### **1. Pra Kolonialisme**

Dalam tinjauan Wallace pada abad XIX, Nusantara terdapat dua ras yaitu ras melayu dan ras Melanesia. Menurut M. Amir Sutaarga di Papua terdapat latar belakang ras yang beranekaragam, yaitu, Negroid, Melanosoid, Mikronesia, dan Mongoloid.

Keanekaragaman penduduk ini tampak dari 250 bahasa yang dimiliki dan digunakan oleh masyarakatnya. Di beberapa daerah penduduk menggunakan bahasa lokal dengan dialek yang berbeda-beda. Misalnya masyarakat Biak menggunakan satu bahasa, sedangkan masyarakat di Waropen menggunakan dua bahasa. Ciri-ciri fisik berkulit kehitaman, rambut keriting, hidung besar hampir mewarnai sebagian wilayah timur Indonesia (Meteray, 2011).

Hingga awal abad XX mayoritas masyarakat Papua belum tersentuh ajaran agama apapun. Pengaruh agama Islam melalui kerajaan-kerajaan Islam sudah dimulai pada abad XVII di Kepulauan Raja Ampat, Sorong, dan Fak-Fak. Pengaruh Islam ini dibawa oleh orang-orang dari kerajaan Ternate, Tidore, dan Seram. Sementara itu penyebaran agama Kristen Protestan dimulai pada 1855 di pantai utara sekitar Manokwari, Waropen, Biak, Jayapura, dan Sarmi. Sedangkan agama Katolik dimulai pada 1898 di sekitar pantai Selatan seperti Fakfak, Mimika, dan Merauke. Sementara itu penduduk pedalaman Papua tidak pernah tersentuh oleh berbagai agama tersebut hingga abad XX (Meteray, 2011).

Pada abad VII Raja Sriwijaya Sri Indrawarman mengirim Upeti kepada Kaisar Tiongkok berupa burung Cendrawasih, hal inilah yang kemudian menjadi bukti adanya hubungan antara orang Papua dengan wilayah lain di Nusantara saat itu (Koentjaraningrat, 1993). Sementara itu jejak Papua di masa kerajaan Majapahit terlihat dalam tulisan kitab *Negarakertagama* karya Prapanca yang menggambarkan bahwa terdapat dua daerah di Papua kala itu yang disebut sebagai Wwanin yang adalah nama lain dari Onin (dekat Fakfak), dan Sran yang adalah nama lain untuk Kowiai atau Kaimana dan sekitarnya (Meteray, 2011). Hubungan wilayah Papua dengan kerajaan dari wilayah Maluku digambarkan sudah terjalin terlebih dahulu sejak ratusan lalu sebelum adanya kerajaan Islam hal ini disebabkan adanya kesamaan etnis dan budaya serta telah terjadinya migrasi dua arah antara warga Maluku dan Papua, faktor kedekatan secara geografis adalah yang paling memungkinkan.

Kerajaan Islam di Maluku seperti Tidore dan Ternate selalu bersaing memperebutkan pengaruhnya di Raja Ampat. Hal ini dimulai oleh sultan Tidore dengan prose perkawinan yang kemudian berlanjut pada pembentukan struktur di bidang militer dan pemerintahan yang terlihat dari pemberian gelar atau nama seperti, Sangaji, Kapitan,

Dimara, Korano, dan Kolano (Leirissa et.al, 2009). Ketika bangsa Portugis mengunjungi Onin di Selatan Papua pada 1622, De Torres, mendapati adanya pedagang Islam dari Tidore, Seram, dan Ternate (Meteray, 2012). Aktifitas mereka diperkirakan perkembangan Islam tidak hanya terjadi kepulauan Raja Ampat tetapi hingga ke Sorong dan Fakfak sekitar Teluk Onin. Menurut tradisi lokal penyebaran Islam lebih besar dipengaruhi oleh penguasaan kerajaan Tidore di wilayah Kepulauan Raja Ampat. Kehadiran Islam membawa pengaruh Melayu terhadap tradisi lokal, Melayu sendiri sangat besar pengaruhnya dari Arab, sehingga masyarakat Raja Ampat sering menganggap diri sebagai keturunan Arab. Hingga dewasa ini hampir seluruh masyarakat di Salawati dan Misool adalah penganut Islam (Massinanbouw, 1983).

## **2. Kolonialisme Belanda**

Bangsa Barat (Eropa) yang pertama kali datang ke Papua adalah Antonio d'abreu dan Francecco Serrao dari Spanyol pada 1526-1527, tetapi yang pertama kali menyebut nama dan orang Papua dalam laporannya adalah Pigafetta seorang pelaut Portugis yang pernah menyinggahi Maluku, dan nama Papua dikenal. Pada tahun 1545 Ynigo Ortiz De Retez, memberi nama Nueva Guinea dengan alasan adanya kesamaan penduduknya dengan penduduk di Guineai (pantai barat Afrika), Kerajaan Belanda memasuki Papua pertama kali pada tahun 1705, namun secara *de facto* memiliki Papua pada 1828 setelah mereka membangun benteng Fort Du Bus di Lobo, Teluk Triton (sekarang wilayah Kabupaten Kaimana). Sedangkan pos pemerintahan yang efektif oleh Belanda mulai dibuka ketika terjadi persaingan antara Jerman dan Inggris di bagian Timur New Guinea yang dibuka di Manokwari dan Fakfak pada 1898, dan di Merauke pada 1905 (Meteray, 2012).

Namun pada tahun 1898 Belanda mengesahkan pendudukannya atas Papua Barat melalui pengesahan anggaran oleh Parlemen Belanda untuk membangun pemerintahan di Papua Barat sebesar *f 115.000,-*. Sejak saat itulah Belanda memasuki Papua dan memulai penjajahannya hingga tahun 1962. Pada saat itu Belanda membagi Papua menjadi dua yaitu, Bagian Utara disebut *afdeeling* Noord Nieuw Guinea yang berpusat di Manokwari di Teluk Doreri, dan Bagian Selatan disebut *afdeeling* West-ed Zuid Nieuw Guinea

dengan ibukota di Fakfak, dalam pemerintahannya kedua wilayah tersebut dipimpin oleh seorang kontroleur dibawah pimpinan keresidenan Maluku. Praktek-praktek pemberdayaan masyarakat Papua pada masa itu diberikan kepada misionaris Kristen Protestan dan Katolik. Misionaris Kristen Protestan atau Zending Protestan dipimpin oleh Otto dan Geisler yang berkebangsaan Jerman, dimulai pada tahun 1855 bergerak di bagian Utara Papua. Sedangkan misionaris Katolik yang masuk setelahnya pada tahun 1896 dan melakukan kegiatannya di bagian Selatan Papua dibawah pimpinan Pater J. Vertenten. Keduanya bergerak di bidang pendidikan dengan mendatangkan guru dari Minahasa dan Ambon, mereka pun turut melakukan pembenahan wilayah permukiman bagi masyarakat Papua (Meteray, 2011).. Hal ini kemudian bisa dikatakan sebagai perwujudan untuk menuju pemusatan pembangunan ekonomi di Papua. Sementara itu pemerintah Belanda lebih memfokuskan pada pembangunan pos-pos pemerintahan.

Politik Belanda pada masa itu bisak dikatakan hanya sebagai strategi untuk menahan masuknya Inggris dan Jerman menuju Nusantara, karena kedua negara menguasai Timur Papua, Papua Nugini saat ini. Karena alasan geografis yang terlalu luas, serta masyarakat yang masih primitif menjadikan Belanda hanya menempatkan pos-pos pemerintahannya sebagai bentuk pengklaiman haknya atas Papua Barat. Untuk memicu pertumbuhan ekonomi di Papua, Belanda membuka wilayah Digul dan Merauke sebagai residen baru di wilayah tersebut. Ini yang kemudian menjadi tempat pengasingan bagi pemberontak-pemberontak di Pulau Jawa termasuk Bung Hatta, Sutan Syahrir, dan Soekarno, wilayah yang kemudian lebih dikenal sebagai Boven Digoel.

Wilayah Zuid Nieuw Guinea kemudan dihapuskan statusnya sebagai *afdeeling* dan digabungkan sebagai *onderafdeeling* yang dipimpin oleh seorang kontroleur yang dibawahnya terdapat *besturessort* (desa), terdapat 1 *besturessort* di Boven Digoel dan 4 *besturessort* di Merauke. Sementara itu wilayah pedalaman Papua baru dibuka oleh Belanda menjelang tahun 1936-1938 melalui para misionaris. Paniai dibuka oleh Letnan Wissel di tahun 1936, disusul pembukaan lembaga pendidikan sejenis kursus, oleh para misionaris, sedangkan wilayah Amungme dibuka pada tahun 1954. Dalam menguasai Papua, Belanda menerapkan sistem pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan lokal yang sudah ada namun tunduk terhadap pemerintahan Kerajaan Belanda yang

dinamakan sistem pemerintahan *Zelf bestuurend landschappen*. Sehingga sistem pemerintahan oleh Belanda pada masa itu diwakili oleh keresidenan di Maluku dan penguasaan oleh Kerajaan Tidore. Namun sistem ini kemudian secara pasti berubah ketika Jepang menjajah Papua, karena Jepang hanya menjadikan Papua sebagai pangkalan Militer dalam perangnya di Pasifik melawan Sekutu.

### **3. Kolonialisme Jepang**

Tahun 1942 Jepang mendarat di Papua dan mulai melakukan pendudukan serta penguasaan atas Papua hingga mencakup seluruh Papua kecuali Merauke. Pemerintahan Jepang di Papua tunduk terhadap Komandan Militer Jepang yang berpusat di Makassar. Pendudukan Jepang tidak berlangsung seperti di wilayah lain yang disertakan adanya indoktrinasi, namun penduduk Papua hanya dipaksa untuk bekerja melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, serta menyiapkan logistik berupa ransum bagi tentara Jepang selama perang Pasifik. Lembaga pendidikan yang dimiliki pemerintah Belanda sebelumnya maupun lembaga-lembaga misionaris keagamaan dipaksa tutup oleh pemerintah militer Jepang (Proyek Penelitian Dan Kebudayaan Daerah, 1978).

Pendudukan Jepang dilawan oleh orang Papua yang dijuluki sebagai kaum Mesianis, sehingga gerakan mereka disebut sebagai gerakan mesianis. Gerakan ini sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Kristen dan Katolik, yang mendasarkan pemahaman mereka terhadap munculnya sang Juru Selamat bagi rakyat Papua yang membebaskan mereka dari perbudakan, isolasi, pengekangan. Salah satu gerakan mesianis di Biak dinamakan Koreri, yaitu gerakan yang mendambakan terbebas dari masalah, kesedihan, penyakit, dan kematian, gerakan ini sudah ada sejak masa pendudukan Belanda dan berlanjut hingga Jepang datang (Schoorl, 2001). Pengikut Koreri melakukan perlawanan terhadap Jepang dengan menyerang Benteng Jepang di Numfor pada Agustus 1942 dan di Manswan pada Oktober 1942. Pada April 1944 pasukan Sekutu mendarat di Hollandia (Jayapura) dan berhasil menyingkirkan Jepang dalam waktu 3 bulan. Tentara Sekutu dibantu masyarakat Papua.

#### 4. Kolonialisme Belanda II Pra Trikora

Harsja W. Bachtiar menggambarkan bahwa kedatangan Sekutu dan Belanda pada fase kedua pasca kemenangan Sekutu di Pasifik mendapat dukungan yang besar dari masyarakat Papua karena penjajahan Jepang dirasakan lebih menyengsarakan daripada penjajahan Belanda sebelumnya. *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA) membangun kembali pemerintahan colonial di Hollandia, Biak, Sarmi, Serui, dan Numfor. Bantuan Sekutu yang menyingkirkan Jepang mengubah cara pandang orang Papua terhadap Belanda yang datang bersama Sekutu. Alasan sederhana yang menggambarkan betapa masyarakat Papua terbuka menerima pasukan sekutu karena banyaknya pasukan sekutu yang berkulit Hitam dan berambut keriting, sama dengan orang Papua (Bachtiar, 1961).

Belanda yang membonceng sekutu dan NICA berhasil mendapatkan kembali Papua yang ditandai dengan upacara penyerahan secara militer pada 25 Januari 1946 di Hollandia. Strategi pemboncengan ini sudah terencana lama sejak Jepang berhadapan dengan sekutu di Pasifik, Belanda yang diwakili oleh Van Mook (Menteri Daerah Jajahan) dengan MacArthur, Jenderal pimpinan pasukan sekutu, yang ditandai dengan masuknya pasukan Belanda yang melarikan diri ke Brisbane, Australia, kedalam pasukan gabungan sekutu yang bernama *South West Pacific Area* (SWPA). Pasukan inilah yang menguasai sebagian besar wilayah lautan dan daratan di Pasifik Barat Daya. Setelah menguasai Papua pasukan Sekutu menyerahkan sistem pemerintahan dan kemasyarakatan untuk diurus oleh NICA, yang dianggap lebih memahami karakter Demografi maupun geografis Papua. Belanda yang didukung sekutu melakukan penghapusan keterikatan kekuasaan dengan Tidore, sebagai tanda pelepasan Papua dari pengaruh hubungan kekuasaan, sosial, budaya, dan tradisi dengan bangsa lain disekitarnya.

Pelepasan ini ditandai dengan dikeluarkannya Staatblad Tahun 1946 No. 17 pada Tanggal 13 Februari 1946 setelah Sekutu meninggalkan Papua secara keseluruhan pada 25 Januari 1946. Pendudukan atas Papua dimulai Belanda sebagai sebuah wilayah yang diperintah secara langsung oleh Kerajaan Belanda yang disahkan dalam surat keputusan HVK No. 12 tahun 1949 tanggal 8 Juli 1949, dalam Staatblad tahun 1949 No. 80.

Kemudian pengubahan nama Irian menjadi Neolandschap Nieuw Guinea melalui keputusan HVK No. 13 tahun 1949 tanggal 13 Juli 1949 dalam Staatblad tahun 1949 No. 184 (Bachtiar, 1961). Kala itu Papua dipimpin oleh Residen Van Eechoud yang dianggap sangat berjasa karena memfokuskan pembangunan melalui pembenahan sistem pendidikan dan mengadakan lembaga pendidikan di wilayah Papua, disinilah intelektual Papua angkatan pertama lahir seperti Nicolas Youwe, Markus Kaisepo, Frans Kaisepo, Corinus Krey, dan masih banyak lagi lainnya.

Pendudukan kedua ini dirasakan berbeda dengan masa sebelum pendudukan Jepang, salah satu contohnya adalah ditempatinya orang Pribumi dalam jabatan struktur pemerintahan menengah kerajaan Belanda. Di akhir 1949 diperkirakan terdapat sekitar 8.500 orang Eropa di Papua yang menguasai Ekonomi, Politik, Pertanian, dan Perkebunan. Pendidikan masyarakat pribumi mulai meningkat seiring perkembangan perubahan tersebut yang ditandai dengan dibukanya Sekolah Kerajinan Bagi Perempuan (*Meisjes Niverheidsschool*) di Hollandia, Sekolah Menengah Pertama (*Primaire Middelbare School/PMS*), *Hogere Burgerschool* di Hollanda dan Pendidikan Untuk Tenaga-Tenaga Putra Daerah (*Opleiding School Voor Inheemsche Bestuursambertenaren* disingkat OSIBA) di Hollandia (Soedharto, et al, 1989).

Pada tanggal 14 Juni 1950 pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan bernomor 43 yang disahkan sebagai Undang-Undang oleh Staten General (Parlemen Belanda), bersama Ratu Belanda dan Menteri Daerah Jajahan yang dimasukan dalam *Gouvernementstblad van Nieuw Guinea* yang disahkan pada 9 Juni 1955, yang isinya tentang penetapan Kerajaan Belanda meliputi wilayah Netherlands, Suriname, Nederlands Antillen, dan Nederlands Nieuw Guinea, dan diperintah langsung oleh Ratu Belanda. Berdasarkan keputusan penetapan tersebut berturut-turut Gubernur yang memerintah di Belanda antara lain; S. L. J. van Waardenburg (1950-Maret 1953), J. van Baal (April 1953-April 1958), dan Pieter J. Platteel (Mei 1958-September 1962). Gubernur terakhir yang disebut berasal dari Partai Anti-Revolutionaire, bersama pemerintahan Gubernur Australia yang saat itu menjajah Papua Timur (Papua Nugini saat ini) melakukan konferensi di Canberra tanggal 20-24 Oktober 1958, dan konferensi di Hollandia pada Maret 1960, yang terutama membahas kemungkinan diadakannya

penggabungan seluruh pulau Papua menjadi sebuah negara di kemudian hari (Jopari, 1993).

Van Eechoud pada masa itu sangat berpengaruh terhadap usaha kemerdekaan Papua dengan mengirim Frans Kaisepo ke dalam Konferensi Malino pada bulan Januari 1946. Van Eechoud didukung oleh partai politik di Belanda seperti Groter-Nederland Actie dan Indische Nederlansche Partij. Usaha ini kemudian disebut sebagai usaha dekolonisasi Belanda atas Papua, serta sebagai penguatan pengaruh Belanda atas Papua menjelang diakuinya Indonesia sebagai Negara berdaulat oleh pemerintah Belanda. Usaha ini kemudian berujung pada pembentukan Dewan Nieuw Guinea (*Nieuw Guinea Raad*) pada tanggal 10 November 1960 melalui Staatblad No. 454 dengan tugasnya antara lain; hak petisi untuk mengajukan permohonan, hak interpelasi, hak menyampaikan nasihat mengenai undang-undang Irian, tugas bantuan berdasarkan amandemen atau usul perubahan terhadap ketentuan ordonansi-ordonansi, tugas bantuan terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran yang berhubungan dengan tinjauan dan pengamatan hukum pada umumnya. Lembaga inilah yang kemudian membentuk alat kelengkapan negara dan membentuk Komite Nasional yang mempersiapkan kemerdekaan Papua Barat, hingga pada tanggal 1 Desember 1961 dilakukannya pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera Nasional Papua Barat, dan menanyanyikan lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua”, dengan nama resmi West Papua. Peristiwa bahagia ini berlangsung hanya selama 18 hari, karena pada tanggal 19 Desember 1961 Pemerintah Indonesia melakukan Tri Komando Rakyat, sebagai bentuk usaha untuk membubarkan negara boneka Irian Barat buatan Belanda.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN PERISTIWA POLITIK DI PAPUA SEBELUM PEPERA 1969**

Bab ini akan menjelaskan tentang peristiwa politik di Papua yang menyertakan orang Papua di dalamnya, seperti pembentukan partai politik di Papua. Jika pembentukan Dewan Nieuw Guinea adalah sebagai *setingan* Belanda, maka Partai Politik yang akan dibahas dalam bab ini adalah gambaran munculnya kesadaran politik diantara masyarakat Papua. Bab ini juga akan menjelaskan tentang Papua dalam berbagai perundingan mengenai penentuan nasib Papua.

##### **A. MUNCULNYA PARTAI POLITIK DI PAPUA PRA PEPERA 1969**

Partai politik yang muncul di Papua sebagai bentuk kebebasan berpolitik yang diberikan oleh pemerintah Belanda bagi masyarakat Papua, juga sebagai bentuk usaha penentuan nasib sendiri masyarakat Papua. yang bagi Belanda disebut sebagai tanggungjawab moral kepada masyarakat Papua. Penjelasan tentang partai politik di Papua di bawah ini diambil dari buku Bernada Meteray dengan judul *Nasionalisme Ganda Orang Papua* (2012).

##### **1. Partai Gerakan Persatuan New Guinea (GPNG)**

GPNG adalah partai politik yang dibentuk oleh kalangan intelektual Papua angkatan Pertama hasil didikan di sekolah pamong praja yang didirikan oleh van Eechoud, GPNG didirikan oleh Nicolaas Jouwe. GPNG didirikan di Hollandia pada tahun 1951. Partai ini didirikan sebagai bentuk misi menentang pemerintah Indonesia dan mempromosikan persatuan orang Papua serta memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua (der Veur, 1963). Partai GPNG mendapat dukungan dari intelektual Papua lainnya pada masa itu seperti Marcus Kaisepo dan Johan Arkis, GPNG selain itu mendapat dukungan besar dari masyarakat Papua yang ada di perkotaan dan yang memahami situasi politik saat itu seperti masyarakat di Biak, Manokwari, Sorong, dan Merauke. Intelektual Papua yang tergabung dalam partai ini antara lain Johan Ariks, Wanma, Marino, Welem Simorit, Melky Rumfabe, Barrend Mandtjan, dan Lodwijk Mandatjan, GPNG secara bertahap

memiliki anggota hingga tahun 1957 sekitar 3.000 orang. GPNG gencar melakukan kampanye pasca gagalnya Indonesia membawa masalah Papua ke sidang Umum PBB pada tahun 1955 (Meteray, 2012).

GPNG menjadi pemicu awal munculnya partai politik serta organisasi masyarakat sipil di Papua yang mengurus masalah-masalah sosial maupun Politik di Papua. Organisasi Massa yang muncul setelah GPNG adalah Perserikatan Sekerja Kristen di Nieuw Guinea (Persekding) pada tahun 1952. Persekding sebagai organisasi buruh Pribumi yang mempersalahkan mengenai kondisi kerja di Papua serta ketidakadilan Pengupahan antara masyarakat Pribumi dan Indo Peranakan. Lagerberg menggambarkan demonstrasi Persekding di hadapan Menteri Sekretaris Belanda pada 1952 memprotes kebijakan pengupahan serta tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat pribumi, sebagai bangkitnya kesadaran sosial masyarakat pribumi, dan menganggap pendidikan pamong praja van Eechoud berhasil sampai pada tahap tersebut (Meteray, 2012).

## **2. Partai Nasional (Parna)**

Pada 10 Agustus 1960 Partai Nasional (Parna) didirikan di Hollandia. Ide pembentukan partai ini berasal Frits Kiriho yang berusia 25 tahun. Dia orang muda Papua pertama yang mengikuti kuliah sosiologi non-Barat di Universitas Leiden. Frits Kiriho telah mengetahui keraguan di kalangan orang Belanda perihal Papua, apakah bisa menjadi suatu negara merdeka. Frits Kiriho menyampaikan idenya untuk membentuk partai politik kepada Herman Wajoi (asal Serui, 28 tahun), yang bekerja pada Departemen Keuangan, dan Amos F. Indey (asal Tanah Merah), pegawai Departemen Keuangan di Hollandia (Drooglever, 2010). Dengan dukungan Herman Wajoi dan Amos F. Indey diadakan rapat di Hamadi pada 10 Agustus 1961. Herman Wajoi ditunjuk sebagai ketua, dibantu oleh Amos F. Indey dan S. Malibela (asal Sorong), seorang asisten laboratorium di Departemen Kesehatan. Mereka merancang program sebagai berikut ;

- a. Tuhan sebagai dasar dalam membangun suatu negara. Karena itu, Parna menentang diskriminasi rasial.
- b. Kerja sama untuk mempercepat kemerdekaan di Papua.
- c. Memprioritaskan Papuanisasi dalam berbagai urusan pemerintahan.

- d. Membangun komunikasi demi peningkatan kesejahteraan hidup dan meningkatkan ekspor.
- e. Mendirikan sebuah bank kredit untuk memberikan stimulan bagi orang Papua agar dapat terlibat dalam urusan bisnis, pertanian, perikanan, demi perbaikan ekonomi.
- f. Mendatangkan modal dari luar Papua.
- g. Mempercepat pendirian sekolah lanjutan seperti PMS dan MULO dan dilanjutkan dengan pendirian universitas.

Pertemuan itu dihadiri sekitar 400 orang Papua, mayoritas kalangan terdidik. Setelah terbentuk, Parna memiliki anggota di setiap pelosok Papua. Bahkan yang sebelumnya anggota Persekding beralih menjadi anggota Parna. Kalangan muda pendukung Parna umumnya berpendidikan dan berpengalaman sehingga lebih antusias dan dalam beberapa hal cenderung radikal memaknai hak menentukan nasib sendiri. Mereka menginginkan kemerdekaan Papua secepat mungkin dan menolak pengaruh dari kelompok tua. Mereka menilai kelompok tua seperti Marcus Kaisiepo, Johan Ariks, dan Nicolaas Jouwe sangat lamban. Perbedaan orientasi kedua kelompok memengaruhi arah perkembangan politik di Papua.

Parna memiliki pengurus cabang di dua kota, yaitu Biak dan Manokwari, sebab Frits Kirihiu, pemrakarsa Parna, adalah juga sekretaris Persekding. Karena itu, Parna tidak dapat dikategorikan sebagai gerakan rakyat karena para anggotanya umumnya berasal dari kalangan terpelajar yang berada di perkotaan. Parna lebih nasionalis dan berupaya mempersatukan seluruh penduduk Papua. Parna bertujuan meningkatkan Papuanisasi di kalangan aparat pemerintah dengan cara memperbanyak orang Papua yang mengikuti berbagai kursus pada 1966. Diharapkan pada 1970 semua fungsi pemerintahan lokal berada di tangan orang Papua. Frits Kirihiu mendorong orang Papua agar tidak takut terlibat dalam politik seraya menyebutkan rencana pembentukan Dewan Nieuw Guinea. Dia menegaskan harapannya bahwa kelak Papua tidak hanya dipimpin oleh orang Eropa.

Dalam diskusi Frits Kirihiu menegaskan bahwa penduduk Papua harus bersatu dan membuang perasaan kedaerahan. Dia menolak pernyataan seorang hadirin asal Australia yang mengatakan bahwa tidak ada diskriminasi rasial di Papua. Sebaliknya, menurut Frits Kirihiu, ada perbedaan status di Papua: ada kulit putih, Indo peranakan, orang Indonesia, dan orang Papua dalam struktur pemerintahan. Parna menuntut persamaan status untuk

setiap orang di Papua dan orang Papua dipandang sederajat dengan kelompok masyarakat yang lain. Ketika menyinggung tentang pegawai negeri, Frits Kirihio menjelaskan bahwa tidak harus menunggu menjadi pegawai negeri hingga orang Papua mencapai tingkat perguruan tinggi. Para calon kepala distrik atau inspektur polisi, misalnya, dapat dididik di OSIBA atau PMS (setingkat Sekolah Rakyat di Jawa) yang diperpanjang masa studinya selama enam hingga tujuh tahun. Tidak akan ada lagi pertanyaan yang menyangkut pro-Belanda atau pro-Indonesia. "Kita hanya untuk negara kita" katanya. Pada akhirnya Frits Kirihio menegaskan, kenyataan memperlihatkan bahwa bukan hanya kekuatan politik, uang sangat dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan. Maka, diharapkan para peserta yang hadir dalam pertemuan itu terus bekerja. Dia memberi contoh keadaan ekonomi apabila para investor pesimistis dengan ketidakpastian status politik Papua.

Kehadiran Parna dengan program Papuanisasi di berbagai bidang ternyata menimbulkan ketakutan orang-orang non-Papua sehingga banyak orang Indonesia, Indo Belanda, dan Eropa berencana meninggalkan Papua. Orang Indo Belanda menafsirkan Papuanisasi sebagai kemungkinan orang Papua akan mengambil alih Papua sehingga mereka akan kehilangan kesempatan untuk tinggal di Papua. Pada pertengahan Oktober 1960 ketua perwakilan perkumpulan bisnis di Papua meminta jaminan kepada Menteri Dalam Negeri Belanda Edzo Toxopeus agar pemerintah menjamin semua orang Belanda yang masih berada di Papua selama beberapa tahun ke depan. Petisi yang mereka ajukan menyatakan bahwa kepulangan banyak perusahaan ke negeri Belanda mengancam masa depan perekonomian Papua.

Herman Wajoi menanggapi rencana kepergian kaum Indo Belanda dengan menyatakan bahwa Parna tidak bermaksud menghancurkan Papua dan penduduknya. Dia menegaskan bahwa Papuanisasi yang dimaksud Parna adalah memanfaatkan keberadaan semua orang Papua. Parna tidak bermaksud mengusir orang Belanda, Indonesia, dan kelompok lain dari Papua. Tujuan Parna adalah membangun kesadaran kebangsaan orang Papua demi persiapan masa depan. Melihat Parna gencar melakukan Papuanisasi di semua sektor kehidupan dan pernyataan-pernyataan pemimpinnya yang keras dan kritis, F. A. Bensted sebagai pejabat Pemerintah Australia di Hollandia menegaskan bahwa nasionalisme Papua orang Papua bukan hal baru. Yang terjadi itu lebih berupa sentimen

ketimbang ideologi. Banyak orang Papua yang mengatakan ingin melihat dulu perkembangan yang akan terjadi. Pernyataan Bensted mengisyaratkan bahwa tidak semua orang Papua sepaham dengan Papuanisasi yang diprogramkan Parna.

### **3. Democratische Volkspartij**

Democratische Volkspartij (DVP) dibentuk pada 24 Agustus 1960 di Hollandia oleh Arnold Runtumboy yang menjadi ketua, M. Rumanum, bekas pegawai negeri sipil yang menjadi sekretaris, Petrus Moabuay dan Zeth Bagre sebagai bendahara. Dalam perkembangannya DVP cenderung didominasi oleh kaum Indo Belanda sehingga tidak mendapat banyak dukungan dari orang Papua di Hollandia maupun Manokwari. DVP beberapa kali direorganisasi, bahkan pernah diusulkan berafiliasi dengan Parna, tetapi ditolak oleh pengurus Parna. Tidak jelas mengapa Parna menolak berafiliasi dengan DVP. Penolakan pemimpin Parna, menurut Justus M. van der Kroef, disebabkan oleh ketidakpastian sikap orang-orang Papua terhadap perkembangan politik pada masa itu. Dalam situasi itu, DVP tetap tampil dengan program-programnya; yang utama adalah sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan Pemerintah Belanda tetap dipertahankan di Papua seperti yang dijelaskan dalam kebijakan pemerintah di Papua untuk 1960/1970 dan sesuai dengan artikel 73 PBB.
- b. DVP akan terus mempromosikan upaya di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
- c. DVP akan terus menjaga perdamaian dan hak semua kelompok dan agama di Papua.
- d. DVP mendukung kebijakan Pemerintah Belanda pada Komisi Pasifik Selatan.
- e. DVP akan terus mendukung para pekerja administrasi dan pedagang sehingga gaji pegawai pemerintah dan swasta akan dinaikkan, termasuk akomodasi dan pelayanan kesehatan.
- f. DVP akan terus berjuang untuk mencapai kedaulatan dan kemakmuran sebagai bagian dari Federasi Melanesia.

Ide untuk membentuk Federasi Melanesia muncul dari Theodore Bot yang kala itu Sekretaris Negara Belanda untuk Papua. Bot meluncurkan ide ini ketika melawat ke Australia pada awal 1960. Menurut dia, persekutuan dengan Melanesia akan melibatkan Papua dan PNG, serta daerah lain yang berkaitan, yang dapat dianggap sebagai suatu

kemungkinan untuk mengatasi berbagai perbedaan pada masa depan wilayah ini. Membangun Federasi Melanesia dianggap sebagai ide yang sangat berharga, khususnya bagi kelompok Indo peranakan. Ide memasukkan Papua ke dalam Federasi Melanesia akan menyelesaikan masalah gencarnya ide Papuanisasi sehingga kelompok Indo peranakan merasa memiliki kesempatan untuk tinggal di Papua seperti halnya orang Australia di PNG. Jika Federasi Melanesia diterima, tidak ada kesempatan bagi Indonesia untuk mengambil alih Papua dan kelompok Indo peranakan akan tetap tinggal di Papua selama Belanda masih memerintah wilayah ini. Di samping itu, Belanda lebih menghargai ide itu daripada penggabungan Papua dengan Indonesia. Belanda tidak ingin kehilangan muka dengan memberikan Papua kepada Indonesia.

Di lain pihak, Parna memiliki konsep yang berbeda. Sesudah memperoleh kemerdekaan, Papua akan menjaga hubungan dengan Pemerintah Indonesia sebagai tetangga terdekat yang baik. Sikap ini membuat beberapa pemimpin Papua mencurigai peran Parna sebagai partai politik. Mereka khawatir ide Parna untuk mempertahankan hubungan dengan Indonesia akan membuat Papua makin dekat dengan Indonesia dan kedekatan ini pada gilirannya akan merusak hubungan para pemimpin Papua yang masih menginginkan Belanda di Papua.

Sebenarnya, DVP pernah didirikan oleh L. Jacadewa di Hollandia pada 21 Desember 1957 dan disebut partai anti revolusioner. Pengaktifan kembali DVP menunjukkan bahwa ini bukan hanya partainya orang Papua, melainkan juga partai etnis lain yang umumnya adalah kaum Indo peranakan. Menurut Kroeft, kehadiran DVP memperlihatkan kepentingan Indo peranakan. J. O. de Rijke, pengacara kaum Indo peranakan, berperan penting di DVP. Anggota DVP umumnya berasal dari Persekding dan kaum Indo peranakan dari organisasi politik Nieuw Guinea Verbond. Usia para pemimpin DVP dan anggota-anggotanya lebih tua dibandingkan mereka yang aktif di Parna, juga cenderung membuka diri kepada semua kelompok etnis dan tidak membatasi diri hanya pada kelompok elite Papua. Pengurus partai ini umumnya berdomisili di Hollandia dan sekitarnya. DVP lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi, sementara Parna pada politik.

Pendirian DVP di Hollandia rupanya tidak memuaskan tokoh Papua seperti Johan Ariks di Manokwari. Seperti sudah disinggung di atas, peran kaum Indo peranakan di partai ini lebih besar ketimbang orang Papua. Tidak mengherankan jika orang Papua di Manokwari mengkritik program DVP yang hanya tampak di atas kertas dan menolak ide persamaan kesempatan untuk semua penduduk Papua. Johan Ariks dan Manupapami berpendapat kesamaan kesempatan hanya menguntungkan kalangan non-Papua. Mereka berasumsi apabila Belanda tetap memerintah Papua, orang Eropa termasuk kaum Indo peranakan akan lebih berpengaruh ketimbang orang Papua. Tidak mudah mengenali sikap dan pandangan penduduk asli Papua terhadap orang non-Papua, khususnya kaum Indo peranakan. Seperti kita ketahui, Manokwari dan Hollandia adalah pusat domisili golongan Indo peranakan di Papua. Walau keadaan mereka di Manokwari jauh dari yang harapan, beberapa orang dapat mendirikan perusahaan yang kemudian berguna untuk memenuhi kebutuhan penduduk lokal. Beberapa kepala suku di Manokwari, yaitu Lodewijk Mandatjan, Barend, dan Iroge, memiliki kesan positif atas keberadaan kaum Indo peranakan di Manokwari.

Melihat perkembangan yang terjadi, muncul ide dari beberapa tokoh Papua di Manokwari untuk mendirikan partai. Tujuannya tidak hanya menyatukan seluruh penduduk Papua dari pantai hingga pedalaman, tetapi juga untuk menangkal pengaruh Parna atas orang-orang terkemuka Papua. Nyatanya memang tidak mudah menaklukkan perbedaan yang tajam antara suku Arfak di pedalaman dan orang Papua yang hidup di kota dan pantai. Penduduk Manokwari belum memahami bahwa mereka adalah bagian dari orang Papua meski cenderung masih menganggap diri mereka sebagai bagian dari suku mereka. Perbedaan yang krusial ini menghambat gagasan membangun persatuan di Manokwari. Karena Johan Ariks dianggap sebagai figur yang dapat menyatukan masyarakat di Manokwari, diadakanlah pertemuan para tokoh pantai Papua, yaitu Johan Ariks dan Lodewijk Mandatjan sebagai tokoh masyarakat suku Arfak, dan Gosewisch sebagai pemimpin kaum Indo peranakan. Pertemuan itu gagal mendirikan partai politik yang dapat merangkul berbagai kelompok masyarakat di Manokwari.

#### **4. Eenheidspartij Nieuw Guinea**

Pada 20 September 1960, Gosewisch mendirikan Eenheidspartij Nieuw Guinea (Epang) atau Partai Persatuan Nieuw Guinea. Diketuai oleh Lodewijk Mandatjan dan Gosewisch sebagai wakilnya, partai ini mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat Arfak. Program-programnya adalah sebagai berikut :

- a. Mempertahankan kerja sama bidang sosial, ekonomi, dan politik.
- b. Memelihara hubungan dengan Pemerintah Belanda.
- c. Mempromosikan bahasa Belanda.
- d. Kemerdekaan bagi Papua dalam 15 tahun mendatang.
- e. Pasifikasi dengan penduduk di pedalaman.
- f. Membangun hubungan baik dengan Australia.
- g. Menentang komunisme dan diskriminasi rasial.

Kehadiran Epang di Manokwari memperlihatkan kesamaan dengan DVP di Hollandia, yakni adanya dominasi kaum Indo peranakan. Seperti dikatakan Van der Kroef, Epang dan DVP tidak bisa tampil sebagai partai yang mewakili kesatuan murni orang Papua. Begitu pula yang ditegaskan H. Bensted: Hollandia dan Manokwari merupakan pusat masyarakat Indo peranakan dan Belanda di Papua sehingga kedua partai politik itu mewakili kelompok Indo peranakan dalam politik. Mayoritas anggota badan pengurusnya didominasi oleh kaum Indo peranakan dan Tionghoa. Partai ini sangat mendukung Belanda.

Diungkapkan H. Bensted, Epang adalah satu-satunya partai kala itu yang melibatkan orang Belanda dan Indo peranakan dalam badan pengurusnya. Barangkali karena itu partai ini berpeluang besar untuk berhasil, juga karena Lodewjik dan Barend Mandatjan sebagai pengurus cukup berpengaruh terhadap suku Hattam di pedalaman Manokwari. Komunikasi dengan suku-suku pedalaman dinilai penting sebab dukungan mereka vital agar kaum Indo peranakan dapat tinggal di Papua. Selain itu, komunikasi yang baik dapat mencegah konflik antara Indo peranakan dan orang Papua. Keberhasilan Gosewisch membina hubungan dengan suku Arfak ternyata justru menciptakan jarak antara warga pesisir dan orang pedalaman. Timbul ketakutan pada masyarakat pantai bahwa penduduk pedalaman akan memperoleh dukungan dari orang Eropa. Penduduk

peisir menganggap suku Arfak pasif dalam politik. Pada 2 dan 3 Oktober 1960, Epang menyelenggarakan pertemuan untuk menyampaikan program mereka, terutama menginformasikan rencana pemilihan Dewan Nieuw Guinea kepada warga pedalaman.

## **5. Partai Orang Nieuw Guinea**

Dengan berdirinya Epang, orang Papua yang ber-pendidikan di Manokwari berpikir untuk mendirikan partai politik mereka sendiri. Akhirnya, pada 23 September 1960 didirikan Partai Orang Nieuw Guinea (PONG) yang diketuai oleh Johan Ariks. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Johan Ariks adalah guru yang aktif berpolitik sejak 1949. Dia tidak hanya loyal kepada Pemerintah Belanda, tetapi juga bersikap tegas menolak integrasi Papua dengan Indonesia. Sebelum KMB, dia pernah ke Jakarta untuk menarik perhatian dunia dengan menemui beberapa pejabat Belanda dan Australia.

Program kerja PONG adalah sebagai berikut:

- a. Kemerdekaan bagi Papua dan bekerja sama dengan Pemerintah Belanda dalam satu undang-undang.
- b. Mempromosikan bahasa Belanda sebagai wilayah Belanda dan bahasa Inggris untuk kepentingan internasional.
- c. Menolak aktivitas revolusi.
- d. Menciptakan jaminan bagi warga asing yang mempunyai kepentingan di Papua.
- e. Mempromosikan bidang ekonomi, termasuk pertanian, dan perdagangan khususnya dalam kaitan dengan kerja sama.

Tidak seperti Epang, PONG didominasi oleh orang Papua pesisir dan berusaha mencari dukungan dari masyarakat biasa yang hidup di daerah pantai. Pada 3 Oktober 1960 Johan Ariks sebagai ketua melakukan pertemuan yang dihadiri oleh 400 orang. Dia membuka pertemuan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Belanda, *Wilhelmus*, dan lagu kebangsaan Papua, *Hai Tanahku Papua*. Pada kesempatan itu Johan Ariks dan wakilnya, O. Manupapami, menyampaikan program partai. Hadirin mengajukan pertanyaan tentang masa depan Papua. Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan politik di Manokwari telah cukup matang. Menurut Kroeft, kehadiran PONG dan Epang

mengindikasikan adanya permusuhan antar suku dan kedua partai membawa fenomena itu ke ranah politik. Pada saat yang sama, PONG bertujuan menyatukan masyarakat Papua di Manokwari upaya yang gagal karena tidak ada dukungan dari kelompok muda.

## **6. Partai Serikat Pemoeda Pemoedi Papoea**

Kaum muda yang dipimpin John Warner mendirikan Partai Serikat Pemoeda Pemoedi Papoea (Parsep) pada 20 Oktober 1960 di Manokwari. John Warner berasal dari Biak, pernah menjadi kepala penjara di Manokwari, dan ketua Persekding cabang Manokwari. Dia menolak kepemimpinan Johan Ariks yang dianggap sebagai figur yang mewakili kelompok tua. Johan Ariks, sebagai tokoh Papua yang pernah ke negeri Belanda, kurang mendapat dukungan dari warga Manokwari. Parsep secara eksklusif adalah partai orang Papua, tetapi tidak membatasi diri pada suku tertentu. Anggota Parsep umumnya orang Biak, Sorong, dan Serui yang tinggal di Manokwari. Pengaruh Parsep, menurut kajian TNI Angkatan Darat, ditengarai menjangkau Biak, Serui, Hollandia, dan Fakfak. Programnya pun tidak jauh berbeda dengan Epang dan PONG, yaitu:

- a. Menentang diskriminasi rasial, komunisme, dan pengambilalihan oleh Indonesia atas daerah Irian Barat.
- b. Kemerdekaan untuk Nieuw Guinea dan kesatuan dengan Belanda di bawah pengawasan PBB.
- c. Menjamin pengusaha asing yang memberikan sumbangan untuk kemajuan Nieuw Guinea.
- d. Mengembangkan bahasa Inggris untuk menjadi bahasa pengantar.

Dalam upaya mendapatkan dukungan, Parsep berusaha menghilangkan tendensi kelompok atau suku tertentu di dalam partai. Karena itu, Parsep hendak berperan penting tidak hanya dalam hal menghindari persaingan di antara sesama orang Papua, tetapi juga membatasi pengaruh orang Eropa dalam hal-hal tertentu, khususnya dalam pemilihan anggota Dewan Nieuw Guinea. Program yang diperjuangkan Parsep, antara lain, keanggotaan hanya untuk orang Papua dan pemerintahan harus dipegang oleh orang Papua.

## **7. Partai Kena U Embay**

Pada 20 November 1960 didirikan partai politik dengan nama Kena U Embay oleh Esau Itaar di Doyo Lama, Sentani, Hollandia. Sebagai wakil ketua adalah Agus Kereuta, dan bendahara Willem Assaway. Seperti halnya partai yang didirikan sesudah Parna, Kena U Embay terbuka bagi semua warga Papua yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan di Papua. Partai ini menekankan persatuan penduduk Papua tanpa melihat kebangsaan, daerah, dan status. Partai ini juga khawatir terhadap dampak kampanye yang dilakukan oleh Parna. Menurut pemimpin Kena U Embay, Parna adalah partai yang hanya mencari ke-populeran dan jabatan di pemerintahan. Anggota Kena U Embay menganggap Frits Kiriho sebagai "Hitlernya Papua".

Untuk menghindari dominasi orang Serui, para anggota Kena U Embay melakukan kampanye dengan program sebagai berikut:

- a. Didasarkan pada kebenaran dan keadilan.
- b. Selalu menjaga perdamaian dan menolak kekerasan.
- c. Menentang diskriminasi rasial.
- d. Berjuang untuk mendapatkan hak menentukan nasib sendiri, tetapi belum menentukan waktunya.
- e. Memberikan berbagai kemudahan bagi yang hendak tinggal di Papua dan mengakui hak dan tugas yang sama sebagaimana halnya orang Papua.
- f. Cenderung mengganti nama Papua dan Irian dengan New Guinea. Bahasa Belanda tetap digunakan dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua.
- g. Melakukan percepatan pembangunan kaum muda Papua.
- h. Mempromosikan dan menstimulasi perusahaan pribadi di semua bidang ;menginginkan masuknya perusahaan asing, tetapi bukan yang berasal dari negara komunis.

## **8. Partai Sama-Sama Manusia**

Pada 5 November 1960 di Sorong didirikan partai politik Sama-sama Manusia (SSM). Ketuanya adalah Husein Warwey, dibantu oleh Luis Rumaropen asal Biak, M. Ongge asal Sentani, dan Z. Abaa. Tidak seperti partai lain yang berkonsentrasi pada

urusan politik, SSM lebih fokus pada urusan ekonomi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan lokal, seperti mempersoalkan persamaan hak dalam pekerjaan. Kala itu pegawai Belanda di Papua cenderung menikmati keistimewaan daripada pegawai lokal Papua; tidak hanya di Sorong, tetapi di seluruh Papua. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi pada orang Papua, tetapi juga pada orang Indonesia. SSM juga memperjuangkan kesejahteraan hidup rakyat, khususnya guna memenuhi kebutuhan akan beras dan gula yang sulit didapatkan di toko-toko kala itu.

Sebagaimana partai orang Papua pada umumnya, SSM pun mendeklarasikan: "Penduduk Papua tidak mempunyai kaitan apa pun dengan Indonesia dan penduduk Papua berharap untuk tetap berada di bawah kekuasaan Belanda hingga memperoleh kemerdekaan".

## **9. Partai Persatuan Christen Islam Raja Ampat**

Partai politik Persatuan Christen Islam Raja Ampat (Perchisra) didirikan di Sorong pada 2 Desember 1960. Ketuanya adalah Moh. Nur Majalibit, dibantu Abdullah Arfan, seorang tokoh Papua yang pernah ke Belanda pada 1950 untuk meminta ketegasan Pemerintah Belanda tentang masa depan Papua. Partai ini pun loyal kepada Belanda dan memperjuangkan kemakmuran untuk masyarakat di sekitar Kepulauan Raja Ampat. Salah satu hal yang penting dari Perchisra adalah partai ini dibentuk atas dasar dua agama. Kepulauan Raja Ampat dikenal sebagai pusat Islam di Papua pada masa itu, bahkan sebelum kedatangan orang Eropa. Masyarakatnya mengidentifikasi diri sebagai orang Papua secara keseluruhan dan tidak didasarkan pada agama. Kehadiran Perchisra, paling tidak, mencerminkan keinginan masyarakat wilayah itu untuk hidup bersama sebagai satu keluarga besar Papua.

Pada 30 Juni 1961 Majalibit dan para pemuka Raja Ampat mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB yang menyatakan bahwa rakyat Papua di Raja Ampat bukanlah bagian dari Indonesia. Karena itu, mereka memohon kepada Belanda untuk membantu mereka meraih kemerdekaan. Munculnya partai-partai politik pada masa ini memperlihatkan bahwa orang muda Papua di perkotaan, baik di pantai utara maupun barat Papua, mulai berpikir tentang masa depan daerahnya. Masyarakat pantai utara dan barat

sudah bersentuhan dengan dunia luar sebelum 1855, kemudian menjadi pusat penyebaran agama Kristen dan Pusat Pendidikan. Sementara itu, daerah selatan dan pedalaman sangat lamban pertumbuhannya karena baru melakukan kontak dengan dunia luar setelah secara administrasi dibuka di Merauke pada 1905 dan di pedalaman 1936. Dengan demikian, peran serta masyarakatnya di bidang politik pun minim.

## **B. PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN MASYARAKAT PAPUA (DEWAN NIEUW GUINEA)**

Pembentukan Dewan Nieuw Guinea ini dilakukan dibawah tekanan negara asing yang begitu besar, terutama Belanda dan Indonesia. Rencana ini sudah diutarakan sejak tahun 1950 yang dimulai dengan pengumuman oleh Pihak Belanda yang menetapkan bahwa komposisi anggota Dewan Nieuw Guinea akan berjumlah 21 orang, yang terdiri dari 10 orang Papua, 9 Belanda, dan 2 non-Belanda. Yang berhak memilih adalah semua orang yang ada di Papua, yang berkewarganegaraan Belanda, dan mereka yang sudah tiga tahun menetap di Papua dan yang berusia 21 tahun. Persyaratan ini tidak memperhitungkan faktor pendidikan dan tingkat penghasilan (Drooglever, 2010).

Karena berbagai hambatan, khususnya faktor pendidikan orang Papua yang masih sangat terbatas, sejak 1950 diadakan berbagai upaya untuk memajukan orang Papua agar mampu menyelenggarakan proses pemilihan. Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Papua, pemilihan dilangsungkan dengan dua cara, yakni pemilihan langsung dan bertangga. Wilayah Papua dibagi menjadi distrik-distrik pemilihan. Dari distrik-distrik itu akan dipilih satu atau dua anggota. Yang dimaksud dengan pemilihan langsung adalah pemilih langsung memilih anggotanya untuk Dewan Nieuw Guinea. Adapun cara pemilihan bertingkat atau bertangga adalah pemilih memilih dulu wali pemilih, baru kemudian wali pemilih akan memilih anggota Dewan Nieuw Guinea. Untuk Biak, pemilihan bertangga sudah dilakukan pada Agustus 1959. Di sana, rakyat membawa surat suara dengan sistem pemilihan berbisik. Sistem ini dilakukan agar semua orang, termasuk yang buta huruf, dapat memilih wakil mereka. Sistem berbisik pernah diterapkan di sejumlah tempat di Afrika (Meteray, 2012).

Dalam laporan Belanda kepada PBB pada 1960 dijelaskan bahwa pada 1960 sampai awal 1961 perhatian secara khusus akan diberikan untuk sosialisasi pemilihan anggota Dewan Nieuw Guinea. Penyebaran informasi dilakukan melalui radio, film dan *slide*, juga surat kabar (*Report On Netherlands New Guinea For The Year 1960*). Surat kabar yang terbit di Papua pada waktu itu menggunakan dua bahasa, yaitu Belanda dan Melayu. Sampai 1960 terdapat 10 media massa yang beredar di Papua. Melalui media massa, pemerintah menginformasikan bahwa pada pertengahan Juni sudah menyampaikan usulan kepada parlemen Belanda tentang undang-undang pembentukan dewan perwakilan rakyat yang disebut Dewan Nieuw Guinea (Schoorl, 2001).

Tabel 2: Surat Kabar dan Majalah di Papua pada 1966

No.	Nama	Frekuensi	Oplah	Bahasa
1.	Nieuw Guinea Koerier	Harian	1. 500	Belanda
2.	De Tifa	Mingguan	1. 000	Belanda
3.	Pengantara	Mingguan	/ 000	Melayu
4.	Triton	Mingguan	1. 500	Belanda/Melayu
5.	De Lens	Mingguan	200	Belanda
6.	Fakfak Bode	Dua kali sebulan	200	Belanda/Melayu
7.	Opwaarts (CWNG)	Mingguan	3. 500	Belanda/Melayu
8.	Arka	Bulanan	1. 400	Belanda
9.	Madjallah Kita (Arka)	Bulanan	700	Belanda/Melayu
10.	Medelingen van de Dienst van Gezondheidszorg	Empat bulanan	150	Belanda/Inggris

Surat kabar berbahasa Melayu dan Belanda yang sudah ada di Papua sejak 1955 ialah *Pengantara* dan *Triton* yang diterbitkan di Hollandia oleh Departemen Informasi, *Sorong Pos* di Sorong, *Fakfak Bode* di Fakfak, dan *De Lens* di Manokwari. Ada juga surat kabar yang berbentuk stensilan dalam bahasa Melayu, seperti *Pada Mara* yang diterbitkan di Kepulauan Schouten dan majalah *Mertju Suar* di Sentani. Melalui media massa tersebut, masyarakat mendapatkan informasi tentang kejadian di Papua maupun di luar negeri serta berbagai informasi tentang ilmu pengetahuan, kesehatan, pertanian, dan perikanan. Ada pula siaran radio Ronk di Biak, yang menggunakan bahasa Belanda dan Melayu, disiarkan ke seluruh Papua. Radio ini memiliki program siaran agama Kristen dan Islam. Ada pula radio lokal di Hollandia, Biak, Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Merauke yang melakukan siaran hanya dua setengah jam sehari.

Pemilihan Dewan Nieuw Guinea dapat berlangsung. Pemilihan langsung dilakukan di Hollandia dan Manokwari, sementara wilayah lain dilakukan dengan cara pemilihan tidak langsung lewat tulisan atau membisikkan nama calon Dewan Nieuw Guinea. "Pemilihan pertama dilaksanakan di Hollandia pada 11 Januari dan berakhir pada 17 Januari. Pemilihan ini merupakan pengalaman pertama bagi rakyat Papua. Dari 14 subdaerah pemilihan dengan penduduk sekitar 260. 000 (total penduduk diperkirakan 700. 000) dan 440. 00 orang langsung di bawah wilayah administrasi pemerintahan. Di Hollandia, dari 123 pemilih tercatat 117 orang Papua dan 6 orang Belanda. Pada umumnya mereka adalah pastor, guru, warga biasa, polisi, dan pegawai pertanian. Sementara itu, dari semua calon anggota Dewan terdapat satu perempuan, yaitu Herina Pepuho dari Asei besar, kepala keuangan di kantor pemerintah Hollandia (Meteray, 2012). Kelemahan dalam sistem pemilihan tersebut adalah, warga minoritas tidak mempunyai wakil. Di Papua, perbedaan tingkat pendidikan di dalam masyarakat sangat besar, penduduknya juga terbagi dalam berbagai kelompok etnis dengan rasa kesukuan yang sangat kuat, dan pengalaman berpolitik masih minim. Karena itu, sistem pemilihan dibuat sesederhana mungkin.

Pada 5 April 1961 Dewan Nieuw Guinea akhirnya dilantik di Hollandia dengan 28 anggota: 16 berdasarkan pemilihan, sedangkan 12 ditunjuk oleh gubernur, dengan komposisi 22 anggota adalah orang Papua, 1 orang Kei, dan 5 orang Belanda termasuk Indo Belanda. Sebagai Ketua Dewan adalah J. H. F. Sollewijn Gelpke dengan anggota yang dipilih: Nicolaas Jouwe (Hollandia), J. O. de Rijke (Hollandia Kota). M. Suway (Nimboran), Marcus Kaisiepo (Kepulauan Schouten), B. Mofu (Kepulauan Schouten), M. B. Ramandey (Yapen Waropen), E. J. Bonay (Yapen Waropen), H. F. W. Gosewich (Manokwari), Penehas Torey (Ransiki), Abdullah Arf'an (Raja Ampat), A. R. van Zeeland (Sorong), A. S. Onin (Teminabuan), D. Deda (Ajamaru), N. Tanggahma (Fakfak), Mohamad Achmad (Kaimana), dan A. K. Gebze (Merauke).

Para anggota yang ditunjuk adalah F. K. T. Poana (Mimika), T. Mezeth (Sarmi), V. P. C. Maturbongs (Mapi), C. Kiriwaib (Muju), A. Samkakai (Kepulauan Frederik ), D. Walab (Asmat/pantai Kasuari), B. Burwos (Manokwari/Steenkool), Dr. F. Chr. Kamma (Kerom), K. Gobai (Paniai), Dr. L. Jvd Berg (Tigi), H. Wonsiwor, dan seorang

perempuan, D. Tokoro Hanasbey.

Pembentukan Dewan Nieuw Guinea memperlihatkan bahwa fungsinya sangat penting. Para wakil dari sejumlah daerah dikumpulkan dalam satu badan sehingga mereka dapat membahas berbagai masalah menyangkut kepentingan umum. Dengan sendirinya para anggota Dewan merasa bahwa mereka adalah satu bangsa. Berbagai masalah yang dibahas para anggota Dewan dirasakan sebagai bagian dari masalah bersama yang menjadi tanggung jawab bersama. Mereka juga belajar bekerja sama memecahkan persoalan yang berkaitan dengan masa depan politik, ekonomi, sosial, dan budaya Papua. Ini merupakan kesempatan bagi masyarakat Papua menyiapkan diri untuk menerima hak menentukan nasib sendiri (Drooglever, 2010).

Masa kerja anggota Dewan empat tahun, kecuali pada tahap pertama, tiga tahun. Penunjukan Ketua Dewan dilakukan oleh Ratu Belanda. Masa kerja Ketua Dewan satu tahun. Wewenang Dewan Nieuw Guinea adalah mengajukan hak petisi atau permohonan, hak interpelasi atau meminta keterangan, dan hak menyampaikan nasihat dalam hal undang-undang dan peraturan pemerintah. Mengenai hak menentukan nasib sendiri, dalam upacara pelantikan anggota Dewan Nieuw Guinea, Dewan diminta mengajukan pandangan tentang hak menentukan nasib sendiri tidak lebih dari satu tahun sejak dilantik. Diharapkan mereka dapat membentuk pandangan yang relevan mengenai waktu yang tepat bagi pelaksanaan hak tersebut tanpa mempertimbangkan masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan cara ini mereka dapat mempercepat pembangunan politik warga Papua.

Pada April 1961 Ratu Juliana mengeluarkan pernyataan yang memberi motivasi kepada Dewan Nieuw Guinea untuk melakukan kunjungan ke Belanda. Kunjungan pertama anggota Dewan Nieuw Guinea dipimpin oleh Marcus Kaisiepo, berangkat pada 22 Agustus 1961. Mereka berada di Belanda selama empat minggu. Para anggotanya yang ikut adalah 8 orang Papua dan 2 Belanda. Kelompok ini menghadiri pembukaan sidang parlemen Belanda pada 19 September 1961. Kunjungan kelompok kedua dipimpin oleh Sollewijn-Gelpke. Delegasi dari Papua berdiskusi dengan pemerintah dan anggota parlemen Belanda perihal perkembangan daerah Papua menyangkut persiapan

pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri, juga untuk meyakinkan pemerintah Belanda tentang keinginan mereka mendapatkan otonomi dan memiliki pemerintahan sendiri.

Pada 19 Oktober 1961 beberapa anggota Dewan Nieuw Guinea mengadakan pertemuan yang hanya dihadiri oleh anggota Dewan Nieuw Guinea, wakil partai politik, wakil agama, dan wakil daerah yang berjumlah 40 orang dari Hollandia dan daerah lain. Tidak ada orang Belanda dan wartawan. Topik utama yang dibahas adalah usulan Dewan kepada Ratu Belanda untuk membahas proposal Menteri Luar Negeri Luns agar diadakan pertemuan internasional di bawah pengawasan PBB tentang status Papua. Dalam pertemuan di kantor Dewan Nieuw Guinea yang dihadiri 77 orang itu dibentuk Komite Nasional dengan ketua Willem Inuri, Wakil Ketua Nicolaas Jouwe, Pertemuan ini memutuskan pengajuan petisi yang pada 1 November 1960 akan memilih bendera, lambang, dan lagu nasional.

Belakangan, aksi Komite Nasional ditentang oleh beberapa anggota Dewan Nieuw Guinea yang tidak menghadiri berbagai pertemuan, yaitu A. K. Gebze asal Merauke, M. Achmad asal Kaimana, B. Burwos asal Manokwari, dan Torey asal Ransiki. Reaksi beberapa anggota Dewan dari barat dan selatan Papua memperlihatkan bahwa pendirian Komite Nasional dilakukan tanpa dikonsultasikan dengan beberapa anggota yang lain. Dalam hal ini, pengaruh dari figur-figur seperti Nicolaas Jouwe dan Marcus Kaisiepo sebagai pemimpin terkemuka Papua tidak dapat diabaikan. Marcus Kaisiepo dan Nicolaas Jouwe serta beberapa anggota Dewan telah melakukan kunjungan ke Belanda untuk membahas masa depan Papua. Perjalanan tersebut tentu berkaitan dengan rencana pembentukan Komite Nasional pada 19 Oktober. Karena itu, keputusan mereka untuk membentuk Komite Nasional berkaitan dengan pengambilan keputusan yang cepat sejalan dengan perkembangan politik kala itu. Hanya saja dalam hal lain keputusan yang menyangkut masa depan wilayah ini seakan-akan mengabaikan keberadaan anggota Dewan dari daerah-daerah yang belum berkembang seperti bagian selatan. Keadaan ini yang sulit diatasi untuk menyatukan semua orang Papua yang majemuk dalam waktu singkat.

Pada 30 Oktober 1961 Dewan Nieuw Guinea mengadakan sidang istimewa untuk membahas manifesto politik. Marcus Kaisiepo menyatakan bahwa sejak April 1944

sebetulnya orang Papua sudah ada di tangan pemerintah sah, yaitu Pemerintah Belanda. Jadi, menurut dia, Proklamasi 17 Agustus 1945 terjadi sesudah Papua di bawah Pemerintah Belanda. Dia mengajak anggota Dewan memperjuangkan hak sebagai orang Papua agar hak orang Papua tidak hilang.

A. K. Gebze menyatakan bahwa rakyat telah mendengar perihal manifesto itu lewat radio. Rakyat tampak senang, tetapi akan kecewa selama belum adanya kesadaran yang kuat mengenai situasi apabila ada ancaman dari luar negeri. Gebze juga menyatakan kekecewaannya terhadap pembentukan Komite Nasional yang tidak diketahui rakyat di daerah selatan sehingga yang namanya Papua Barat hanya bagian barat, utara, dan Pegunungan Bintang. Gebze mengharapkan manifesto tidak lekas diumumkan karena ribuan warga belum memahami ketatanegaraan. Pada prinsipnya dia menyatakan setuju dengan isi manifesto, tetapi dalam pandangannya Papua belum saatnya merdeka. Diperlukan persiapan matang.

Pada 31 Oktober 1961, delegasi dari Dewan Nieuw Guinea yang dipimpin Marcus Kaisiepo menyerahkan manifesto politik dari Komite Nasional kepada Gubernur Plateel. Bersamaan dengan itu, Marcus Kaisiepo juga menyodorkan resolusi dari 10 anggota kepada Gubernur yang menyatakan, New Guinea diberi nama Papua Barat, penduduk Nieuw Guinea Barat diberi nama rakyat Papua Barat, bendera yang dipilih oleh komite harus diakui sebagai bendera negara, dan lagu kebangsaan yang ditentukan komite diakui sebagai lagu kebangsaan negara, yakni *Hai Tanahku Papua* (Griapon, 2007).

Dalam sidang lain terjadi perdebatan di antara para anggota tentang rencana Menteri Luar Negeri Luns. Para anggota Dewan berharap PBB dapat mengunjungi Papua sehingga mempermudah mereka menyampaikan aspirasi. Orang Papua berharap PBB dapat campur tangan sehingga hak menentukan nasib sendiri dapat dilaksanakan. Sementara itu, pada 26 November 1961, 10 anggota Dewan berangkat ke Negeri Belanda. Rombongan yang dipimpin Sollewijn Gelpke ini terdiri dari 6 orang Papua, termasuk Tokoro Hanasbey, anggota wanita asal Sentani, dan 3 orang Belanda.

Pada 1 Desember 1961 berlangsung perayaan di depan gedung Dewan Nieuw Guinea. Nama Nieuw Guinea diubah menjadi Papua Barat dan bendera Papua untuk pertama kali dikibarkan di samping bendera Belanda, juga dinyanyikan lagu kebangsaan

Papua. Hal yang sama berlangsung di pusat pemerintahan dengan tertib dan aman. Hari itu dinyatakan sebagai hari libur. Perayaan 1 Desember 1961 itu disetujui oleh semua anggota Komite Nasional. Mereka berharap pengibaran bendera itu akan menimbulkan kesan mendalam dan membakar semangat persatuan orang Papua.

Peristiwa pengibaran bendera pada 1 Desember 1961 yang dilaksanakan di semua *afdeling* di Papua juga diselenggarakan di Wamena dan Raja Ampat. Carel Schneider, kontrolir *binnenland bestuur* yang bertugas di Wamena sejak 1960, menjelaskan (Drooglever, 2010):

"Pada 1 Desember 1961, ketika anggota Dewan ber-kumpul di Hollandia dalam upacara peresmian di depan kantor pemerintah di Wamena, kami untuk pertama kalinya menaikkan 'bendera negara' yang dibuat tergesa-gesa oleh pemerintah di samping bendera Belanda dengan dikelilingi oleh orang Papua dan kulit putih. Pidato-pidato oleh *bestuursassistent* dan saya atas instruksi Hollandia harus 'bernada positif. Kedua bendera yang berdampingan itu melambangkan kenyataan bahwa mulai sekarang tidak hanya Belanda, tetapi juga putra-putra daerah sendiri harus mulai bekerja untuk masa depan mereka, demikian kira-kira amanat kami. Segera setelah itu di Wamena dan daerah sekitarnya dimulailah dengan pertandingan sepak bola dan voli yang sudah sangat dinantikan oleh para pengunjung".

Sehari setelah 1 Desember 1961, Peters, kepala distrik di Hollandia, menyatakan bahwa pengibaran bendera Papua merupakan pengakuan bagi orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Pengakuan hak mereka tidak dapat diganggu gugat. Orang Papua dalam segala hal bebas memilih bentuk politik negerinya. Peristiwa 1 Desember 1961 disebarluaskan media massa untuk menunjukkan keberadaan bangsa Papua. Menurut Drooglever, peristiwa itu "penyegar semangat, yang telah memberikan kepada mereka kesadaran baru tentang harga diri".

Berdasarkan laporan wakil Pemerintah Australia yang berkedudukan di Hollandia, bendera Papua dikibarkan hanya di tempat-tempat umum, tidak dikibarkan di gedung pemerintah. Laporan ini dapat memberikan gambaran bahwa pengibaran bendera Papua bukan jaminan orang Papua diberi hak memerintah oleh Belanda. Apabila mengacu

kepada perdebatan di Dewan Nieuw Guinea tentang isi manifesto 30 Oktober 1961 dan peristiwa pengumumannya pada 1 Desember 1961, dapat disimpulkan bahwa itu bukan peristiwa kemerdekaan bangsa Papua, melainkan tindakan tegas para elite Papua di Dewan Nieuw Guinea untuk menunjukkan kepada publik bahwa Papua adalah bangsa yang dapat menentukan nasib sendiri. Sebagai suatu bangsa, mereka melakukan berbagai persiapan untuk membentuk negara-bangsa melalui pengumuman manifesto tersebut.

Belanda tidak berhasil mempertahankan Papua setelah rencana Luns gagal terlaksana pada Desember 1961. Di lain pihak, Indonesia terus mengupayakan pendekatan terhadap negara-negara Barat dengan menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia sembari memperkuat militer untuk membebaskan Papua dari Belanda. Pada Desember 1961, Tri Komando Rakyat (Trikor) dibentuk untuk menggagalkan pembentukan apa yang dia sebut negara boneka Papua, mengibarkan Merah Putih di seluruh tanah Papua, dan menyiapkan mobilisasi umum. Akibat tekanan militer Indonesia, pada 2 Januari 1962 kabinet Belanda memutuskan mengubah kebijakan mereka dengan membatalkan rencana memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada Papua dan bersedia melakukan negosiasi dengan Pemerintah Indonesia. Sedangkan Indonesia mau bernegosiasi hanya jika Belanda mau menyerahkan Papua (Drooglever, 2010).

Reaksi terhadap ketidakpastian masa depan Papua tidak hanya datang dari Dewan Nieuw Guinea dan para politikus, tetapi juga dari masyarakat Papua. Dalam pertemuan khusus Dewan Nieuw Guinea pada 22 Januari 1962 mengeluarkan dua resolusi berupa permohonan kepada Pemerintah Belanda, yakni agar dikirim komisi untuk menyelidiki keinginan rakyat Papua, dan memberikan pelatihan militer kepada sukarelawan untuk menyiapkan pertahanan Papua (Drooglever, 2010).

Sementara itu, para politikus Papua mengekspresikan sikap mereka tentang masa depan Papua. Pada Januari 1962, sepucuk surat dari Ketua DVP kepada Presiden Soekarno menyatakan penolakan administrasi pemerintahan Indonesia di Papua dan meminta Belanda terus melanjutkan tugasnya di Papua hingga pemerintahan diserahkan kepada orang Papua. Pada Maret, sebuah telegram kepada Belanda ditandatangani oleh tokoh-tokoh penting Papua, Dewan Nieuw Guinea, Partai Papua Merdeka (PPM), DVP,

dan Kena U Embay. Telegram ini ingin menekan Pemerintah Belanda tentang pertengkaran Belanda-Indonesia menyangkut masa depan Papua. Mereka menegaskan bahwa Belanda dan Indonesia tidak punya hak menentukan masa depan Papua tanpa partisipasi dan konsultasi dengan orang Papua.

Pada 16 April 1962, sebanyak 30 tokoh terkemuka Papua dari PPM, DVP, dan Kena U Embay mengirim sebuah telegram kepada Sekretaris jenderal PBB yang isinya memprotes klaim Indonesia atas Papua. Sejak Januari bermunculan demonstrasi di Merauke, Fakfak, dan Manokwari, menolak klaim Indonesia dan menuntut hak menentukan nasib sendiri. Para demonstran berbaris ke pusat kota membawa bendera Papua dan bendera Belanda, serta bendera yang bertulisan kata-kata anti-Indonesia. Mereka menyatakan Soekarno tidak berhak mengklaim Papua Barat dan bahwa Papua Barat milik orang Papua (Drooglever, 2010).

Frits Kiriho dari Parna mempunyai pandangan yang berbeda dengan sebagian besar anggota Dewan Nieuw Guinea. Menurut Frits Kiriho, berafiliasi dengan Pemerintah Indonesia merupakan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan Papua mengingat setiap provinsi di Indonesia memiliki kesempatan untuk memerintah sendiri. Dia beranggapan Papua akan memperoleh status sendiri apabila diserahkan kepada Indonesia. Frits Kiriho menegaskan bahwa realisasi hak menentukan nasib sendiri tidak mungkin tanpa Pemerintah Indonesia. Ekspresi yang sama ditunjukkan Bonay, anggota Dewan Nieuw Guinea dari Yapen, yang juga anggota Parna (Leirissa, 2009). Seperti sudah dijelaskan di atas, Parna berpandangan bahwa masalah Papua dapat diselesaikan melalui konferensi tiga pihak, yaitu Belanda, Papua, dan Indonesia. Ketika Herman Wajoi ke Belanda sebagai Ketua Parna dan berbicara di depan pers Belanda, Bonay memperlihatkan pandangannya bahwa musuh Papua bukan Indonesia, melainkan Belanda. Sebagai suatu negara, katanya, Papua harus bersahabat dengan semua penduduk di bumi.

### **C. PERDEBATAN TENTANG KEMERDEKAAN DAN NASIONALISME PAPUA**

Pembentukan partai politik dan Dewan Nieuw Guinea di Papua pada masa sebelum integrasi memang jika dilihat pada konteks saat itu merupakan trik Belanda dalam

usahanya mempertahankan kekuasaannya di Papua. Sebagai sebuah negara imperialis yang telah melakukan praktek kolonialisme selama lebih dari 3 abad di Nusantara tentu masih terdapat niat dan keinginan Belanda untuk terus menjajah. Sehingga praktek negara, organisasi, atau penciptaan kekuatan boneka oleh Belanda masih dilakukan di Papua, artinya Belanda masih menancapkan pengaruhnya dengan memanfaatkan kekuatan pribumi, orang pribumi Papua. Namun seiring dengan itu rasa Nasionalisme Papua mulai tumbuh di tanah Papua yang sebelumnya tercerai berai dalam suku dan bahasa, serta tradisi yang berbeda. Menyadari hal tersebut, Belanda mengklaimnya sebagai bentuk tanggungjawab moral Belanda bagi orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Parna sebagai partai politik di tahun 1960-1962 sangat keras menuntut agar orang Papua ada di dalam sistem birokrasi pemerintahan bentukan Belanda di Papua, namun tuntutan ini berkembang menjadi sebuah niatan untuk mengangkat martabat orang Papua sederajat dengan komunitas lainnya di Papua seperti Belanda, Eropa lainnya, Maluku, Sulawesi, dan daerah lain di Nusantara. Hal ini kemudian berdampak pada nasionalisme Papua. Mengapa demikian? karena tuntutan untuk melakukan *Papuanisasi* dalam sistem pemerintahan artinya menempatkan orang Papua di sebagai pelaksana atau pelaku dalam sistem pemerintahan, kata Papua yang menjadi acuannya. Bukan etnis/suku tertentu, atau kelompok masyarakat dengan bahasa tertentu, tetapi Papua sebagai kesatuan. Tuntutan terhadap Belanda untuk mengakui kemampuan serta memakai orang Papua dalam sistem pemerintahan pada hakikatnya merupakan tuntutan terhadap Belanda agar mau mengakui orang Papua sebagai satu kelompok masyarakat, yang diharuskan diberikannya kesempatan untuk mengatur dan menentukan apa yang terbaik bagi kelompok masyarakatnya sendiri.

Bernada Meteray dalam disertasinya sesuai kutipannya dari Nieuw Guinea Kourier ((1962), secara tidak langsung mengatakan bahwa ide tentang Bangsa dan Kemerdekaan Papua dimunculkan oleh Herman Wajoi dan Frits Kirihiio di Hollandia dalam pertemuan Parna pada 10 Agustus 1960 (Meteray, 2011). Dikatakan dalam pertemuan tersebut bahwa kesadaran nasional sebagai satu masyarakat Papua akan menjadi dasar bagi orang Papua untuk menciptakan Kemerdekaan bagi orang Papua. Ide persatuan merupakan

dasar bagi terbentuknya rasa nasionalisme yang kemudian mampu menjadi nilai tawar bagi orang Papua untuk merdeka sebagai sebuah bangsa dan negara. Persatuan Papua bukan untuk mengentaskan keberagaman sosial masyarakat Papua tetapi untuk semakin mempertegas kePapuaan yang dimiliki, kePapuaan yang dimaksud adalah termasuk keberagaman sosial didalamnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Smith tentang nasionalisme, yang merupakan perjuangan ideologi untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas penduduk. Ernest Gellner bahkan menempatkan *nation* sebagai sesuatu yang muncul, ditemukan, dan diciptakan karena didasarkan pada keinginan untuk hidup bersama karena adanya beberapa kesamaan.

Papuanisasi adalah tentang pembentukan rasa persatuan bagi orang Papua, yang harus diciptakan kemudian diangkat sebagai sebuah identitas semua orang berambut keriting, kulit hitam, di bagian timur Nusantara tersebut. Meski kesangsian akan kemampuan untuk merdeka dan membangun sebuah negara juga muncul diantara orang Papua sendiri, karena persoalan SDM, infrastruktur, demografi, dan geografi masih tantangan terbesarnya. Meskipun dijajah oleh Belanda selama Belanda menjajah Nusantara, namun Belanda tidak membangun Papua selayaknya membangun Jawa, Sumatera, dan Maluku pulau lainnya, karena muncul anggapan bahwa Papua kala itu hanyalah Pulau besar yang tertutup hutan lebat. Kita tahu bahwa meskipun pembangunan yang dilakukan Belanda bertujuan bagi kepentingan kolonialisme Belanda di Nusantara namun hal tersebut juga setidaknya berdampak pada pembangunan fisik dan sumber daya manusia daerah jajahan. Sehingga rasa kePapuaan tersebut terlambat muncul, dibandingkan di Jawa yang sudah muncul sejak 1905 yang ditandai dengan lahirnya Sarekat Islam, dan tahun 1908 lahirnya Budi Utomo.

Kesangsian akan nasionalisme Papua yang didasarkan pada alasan tersebut dikemukakan oleh Nicolaas Jouwe (Fahardian, 2007). Nicolaas Jouwe menginginkan agar nasionalisme Papua serta semua ide Parna harus realistis, oleh karena itu harus didukung dengan pembangunan ekonomi, dan hal tersebut harus didukung oleh Belanda. F. A. Bernted menyatakan bahwa visi Parna tentang nasionalisme Papua sangat radikal karena bersifat sentimen, sentimen terhadap kelompok masyarakat selain orang Papua yang ada di Papua, daripada sebuah ideologi. Ide Nicolaas Jouwe ini ternyata didukung

oleh partai politik selanjutnya yang lahir setelah Parna. Mereka masih sangat berharap dengan adanya dukungan Belanda terhadap pengentasan buta huruf dan pembangunan infrastruktur, karena dua hal ini dianggap paling mendasar sebelum berbicara nasionalisme Papua. Doktrinasi tentang nasionalisme Papua dianggap terlalu cepat dilakukan karena adanya ketidakseimbangan antara kondisi masyarakat kala itu dengan tuntutan politik proses yang terjadi hanya dalam selang 1 tahun antara 1960-1961. Sementara itu muncul kecurigaan dibalik ide nasionalisme Papua yang kecurigaan tersebut didasari pada Parna sebagai partai pencetusnya, yang notabene berisikan mayoritas orang Serui dan berpusat di Serui, kala itu Serui merupakan basis dari Partai Kemerdekaan Irian Indonesia (PKII) yang sangat condong pada Indonesia dibawah pimpinan Silas Papare, meskipun tidak berafiliasi dan cenderung kontra dengan PIK namun ide Parna untuk mendudukan status Papua dalam perundingan dengan melibatkan pihak ke 3 yaitu Indonesia, menimbulkan kecurigaan tersebut (Kossay, 2013).

Djopari mengaskan kenyataan bahwa Belanda menyebabkan ekses diantara orang Papua itu sendiri, yaitu terpecahnya orang Papua dalam dua kelompok yaitu Pro Indonesia dan Pro Papua. Djopari memberi contoh dari risetnya bahwa pertentangan antara suku Serui dan Suku Biak, dan pertentangan suku Tanah Merah-Jayapura dengan suku Serui, bahwa tidak semua orang Serui Pro-Indonesia dan tidak semua orang Biak Pro-Papua. Sehingga ide nasionalisme Papua hanya menyentuh kelompok elit dan kelompok masyarakat tertentu, tidak menyeluruh (Djopari, 1993). Memang sulit untuk mengidentifikasi menguatnya nasionalisme Papua pada tahun 1960 karena semakin banyak orang Papua berpolitik maupun karena rasa kePapuaan. Karena persoalan politik yang cenderung didorong lebih diperjuangkan dibandingkan aspek ekonomi.

Perdebatan mengenai status Papua yang kemudian dimanifestasikan oleh Belanda dalam pembentukan Dewan Nieuw Guinea yang kemudian membentuk Komite Nasional pada 19 Oktober 1961, dan selanjutnya pengumuman keberadaan orang Papua pada 1 Desember 1961 (yang kemudian dianggap sebagai proklamasi kemerdekaan Papua oleh pendukung kemerdekaan, termasuk OPM (TPNPB) saat ini) pada hakikatnya hanya merupakan penegasan Papua sebagai suatu bangsa yang dapat menentukan nasib sendiri, bukan oleh bangsa lain, namun mengharapkan tuntunan dari Belanda hingga mampu

berdikari. Sikap elit Papua saat itu didasarkan pada konflik Belanda dan Indonesia mengenai status Papua.

Bernada Meteray sendiri dalam disertasinya menyimpulkan bahwa ide tentang kePapuaan pada hakikatnya dilakukan oleh misionaris Kristen Protestan dan Katolik untuk mengatasi kemajemukan orang Papua agar mempermudah misi dan zending menyatukan orang Papua demi mengkristenkan Papua. 2 kelompok misionaris ini bergerak di wilayah yang berbeda (Kristen di Utara dan Barat, Katolik di Selatan dan Timur), namun menggunakan konsep pendidikan yang sama yaitu asrama. Sehingga kelompok terdidik dari Papua hasil pendidikan misionarislah yang kemudian memicu lahirnya kePapuaan itu sendiri. Pendirian sekolah dengan bentuk asrama telah dilakukan sejak tahun 1925. Sementara itu pemahaman mengenai politik dan pemerintahan dimasukkan dalam dunia pendidikan setelah Van Eechoud diangkat menjadi Pejabat Residen di Papua pada tahun 1945. Dia memprakarsai pembukaan kursus berpola asrama, yang memberikan materi pendidikan pemerintahan, kesehatan, pertanian, kemiliteran, dan pendidikan (Meteray, 2011). Namun pada masa Van Eechoud ini terjadi penyemaian nasionalisme Indonesia.

Ide nasionalisme Indonesia disemaikan secara tidak langsung karena Van Eechoud pada tahun 1945 memimpin residen Papua dan mengangkat beberapa orang Indonesia (dari luar Papua) sebagai pejabat dan pegawai pemerintahan. Meskipun bekerja untuk Belanda namun mereka dianggap sebagai tahanan perang oleh Belanda, selanjutnya peran tokoh nasionalis Indonesia yang diasingkan ke Papua pada pertengahan 1946 memiliki andil besar dalam menumbuhkan pengetahuan tentang Indonesia yang saat itu telah memproklamakan kemerdekaan (Meteray, 2011). Indonesia secara tegas mengklaim Papua sebagai bagian dari Indonesia setelah membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota Soasiu pada tahun 1956 melalui UU No. 15 Tahun 1956, namun kemudian diiadakan dan membentuk Provinsi Irian Barat versi baru pada 1 Januari 1962 melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 dengan ibukota di Kota Baru (Jayapura). Provinsi versi baru ini dipicu oleh dicituskannya Trikora pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, setelah provinsi versi baru ini dibentuk kemudian dibentuk operasi pembebasan Irian Barat yang ditandai dengan bentuknya gabungan TNI daerah Indonesia

Timur yang dinamakan Komando Mandala (Diketahui oleh Mayjen Soeharto). Operasi ini kemudian memicu terjadinya New York Agreement pada 15 Agustus 1962 yang kemudian berujung pada PEPERA 1969. PEPERA 1969 inilah yang menjadi proklamasi kembalinya Papua ke pangkuan NKRI. Proses penyemaian keIndonesiaan yang berlangsung lebih singkat ini kemudian diakhiri dengan penyatuan Papua ke dalam bagian Indonesia oleh sebagian besar masyarakat Papua ini merupakan pemaksaan.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PROSES INTEGRASI HINGGA PEPERA 1969**

#### **A. PERUNDINGAN DAN KONFERENSI MENGENAI PAPUA**

##### **1. Konferensi Malino**

Berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan sesuai dengan surat keputusan rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 wilayah Indonesia mencakup daerah bekas jajahan Belanda, yaitu, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Maluku dalam konteks ini Papua masuk Maluku. Keputusan mengenai wilayah ini tidak mempengaruhi sikap Belanda untuk menguasai Indonesia kembali. Pemerintah Belanda melalui Gubernur Jenderal Van Mook beritikad untuk menyatukan Hindia Belanda dalam bentuk negara persemakmuran, dengan menyelenggarakan konferensi. Konferensi Malino dirancang bagi berbagai kelompok etnis Indonesia agar dapat bekerja sama dalam rangka pembentukan negara federal. Dengan dukungan W. Hoven, Van Mook mengadakan pendekatan kepada para pemuka politik, aliran-aliran dalam masyarakat, dan para pejabat di Indonesia bagian timur supaya hadir dalam muktamar besar untuk membahas konstelasi dan pemerintahan dalam rangka menyusun ketatanegaraan baru di Indonesia. Demikianlah, pada 15 Juli 1946 di selenggarakan konferensi di Malino, suatu tempat di Pegunungan Lompobatang, 70 kilometer dari Makassar, Sulawesi Selatan. Malino dalam bahasa setempat berarti 'tempat yang damai'. Yang hadir adalah para utusan dari luar Jawa dan Madura yang umumnya golongan bangsawan dan dianggap tidak mendukung pembentukan negara Republik Indonesia (Agung, 1985).

Peserta konferensi yang hadir pada umumnya ini mendukung proses pembentukan negara federal dan mengabaikan adanya perbedaan etnis di antara mereka. Mereka pada umumnya menyalahkan para pemimpin Indonesia yang dianggap telah mengabaikan pembangunan di wilayah mereka. Di antara para peserta terdapat utusan dari Papua, yaitu Frans Kaisiepo yang kala itu menjabat sebagai HBA di Biak, dan didampingi De Bruijn yang bertindak sebagai penasihat untuk wilayah Papua. Frans Kaisiepo adalah orang Papua pertama yang secara resmi bertemu dengan para tokoh Indonesia lain di Malino. Dia juga orang Papua pertama yang mengusulkan dalam forum seperti itu agar nama

Papua diganti dengan Irian. Penggantian nama Papua merupakan materi penting bagi Frans Kaisiepo, sebab selama ini penggunaan kata Papua sering dianggap merendahkan martabat orang Papua. Usulan penggantian nama Papua menjadi Irian sebenarnya pernah dikemukakan oleh Marcus Kaisiepo dalam surat kabar *Penyuluh* edisi September 1945. Marcus Kaisiepo adalah orang Papua pertama yang memprotes nama Papua (Agung, 1985). Di bagian lain dalam konferensi ini, Frans Kaisiepo mengemukakan pendapat tentang kedudukan Papua dalam rangka pembentukan negara federal. Dia bersama utusan dari Dayak menegaskan bahwa selama ini para pemimpin Indonesia dengan sengaja mengabaikan kelompok minoritas. Karena itu, Frans Kaisiepo menyinggung soal masa depan Papua.

Pendapat Frans Kaisiepo tidak mendapatkan tanggapan dari forum. Pengabaian itu menunjukkan bahwa kontribusi orang Papua selama masa itu dimarjinalkan. Hal yang sama ditegaskan oleh Harsja W. Bachtiar yang menyatakan, meski kedudukan Papua dipersoalkan oleh para pembicara, tak ada yang mengindahkan kedudukan penduduk pribuminya. Ketika Papua dibicarakan, seolah-olah daerah itu tak ada penduduknya (Bachtiar, 1963).

## **2. Konferensi Pangkalpinang**

Beberapa bulan kemudian, Belanda menyelenggarakan konferensi pada 1-12 Oktober 1946 di Pangkalpinang. Tujuan konferensi ini adalah membina kerja sama di antara kelompok-kelompok minoritas seperti Belanda, Arab, dan Tionghoa. Sebelum 1946, kerja sama antarkelompok etnis dan ras dianggap lebih mudah daripada sesudah 1946 sehingga diperlukan partisipasi kelompok minoritas di seluruh wilayah Hindia Belanda. Sesudah 1946, kelompok keturunan Eropa khususnya tidak pernah mengidentifikasi diri mereka sebagai penduduk pribumi dan cenderung menganggap status mereka lebih tinggi. Tentu saja, keadaan ini akan menyulitkan kepemimpinan Van Mook dalam upaya membentuk negara federal. Untuk menghadapi masalah kelompok antar kelompok ini, titik tekannya bukan hanya pada hak dasar, kebebasan beragama dan berekspresi, melainkan juga bagaimana membangun kepercayaan. Menurut Van Mook, untuk dapat menyelesaikan masalah kelompok minoritas tergantung bagaimana

membangun hubungan baik dan sikap saling percaya. Karena itu, dalam konferensi ini dia menegaskan pentingnya membangun kerja sama di antara kelompok-kelompok minoritas. Peserta konferensi, G. T. Berg, mengusulkan agar Papua diberi status khusus sehingga dapat dijadikan tanah air bagi warga keturunan Eropa. Berg adalah pengurus *Groter Nederland Actie* (GNA), yang pada 11 Maret 1946 mengusulkan kepada Van Mook agar Papua diumumkan sebagai daerah yang terpisah dari Kerajaan Belanda seperti halnya Suriname sehingga kaum Indo peranakan dapat mempertahankan budaya dan agama mereka. Usul ini tidak mendapat tanggapan langsung dari Van Mook. Van Mook mengatakan bahwa rencana keinginan kelompok minoritas untuk kolonisasi bukan ditolak, tetapi perlu dipertimbangkan dengan baik aspek proseduralnya. Dia juga menegaskan bahwa kolonisasi bukan hal mudah. Semua rencana kolonisasi masih dalam proses. Memang, ada upaya untuk melakukan kolonisasi di Papua, tetapi hal itu dilakukan secara perlahan, bukan dengan menciptakan kuburan massal (Meteray, 2012).

Salah satu pendorong pemerintah kolonial Belanda membangun Papua, menurut Lijphart dalam *The Trauma of the Decolonization the Dutch and West New Guinea* dalam Bernada Meteray, adalah kampanye masyarakat Indo peranakan untuk menjadikan daerah itu sebagai tanah air mereka. Lijphart menegaskan, pada awal abad XX terjadi perubahan posisi sosial ekonomi kaum Indo peranakan lantaran perluasan pendidikan dan persamaan gaji bagi orang Indonesia. Situasi ini membuka kompetisi terbuka dengan masyarakat Indonesia. Di samping itu, terjadi depresi ekonomi pada 1930-an, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Hindia Belanda, yang pada gilirannya mendorong Pemerintah Belanda mendukung upaya kaum Indo peranakan untuk menempati Papua (Meteray, 2012).

Ide menjadikan Papua sebagai tanah air bagi kaum Indo peranakan muncul pada 1923, yang dimulai dengan kampanye A. Th. Scalk, A. Wevrs, dan J. H. Schaafsma dari *Indo Europese Verbond* (Ikatan Indo Peranakan). Ide ini masih terus dipertimbangkan hingga penyelenggaraan KMB. Mereka berinisiatif mendirikan dua kelompok, yaitu *Vereniging Kolonisatie Nieuw Guinea* (VKNG) dan *Stichting Immigratien Kolonisatie Nieuw Guinea* (SIKNG). Pada 1930, sebanyak 93 orang Indo peranakan dari VKNG tiba di Hollandia, sementara 300 orang dari SIKNG tiba di Manokwari. Kelompok Indo

peranakan yang tiba di Hollandia ternyata tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Kelompok VKNG ini tidak hanya mengabaikan keberadaan penduduk lokal sehingga tak mampu membina hubungan dengan penduduk lokal, tetapi juga tidak mempunyai cukup dana.

Sementara itu, kelompok SIKNG di Manokwari diizinkan memanfaatkan tenaga buruh lokal. Bahkan asisten residen di Manokwari memperlihatkan perhatian dan bantuan kepada kelompok mereka sehingga kehidupan mereka relatif berhasil. Walaupun ada keberhasilan di Manokwari, De Bruijn berpendapat bahwa kelompok Indo peranakan ini tidak mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Belanda sehingga banyak pula yang mengalami kegagalan. Kelompok Indo peranakan ini umumnya tidak mempunyai pengalaman di bidang pertanian, jumlah buruh tidak mencukupi, dan kondisi pasar tidak sesuai dengan hasil panen. Tidaklah mengherankan jika jumlah orang Indo peranakan di Papua pada pertengahan 1930-an menyusut. Selama Perang Dunia II banyak orang Eropa, termasuk Indo peranakan, yang terbunuh dalam perang melawan Jepang.

Menurut VanMook. Sedang berlangsung negosiasi antara Belanda dan Indonesia sehingga tidak mungkin untuk segera menegaskan status resmi tentang Papua. Sementara itu, Menteri Urusan Koloni Jonkman, sebaliknya, secara tegas dan berani menyatakan pendapatnya kepada Komisi Umum sehubungan dengan status Papua bahwa perlu dipertimbangkan kemungkinan pemberian status khusus untuk Papua tanpa mencari tahu lebih dulu keinginan penduduknya. Jawaban dari Komisi Umum pada 14 November 1946 adalah mempertimbangkan usul Jonkman walaupun jelas bagaimana hal ini dapat diimplementasikan. Ada perbedaan pandangan antara Van Mook dan Jonkman menyangkut masa depan Papua. Keputusan Van Mook untuk menunda pembahasan status khusus Papua mungkin didasarkan pada kunjungannya ke Papua bersama Ch. O. Van der Plas pada Desember 1944. Berdasarkan pengamatan Van Mook, pada masa itu Papua dianggap masih sangat terbelakang sehingga masih banyak yang harus dibangun apabila hendak mendatangkan kelompok peranakan Eropa ke sana. Sikap Van Mook yang tidak tegas menyangkut status Papua akan tampak pula dalam Perundingan Linggajati dan Konferensi Denpasar (Meteray, 2012).

### 3. Perundingan Linggarjati

Untuk mempercepat pembentukan negara federal yang telah dibahas di Malino, Belanda mengadakan Perundingan Linggarjati pada 11-13 November 1946. Tujuan perundingan ini untuk mewujudkan pembentukan Negara Serikat Indonesia. Perundingan Linggarjati tidak secara khusus menyinggung Papua, tetapi implikasinya Papua dimasukkan sebagai bagian dari Indonesia yang akan terdiri atas wilayah yang sama dengan Hindia Belanda. Dalam Artikel 3 dan 4 dijelaskan: Pasal 3 “Negara Indonesia Serikat akan terdiri dari seluruh wilayah Hindia Belanda dengan pengertian bahwa, jika penduduk di setiap wilayah yang sudah konsultasi, memperlihatkan adanya indikasi bahwa wilayah-wilayah yang tidak melalui proses demokrasi atau yang tidak bermaksud bergabung dengan Negara Indonesia Serikat, akan diberikan sebuah hubungan khusus pada Negara Indonesia Serikat itu dan pada Kerajaan Nederland”.

Pasal 4 “Negara Indonesia Serikat akan terdiri dari: Republik, Kalimantan, dan Timur Besar tanpa membatasi hak penduduk dari tiap wilayah yang menunjukkan melalui proses demokrasi yang memperlihatkan keinginannya untuk ditempatkan dalam Negara Indonesia Serikat yang diatur dalam voting”. Rakyat akan menentukan apakah memilih Uni Indonesia atau memisahkan diri dari Indonesia, yang dilakukan melalui prosedur demokrasi. Pernyataan dari hasil Perundingan Linggarjati, khususnya Artikel 3 dan 4, rupanya tidak berlaku bagi orang Papua, sebab perundingan ini tidak secara spesifik menyinggung Papua, juga bahwa Papua pada waktu itu dianggap masih terbelakang sehingga dianggap tidak dapat memberikan keputusan secara demokratis, baik sebagai daerah yang memiliki status sendiri maupun di luar wilayah Indonesia. Itulah sebabnya, pihak Belanda bermaksud memberikan status terpisah yang dalam Perundingan Linggarjati diuraikan dalam bagian penjelasan (*Toelichting*). Dengan mempertimbangkan kondisi ini, pihak Belanda bermaksud memberikan status khusus kepada Papua yang kelak akan digabungkan dalam Uni Indonesia-Netherlands dan tidak diserahkan kepada Negara Indonesia Serikat (NIS). Berdasarkan Artikel 3 dan 4, komisi Belanda setuju untuk menempatkan Papua dalam bagian tertentu seperti yang diketahui sebagai bagian penjelasan atau *Toelichting*. Penjelasan tersebut adalah sebagai berikut (Meteray, 2012):

Komisi umum tidak menyembunyikan adanya kesulitan apabila dalam perundingan ini diterapkan pasal 3 dan 4 di NNG [Papua]. Kesulitan-kesulitan akan muncul bila dipaksakan untuk menawarkan status khusus bagi NNG apabila diterapkan pasal 3 dan 4. Sebagai bagian dari Kerajaan Nederland, dan termasuk bagian dari negara Uni Indonesia Belanda, wilayah ini kemudian akan ditempatkan dalam hubungan khusus. Penjelasan itu memperlihatkan betapa sulitnya menerapkan Artikel 3 dan 4 bagi Papua. Menurut Lijphart (1966), ketidakmampuan orang Papua dalam pemilihan demokratis yang menjadi pertimbangan Belanda dalam pasal tambahan *Toelichting* itu. Penjelasan ini juga membuka kemungkinan bagi orang Papua untuk dipisahkan dan diberikan semacam status khusus (Schoorl, 2001).

Van Mook akhirnya berubah pandangan yang selama ini berbeda dengan Jonkman. Dalam surat pribadi kepada Jonkman tertanggal 27 November 1946 dia menyatakan bahwa setelah bertemu dengan Dr. W. Hoven dan Van Eechoud, dia berkesimpulan bahwa Papua harus diberi status khusus. Dia mengutarakan tiga alasan. Yang *pertama*, menurut data baru, jumlah penduduk Papua lebih dari perkiraan sebelumnya, tidak akan menerima campur tangan Indonesia dalam masalah mereka dan, sehubungan dengan rendahnya peradaban mereka, tidak mungkin membiarkan mereka di bawah kontrol NIS. Alasan *kedua*, diperlukan dana besar untuk membangun Papua. Perlu dipertimbangkan peran Kesultanan Tidore untuk mempermudah pembangunan Papua. *Ketiga*, diusulkan tiga kemungkinan Papua diberi status khusus, yaitu sebagai bagian dari Kerajaan Belanda dan Uni Indonesia, sebagai wilayah khusus diatur oleh Uni, dan sebagai wilayah perwalian PBB di bawah Kerajaan Belanda atau Uni. Perubahan pandangan Van Mook itu tidak memengaruhi Jonkman yang tetap tegas menuntut Papua harus diberi status khusus dan menolak menyerahkan Papua sebagai daerah perwalian PBB. Hal ini disampaikan Jonkman kepada Van Mook pada 11 Desember 1946 (Meteray, 2012).

#### **4. New York Agreement (Perjanjian New York)**

Amerika Serikat melalui Elsworth Bunker, mengajukan usulan kepada PBB mengenai penyelesaian persoalan Irian. Oleh karena tekanan dari Amerika Serikat terhadap Belanda inilah maka Belanda menerima seluruh rumusan dalam usulan Bunker,

namun dengan syarat harus memperhatikan hak-hak dan jaminan bagi rakyat Irian. Rumusan itu disepakati pada tanggal 18 Juli 1962. Sehingga pada tanggal 15 Agustus 1962 sesuai dengan usulan Bunker, maka di markas besar PBB New York berhasil ditandatangani sebuah perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda yang dikenal dengan “Perjanjian New York (*New York Agreement*)” yang langsung disaksikan oleh Sekretaris Jenderal PBB U Thant. Perundingan ini membicarakan nasib Papua tetapi tidak menyertakan orang Papua di dalamnya, delegasi-delegasi yang hadir dalam perundingan ini antara lain Soebandrio (Wakil Indonesia), Sekjen PBB U Thant, DR. Van Royen (Wakil Belanda), Elsworth Bunker (Mediator), Schurman (Delegasi Belanda).

Sesuai dengan Perjanjian New York maka kedua negara Belanda dan Indonesia harus menjalankan kewajibannya yang saya singkat antara lain,: Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Irian Barat kepada Badan Pemerintahan (Peralihan) Sementara PBB yakni *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) sejak 1 Oktober 1962; dan kemudian UNTEA akan menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada Indonesia dalam rangka pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dan lain-lain; kemudian sebelum akhir tahun 1969 dengan berada dibawah pengawasan PBB, Indonesia akan melaksanakan suatu *Act of Free Choice* (PEPERA) penentuan nasib sendiri bagi orang Papua/ apakah mereka ingin bergabung dengan Indonesia atau berdiri sendiri sebagai sebuah Negara merdeka. Proses pemilihan ini pula harus dilakukan sesuai kaidah-kaidah yang ditentukan oleh PBB terutama mengenai aturan pemilihan yang bersifat *satu orang satu suara/ one man one vote*. Persetujuan ini dicatat oleh majelis umum PBB berdasarkan resolusinya pada tanggal 21 September 1962, No. 1752.

## **B. PROSES INTEGRASI**

### **1. Papua Dibawah UNTEA Hingga Penyerahan Kekuasaan Kepada Pemerintah Indonesia (Oktober 1962-Mei 1963)**

*United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) dibentuk pada 21 September 1962. Mandat utama UNTEA adalah *pertama*, memelihara keamanan dan

ketertiban umum. *Kedua*, mengumumkan dan menerangkan secara luas semua ketentuan dalam persetujuan Indonesia dan Belanda serta memberitahukan kepada penduduk Papua mengenai penyerahan pemerintahan kepada pihak Indonesia. Termasuk mengenai penentuan nasib sendiri sebagaimana telah dicapai dalam persetujuan tersebut. UNTEA memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan baru dan mengubah peraturan yang telah ada sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada padanya. Selain itu juga memiliki kewenangan untuk mempekerjakan pegawai bangsa Indonesia maupun Belanda dalam berbagai kedinasan. Perkecualian diberlakukan untuk jabatan tertinggi seperti direktur departemen, residen dan kepala polisi harus dijabat oleh pejabat berkebangsaan selain Indonesia dan Belanda (Jopari, 1993)<sup>2</sup>.

1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan kekuasaan di Papua kepada UNTEA, namun bendera Belanda masih boleh berkibar bersama bendera PBB. Selanjutnya pada 31 Desember 1962 bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan pengibaran bendera Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya di Papua UNTEA dikepalai oleh seorang administrator yang disepakati oleh kedua negara, Belanda dan Indonesia. Kepala administrator pertama adalah Jose Rolz Bonnet, kemudian digantikan oleh DR. Jalal Abdoh. Pembiayaan UNTEA sendiri ditanggung oleh kedua negara, yang kemudian membentuk panitia kedua negara yang bertugas untuk mengatur anggaran yang sepatutnya mampu memperlancar penyelenggaraan pemerintahan di Irian Barat saat itu. Sedangkan urusan keamanan di masa UNTEA ini dipimpin dan dikomandoi oleh pasukan keamanan PBB yang berasal dari Pakistan dibawah pimpinan Mayor Jenderal Sahid Uddin Khan (Pigay, 2000).

---

<sup>2</sup> Pemerintahan Untea Sendiri Dibagi Dalam 8 Departemen Yang Terdiri Dari *Department Of Cultural Affairs (Including Education), Department Of Economic Affairs, Department Of Finance, Department Of Internal Affairs, Department Of Public Health, Department Of Public Works, Department Os Social Affairs And Justice, Dan Department Of Transport And Power*. Sedangkan Untuk Dukungan Administrasi, Pemerintahan Untea Dijalankan Oleh Sebuah Sekretariat Pemerintah Yang Strukturnya Sama Dengan Di Masa Pemerintahan Belanda Yang Masing-Masing Dikepalai Oleh Seorang Residen. Ada Enam Divisi Yaitu Hollandia (Jayapura), Biak, Manokwari, Fak-Fak Dan Central Highlands (Pegunungan Jayawijaya).

Selama penguasaan oleh UNTEA sejak 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963 muncul berbagai aksi dari masyarakat Papua yang berkisar pada Pro-Kemerdekaan Papua dan Pro-Integrasi Indonesia. Perdebatan dua faksi ini terjadi pada tataran orang Papua yang berpendidikan saja dengan berbagai usahanya yang membentuk partai-partai politik. Jika di bab sebelumnya saya sudah banyak membahas partai pro Papua merdeka, disini sedikit saya membahas kelompok pro integrasi, karena kelompok ini muncul menjelang penyerahan kekuasaan dari UNTEA ke Indonesia. Kelompok ini dipimpin oleh kaum terdidik yang ada di perkotaan di bawah pimpinan Silas Papare dan didukung oleh E. J Bonay, Marten Indey, Lukas Rumkorem, dan Albert Kurubuy. Kelompok ini kemudian membentuk partai Kemerdekaan Indonesia Irian di Serui. Kelompok ini kemudian mendapat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia setelah penyerahan kekuasaan dari UNTEA kepada Indonesia pada Mei 1963. Partai Kemerdekaan Indonesia Irian ini kemudian Pada 14 Januari 1963 di Kotabaru, menyampaikan suatu pernyataan kepada Administrator UNTEA, Dr. Djalal Abdoh yang berisikan: “Kami rakyat Irian Barat dengan ini menyatakan: *Pertama*, menuntut perpendekan pemerintahan UNTEA. *Kedua*, bergabung segera kepada Republik Indonesia secara mutlak dan tanpa syarat. *Ketiga*, setia kepada Proklamasi 17 Agustus 1945. *Keempat*, menghendaki adanya negara kesatuan yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke. *Kelima*, menghendaki otonomi yang seluas-luasnya dalam Republik Indonesia bagi wilayah Irian Barat (Pigay, 2000).

Sejak 31 Desember 1962 UNTEA bersama Indonesia menjalankan roda pemerintahan di Papua/Irian Barat. Sehubungan dengan itu pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Penetapan Presiden (Pen. Pres) Nomor 1 Tahun 1963 sebagai kebijaksanaan untuk segera melaksanakan pemerintahan di wilayah Irian Barat dalam masa peralihan sehingga susunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Irian Jaya sarna dengan daerah Indonesia lainnya. Penpres Nomor 1 Tahun 1963 ini adalah ketentuan pokok mengenai pemerintahan dalam masa peralihan dengan memperhatikan Penpres Nomor 1 Tahun 1962 dan UU Nomor 1 Tahun 1957 serta beberapa ketentuan atau peraturan lainnya mengenai pemerintahan daerah. Dalam Pasal 4 Penpres No 1 tahun 1963 dijelaskan bahwa, Pemerintah *Afdeling*, *Onderafdeling* dan Distrik termasuk badan perwakilannya yang ada menjelang penyerahan Pemerintahan seluruhnya kepada

Republik Indonesia, membantu Pemerintah Propinsi Irian Barat menjalankan pemerintahan di daerah masing-masing menurut petunjuk Gubernur (Djopari, 1993).

Pada 1 Desember 1963 para wakil rakyat Irian Barat mengadakan musyawarah di Kotabaru (Jayapura). Sebagai tindak lanjut ke arah keamanan politik demi stabilisasi dan normalisasi sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 1963 yang berlaku khusus untuk Irian Barat, maka musyawarah itu telah menyetujui untuk mengeluarkan pernyataan tentang pembubaran semua organisasi politik di Irian Barat, termasuk partai-partai politik dan Dewan Nieuw Guinea. Sejumlah pernyataan kemudian dilakukan oleh rakyat Irian Jaya. Pernyataan rakyat itu dimulai di Manokwari pada 9 Oktober 1962. Rincian banjirnya pernyataan itu adalah sebagai berikut. Pada 1962 terdapat 21 pernyataan, pada 1963 terdapat 25 pernyataan, pada 1964 terdapat 7 pernyataan, pada 1965 terdapat 4 pernyataan, pada 1968 terdapat 3 pernyataan, pada 1967 terdapat 23 pernyataan, pada 1968 terdapat 35 pernyataan. Jadi jumlah keseluruhan pernyataan rakyat yang merupakan kebulatan tekad untuk berintegrasi dengan Indonesia ada 118 pernyataan rakyat (Djopari, 1993).

Indonesia kemudian menjalankan pemerintahan dan administrasi di Irian Barat sejak saat itu hingga PEPERA 1969. Selama itu, Indonesia membentuk direktorat khusus atau direktorat sosial politik dan lembaga Operasi Khusus Irian Barat (OPSUS) untuk mencapai kemenangan pada *Act of Free Choice* atau Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada 1969. Direktorat khusus ini bertugas bersama militer untuk melakukan berbagai kegiatan propaganda maupun mobilisasi massa untuk mendukung Irian Barat masuk Indonesia (Drooglever, 2009). Selagi dilakukan penggalangan dan pembinaan ke arah integrasi dengan Indonesia terutama oleh OPSUS, maka di pihak lain para kader nasionalis Papua yang dibentuk oleh Belanda dulu juga menghimpun kekuatan dengan membentuk organisasi atau perkumpulan untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua atau Irian Barat terlepas dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda.

Di Jayapura, dibentuklah suatu organisasi dengan bentuk gerakan di bawah tanah oleh Aser Demotekay, mantan kepala distrik Demta Kabupaten Jayapura pada 1963. Gerakan ini diberi nama Gerakan menuju Kemerdekaan Papua Barat. Di Manokwari pada 1964 terbentuk sebuah gerakan yang diberi nama "Organisasi dan Perjuangan Menuju

Kemerdekaan Papua Barat" yang oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini pihak keamanan dan kejaksaan disebut sebagai "Organisasi Papua Merdeka" atau OPM (TPNPB), sedangkan masyarakat Papua dan Nasionalis Papua menyebutnya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Kedua gerakan yang dibentuk itu mulai melakukan gangguan terhadap keamanan atau mulai melakukan pemberontakan baik secara radikal maupun secara pembinaan ideologi Papua Merdeka atau Papua Barat mulai dari 1963 sampai sekarang (Elsam, 2012).

## **2. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Tahun 1969**

Pasca penguasaan pemerintahan dan administratif di Papua oleh Indonesia pada tahun 1963, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Dekrit Presiden No. 8/1963 yang menyebutkan bahwa: Dalam daerah Irian Barat, untuk sementara waktu dilarang untuk melakukan kegiatan politik dalam bentuk unjuk rasa, rapat, demonstrasi atau penerbitan, publikasi, pengumuman, pengeluaran, penyebarluasan, perdagangan atau pertunjukan di depan publik artikel, gambar, photo tanpa ijin pemerintah atau lembaga yang telah ditunjuk (Tim Sekretariat Keuskupan Papua Jayapura, 2005). Masyarakat Papua tidak pernah dilibatkan dalam pembicaraan apapun yang berkaitan dengan status politik Papua sejak *New York Agreement Tahun 1962*. Pemerintah Indonesia bahkan mengabaikan hak masyarakat Papua untuk berpartisipasi baik dalam negosiasi ditingkat bilateral maupun internasional. Dan lebih jauh untuk memenangkan referendum (PEPERA), pemerintah Indonesia mulai menghapus semua institusi dan simbol yang berkaitan dengan identitas Papua. Pemerintah Indonesia bahkan melarang hak paling mendasar yakni kemerdekaan untuk berekspresi, berkumpul dan mengadakan pergerakan (Rathgeber, 2006).

Selanjutnya mengenai *Act of Free Choice* atau PEPERA itu dilaksanakan pada 1969. Musyawarah penentuan pendapat rakyat Irian Barat dimulai di Merauke pada 14 Juli dan berakhir di Jayapura pada 2 Agustus 1969. Musyawarah yang diselenggarakan di 8 kota di Irian Barat itu disaksikan utusan PBB bernama Dr. Fernando Ortiz-Sanz, duta besar dari Bolivia untuk PBB yang oleh Sekretaris Jenderal PBB, U Thant, ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan *Act of Free Choice* di Irian Jaya pada 1969. Untuk mengatur bagaimana *Act of Free Choice* dilaksanakan di Irian

Jaya, maka Ortiz-Sanz tiba di Jayapura pada 22 Agustus 1968 dengan tiga orang staf ditambah atau didampingi Mr. Sudjarwo Tjondronegoro, pembantu khusus Menteri Luar Negeri Indonesia untuk masalah Irian. Setelah melakukan kunjungan ke wilayah dan memperoleh data tentang cara pelaksanaan PEPERA, maka pada tanggal 1 Oktober 1968 sebagai wakil PBB Ortiz-Sanz menerima bentuk musyawarah rakyat yang dilakukan pada 1969 nanti. Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) yang dibentuk pada 8 kota di Irian Jaya itu mewakili berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Jumlah anggota Dewan Musyawarah PEPERA sebanyak 1.025 orang dari jumlah penduduk sebesar 809.337 orang. Selain wakil dari PBB atau Ortiz-Sanz, maka pelaksanaan PEPERA tersebut disaksikan juga oleh duta besar dari Thailand, Belanda, Australia, Jerman Barat, Selandia Baru, dan Burma.

Berdasarkan Pasal XVIII Perjanjian New York, dinyatakan secara jelas bahwa Pemerintah Indonesia akan melaksanakan PEPERA dengan bantuan dan partisipasi dari utusan PBB dan Stafnya untuk memberikan kepada rakyat yang ada di Papua kesempatan menjalankan penentuan pendapat secara bebas. Kemudian melakukan konsultasi dengan Dewan-Dewan Kabupaten yang ada di Papua untuk membicarakan metode pelaksanaan PEPERA ini. Selanjutnya, seluruh orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan memiliki hak pilih untuk berpartisipasi dalam penentuan nasib sendiri yang akan dijalankan sesuai dengan aturan internasional. Dimana mereka yang punya hak pilih itu adalah mereka yang tinggal di Papua saat Perjanjian New York ditandatangani dan mereka yang berada di Papua ketika PEPERA dilaksanakan, termasuk mereka penduduk Papua yang meninggalkan Papua setelah 1945 dan kembali ke Papua dan menguruskan kembali kependudukannya setelah berakhirnya pemerintahan Belanda. Namun ternyata Pemerintah Indonesia hanya melakukan konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura tentang tata cara penyelenggaraan PEPERA pada tanggal 24 Maret 1969. Kemudian Pemerintah Indonesia memutuskan membentuk Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) dengan anggota yang berjumlah 1026 anggota dari delapan kabupaten, yang terdiri dari 983 pria dan 43 wanita (Hamid, 1996).

Tabel 3. Berikut Daftar Dewan Musyawarah PEPERA tahun 1969 (Djopari, 1993)

Tanggal/Tahun	Kabupaten	Anggota Dewan Musyawarah PEPERA	Jumlah Penduduk
14-7-1969	Merauke	175	144. 171
16-7-1969	Jayawijaya	175	165. 000
19-7-1969	Paniai	175	156. 000
23-7-1969	Fak-fak	75	43. 187
26-7-1969	Sorong	110	75. 474
29-7-1969	Manokwari	75	49. 875
31-7-1969	Teluk Cenderawasih	130	91. 870
2-8-1969	Jayapura	110	83. 760
Jumlah		1. 025	809. 337

PEPERA tetap dilakukan secara marathon mulai tanggal 14 Juli 1969 hingga 2 Agustus 1969, dari Kabupaten Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fakfak, Sorong, Manokwari, Teluk Cendrawasih, dan Jayapura, dari seluruh 8 kabupaten tersebut yang diwakili oleh para anggota DMP dengan suara bulat menyatakan menginginkan Papua menjadi bagian dari NKRI. Utusan PBB selama PEPERA berlangsung bertindak sebagai pengawas, sementara itu Ketua Pelaksana PEPERA adalah Sudjarwo Tjondronegoro. Di hari yang sama (hari terakhir PEPERA) 26 anggota DMP terpilih dipanggil dan diminta untuk menyampaikan pilihan mereka (integrasi ke Indonesia) di hadapan delegasi Australia, Jerman Barat, Selandia Baru, dan Myanmar (Pigay, 2000).

Hasil PEPERA kemudian disampaikan oleh Soekarno dalam sidang MPR 16 Agustus 1969, dan dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1969 (Ulang Tahun Kemerdekaan RI Ke 24). Hasil PEPERA kemudian dibawa ke Sidang Umum PBB ke 24 untuk disahkan melalui voting oleh negara-negara anggota PBB, hasil voting negara-negara anggota menolak hasil PEPERA dengan suara yang menerima tidak mencapai 2/3 persen suara, sehingga keputusan voting menolak hasil PEPERA dan menyepakati untuk PEPERA diulang. Namun Menlu RI saat itu Adam Malik menolak kesepakatan tersebut dengan alasan tidak memiliki dana untuk melakukan jajak pendapat ulang. Sehingga kemudian dibuatlah Nota Diplomatik dan dimuat dalam Resolusi PBB No. 2504 (XXIV) yang mencatat hasil PEPERA tersebut. Isi Nota Diplomatik tersebut adalah PBB hanya mencatat bahwa pernah dilakukannya semacam Pemilu di Irian Barat atau di bekas wilayah Hindia Belanda. Sebagian besar negara anggota PBB menolak hasil PEPERA 1969 karena menganggap Indonesia tidak jujur dan tidak adil dalam melaksanakan

referendum serta tidak sesuai dengan hasil kesepakatan New York Agreement (Pigay, 2000).

Selanjutnya Irian Barat sudah dianggap sebagai bagian dari Indonesia dengan dasar legalitas hasil PEPERA 1969 dengan Gubernur pertama Frans Kaisepo, dengan UU Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Nasionalisme Papua Dan Hak Politik Masyarakat Papua**

Lahirnya nasionalisme Papua bisa dirunut melalui sejarahnya. Kekuasaan kolonial Belanda yang berkuasa di Papua sampai sebelum berada di bawah kekuasaan Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap lahirnya nasionalisme Papua. Tidak

hanya bahwa Papua mengalami sejarah kolonialisme sebagaimana Indonesia juga mengalaminya di bawah kekuasaan Belanda, sejarah kolonialisme tersebut juga telah mempersatukan elit-elit Papua melalui pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, dan proses “Papuanisasi” dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Papua. Bahkan dalam rangka dekolonisasi, Belanda juga mempersiapkan institusi dan sumber daya manusia bagi penduduk Papua sendiri untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Pembentukan partai politik dan Dewan Nieuw Guinea di Papua pada masa sebelum integrasi memang jika dilihat pada konteks saat itu merupakan trik Belanda dalam usahanya mempertahankan kekuasaannya di Papua. Sebagai sebuah negara imperialis yang telah melakukan praktek kolonialisme selama lebih dari 3 abad di Nusantara tentu masih terdapat niat dan keinginan Belanda untuk terus menjajah. Sehingga praktek negara, organisasi, atau penciptaan kekuatan boneka oleh Belanda masih dilakukan di

Papua, artinya Belanda masih menancapkan pengaruhnya dengan memanfaatkan kekuatan pribumi, orang pribumi Papua. Namun seiring dengan itu rasa Nasionalisme Papua mulai tumbuh di tanah Papua yang sebelumnya tercerai berai dalam suku dan

bahasa, serta tradisi yang berbeda. Menyadari hal tersebut, Belanda mengklaimnya sebagai bentuk tanggungjawab moral Belanda bagi orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

Parna sebagai partai politik di tahun 1960-1962 sangat keras menuntut agar orang Papua ada di dalam sistem birokrasi pemerintahan bentukan Belanda di Papua, namun tuntutan ini berkembang menjadi sebuah niatan untuk mengangkat martabat orang Papua sederajat dengan komunitas lainnya di Papua seperti Belanda, Eropa lainnya, Maluku, Sulawesi, dan daerah lain di Nusantara. Hal ini kemudian berdampak pada nasionalisme Papua. Mengapa demikian?, karena tuntutan untuk melakukan *Papuanisasi* dalam sistem pemerintahan artinya menempatkan orang Papua di sebagai pelaksana atau pelaku dalam sistem pemerintahan, kata Papua yang menjadi acuannya. Bukan etnis/suku tertentu, atau kelompok masyarakat dengan bahasa tertentu, tetapi Papua sebagai kesatuan. Tuntutan terhadap Belanda untuk mengakui kemampuan serta memakai orang Papua dalam sistem pemerintahan pada hakikatnya merupakan tuntutan terhadap Belanda agar mau mengakui orang Papua sebagai satu kelompok masyarakat, yang diharuskan diberikannya kesempatan untuk mengatur dan menentukan apa yang terbaik bagi kelompok masyarakatnya sendiri.

Bernada Meteray dalam disertasinya sesuai kutipannya dari Nieuw Guinea Kourier ((1962), secara tidak langsung mengatakan bahwa ide tentang Bangsa dan Kemerdekaan Papua dimunculkan oleh Herman Wajoi dan Frits Kirihio di Hollandia dalam pertemuan Parna pada 10 Agustus 1960 (Meteray, 2011). Dikatakan dalam pertemuan tersebut bahwa kesadaran nasional sebagai satu masyarakat Papua akan menjadi dasar bagi orang Papua untuk menciptakan Kemerdekaan bagi orang Papua. Ide persatuan merupakan dasar bagi terbentuknya rasa nasionalisme yang kemudian mampu menjadi nilai tawar bagi orang Papua untuk merdeka sebagai sebuah bangsa dan negara. Persatuan Papua bukan untuk mengentaskan keberagaman sosial masyarakat Papua tetapi untuk semakin mempertegas kePapuaan yang dimiliki, kePapuaan yang dimaksud adalah termasuk keberagaman sosial didalamnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Smith tentang nasionalisme, yang merupakan perjuangan ideologi untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas penduduk. Ernest Gellner bahkan menempatkan *nation* sebagai sesuatu yang muncul, ditemukan, dan diciptakan karena didasarkan pada keinginan untuk hidup bersama karena adanya beberapa kesamaan.

Papuanisasi adalah tentang pemebentukan rasa persatuan bagi orang Papua, yang harus diciptakan kemudian diangkat sebagai sebuah identitas semua orang berambut keriting, kulit hitam, di bagian timur Nusantara tersebut. Meski kesangsian akan kemampuan untuk merdeka dan membangun sebuah negara juga muncul diantara orang Papua sendiri, karena persoalan SDM, infrastruktur, demografi, dan geografi masih tantangan terbesarnya. Meskipun dijajah oleh Belanda selama Belanda menjajah Nusantara, namun Belanda tidak membangun Papua selayaknya membangun Jawa, Sumatera, dan Maluku pulau lainnya, karena muncul anggapan bahwa Papua kala itu hanyalah Pulau besar yang tertutup hutan lebat. Kita tahu bahwa meskipun pembangunan yang dilakukan Belanda bertujuan bagi kepentingan kolonialisme Belanda di Nusantara namun hal tersebut juga setidaknya berdampak pada pembangunan fisik dan sumber daya manusia daerah jajahan. Sehingga rasa kePapuaan tersebut terlambat muncul, dibandingkan di Jawa yang sudah muncul sejak 1905 yang ditandai dengan lahirnya Sarekat Islam, dan tahun 1908 lahirnya Budi Utomo.

Kesangsian akan nasionalisme Papua yang didasarkan pada alasan tersebut dikemukakan oleh Nicolaas Jouwe (Fahardian, 2007). Nicolaas Jouwe menginginkan agar nasionalisme Papua serta semua ide Parna harus realistis, oleh karena itu harus didukung dengan pembangunan ekonomi, dan hal tersebut harus didukung oleh Belanda. F. A. Bernted menyatakan bahwa visi Parna tentang nasionalisme Papua sangat radikal karena bersifat sentimen, sentimen terhadap kelompok masyarakat selain orang Papua yang ada di Papua, daripada sebuah ideologi. Ide Nicolaas Jouwe ini ternyata didukung oleh partai politik selanjutnya yang lahir setelah Parna. Mereka masih sangat berharap dengan adanya dukungan Belanda terhadap pengentasan buta huruf dan pembangunan infrastruktur, karena dua hal ini dianggap paling mendasar sebelum berbicara nasionalisme Papua. Doktrinasi tentang nasionalisme Papua dianggap terlalu cepat dilakukan karena adanya ketidakseimbangan antara kondisi masyarakat kala itu dengan tuntutan politik proses yang terjadi hanya dalam selang 1 tahun antara 1960-1961. Sementara itu muncul kecurigaan dibalik ide nasionalisme Papua yang kecurigaan tersebut didasari pada Parna sebagai partai pencetusnya, yang notabene berisikan mayoritas orang Serui dan berpusat di Serui, kala itu Serui merupakan basis dari Partai

Kemerdekaan Irian Indonesia (PKII) yang sangat condong pada Indonesia dibawah pimpinan Silas Papare, meskipun tidak berafiliasi dan cenderung kontra dengan PIIK namun ide Parna untuk mendudukan status Papua dalam perundingan dengan melibatkan pihak ke 3 yaitu Indonesia, menimbulkan kecurigaan tersebut (Kossay, 2013).

Djopari mengaskan kenyataan bahwa Belanda menyebabkan ekses diantara orang Papua itu sendiri, yaitu terpecahnya orang Papua dalam dua kelompok yaitu Pro Indonesia dan Pro Papua. Djopari memberi contoh dari risetnya bahwa pertentangan antara suku Serui dan Suku Biak, dan pertentangan suku Tanah Merah-Jayapura dengan suku Serui, bahwa tidak semua orang Serui Pro-Indonesia dan tidak semua orang Biak Pro-Papua. Sehingga ide nasionalisme Papua hanya menyentuh kelompok elit dan kelompok masyarakat tertentu, tidak menyeluruh (Djopari, 1993). Memang sulit untuk mengidentifikasi menguatnya nasionalisme Papua pada tahun 1960 karena semakin banyak orang Papua berpolitik maupun karena rasa kePapuaan. Karena persoalan politik yang cenderung didorong lebih diperjuangkan dibandingkan aspek ekonomi.

Perdebatan mengenai status Papua yang kemudian dimanifetasikan oleh Belanda dalam pembentukan Dewan Nieuw Guinea yang kemudian membentuk Komite Nasional pada 19 Oktober 1961, dan selanjutnya pengumuman keberadaan orang Papua pada 1 Desember 1961 (yang kemudian dianggap sebagai proklamasi kemerdekaan Papua oleh pendukung kemerdekaan, termasuk OPM saat ini) pada hakikatnya hanya merupakan penegasan Papua sebagai suatu bangsa yang dapat menentukan nasib sendiri, bukan oleh bangsa lain, namun mengharapkan tuntunan dari Belanda hingga mampu berdikari. Sikap elit Papua saat itu didasarkan pada konflik Belanda dan Indonesia mengenai status Papua.

Bernada Meteray sendiri dalam disertasinya menyimpulkan bahwa ide tentang kePapuaan pada hakikatnya dilakukan oleh misionaris Kristen Protestan dan Katolik untuk mengatasi kemajemukan orang Papua agar mempermudah misi dan zending menyatukan orang Papua demi mengkristenkan Papua. 2 kelompok misionaris ini bergerak di wilayah yang berbeda (Kristen di Utara dan Barat, Katolik di Selatan dan Timur), namun menggunakan konsep pendidikan yang sama yaitu asrama. Sehingga kelompok terdidik dari Papua hasil pendidikan misionarislah yang kemudian memicu lahirnya kePapuaan itu sendiri. Pendirian sekolah dengan bentuk asrama telah dilakukan

sejak tahun 1925. Sementara itu pemahaman mengenai politik dan pemerintahan dimasukkan dalam dunia pendidikan setelah Van Eechoud diangkat menjadi Pejabat Residen di Papua pada tahun 1945. Dia memprakarsai pembukaan kursus berpola asrama, yang memberikan materi pendidikan pemerintahan, kesehatan, pertanian, kemiliteran, dan pendidikan (Meteray, 2011). Namun pada masa Van Eechoud ini terjadi penyemaian nasionalisme Indonesia.

Ide nasionalisme Indonesia disemaikan secara tidak langsung karena Van Eechoud pada tahun 1945 memimpin residen Papua dan mengangkat beberapa orang Indonesia (dari luar Papua) sebagai pejabat dan pegawai pemerintahan. Meskipun bekerja untuk Belanda namun mereka dianggap sebagai tahanan perang oleh Belanda, selanjutnya peran tokoh nasionalis Indonesia yang diasingkan ke Papua pada pertengahan 1946 memiliki andil besar dalam menumbuhkan pengetahuan tentang Indonesia yang saat itu telah memproklamasikan kemerdekaan (Meteray, 2011). Indonesia secara tegas mengklaim Papua sebagai bagian dari Indonesia setelah membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota Soasiu pada tahun 1956 melalui UU No. 15 Tahun 1956, namun kemudian ditiadakan dan membentuk Provinsi Irian Barat versi baru pada 1 Januari 1962 melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 dengan ibukota di Kota Baru (Jayapura). Provinsi versi baru ini dipicu oleh dicituskannya Trikora pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, setelah provinsi versi baru ini dibentuk kemudian dibentuk operasi pembebasan Irian Barat yang ditandai dengan bentuknya gabungan TNI daerah Indonesia Timur yang dinamakan Komando Mandala (Diketuai oleh Mayjen Soeharto). Operasi ini kemudian memicu terjadinya New York Agreement pada 15 Agustus 1962 yang kemudian berujung pada PEPERA 1969. PEPERA 1969 inilah yang menjadi proklamasi kembalinya Papua ke pangkuan NKRI. Proses penyemaian keIndonesiaan yang berlangsung lebih singkat ini kemudian diakhiri dengan penyatuan Papua ke dalam bagian Indonesia oleh sebagian besar masyarakat Papua ini merupakan pemaksaan.

Perkembangan nasionalisme Papua ini mengalami dinamika yang cukup berarti sesudah reformasi, jauh lebih kuat dan lebih meluas ketimbang pada tahun 1961. Chauvel menjelaskan bahwa menguatnya nasionalisme Papua dipengaruhi oleh empat faktor berikut; *Pertama*, banyak orang Papua mempunyai pandangan dan perasaan yang sama

mengenai ketidakadilan sejarah mengenai proses terintegrasinya tanah air mereka ke dalam Indonesia. *Kedua*, banyak elit Papua merasa rivalitas dengan pejabat-pejabat Indonesia (yang bukan orang Papua) yang telah mendominasi pemerintahan di Papua bahkan sejak di masa Belanda, apalagi kemudian sesudah penyerahan kekuasaan oleh Belanda pada tahun 1963, dan kemudian di masa Orde baru sampai sekarang. *Ketiga*, pembangunan ekonomi di wilayah Papua dan juga pembangunan administrasi pemerintahan, yang berlangsung bersamaan dengan menguatnya kesadaran akan perbedaan antara Papua dengan bagian-bagian Indonesia lainnya, telah memperkuat perasaan *Pan-Papuans* dengan basis yang lebih luas dibandingkan pada awal 1960-an. *Keempat*, transisi demografis di Papua, yang ditandai dengan masuknya warga “pendatang” dalam jumlah besar, baik melalui kebijakan transmigrasi maupun secara “sukarela” telah menimbulkan perasaan bahwa orang Papua termarginalisasi dan tersingkirkan di tanah mereka sendiri. Sebagai ilustrasi lebih lanjut dari argumentasinya; walaupun Papua sendiri terdiri dari begitu banyak kelompok etno-linguistik dengan berbagai ukuran, tetapi evolusi nasionalisme yang terjadi telah berkembang menjadi nasionalisme dan identifikasi identitas sebagai *Pan-Papuan*. Dikemukakan pula bahwa di dua daerah yang semula dapat dikatakan sebagai basis “pro-Indonesia”, yaitu di Serui dan Fak-Fak pun, telah berkembang secara meluas identitas dan loyalitas *Pan -Papuan* tersebut dan dengan demikian perasaan perbedaan dan bahkan anti Indonesia (Chauvel, 2005).

Perasaan nasionalisme masyarakat Papua setidaknya merupakan gerakan kesadaran politik yang muncul dari rasa ketidakadilan yang bukan ditentukan atau diinginkan oleh orang Papua sendiri. Meskipun terdapat tuduhan sejarah dari para ahli maupun pihak Indonesia bahwa kegiatan politik di Papua pada masa sebelum integrasi (PEPERA 1969) hanyalah praktek atau cara Belanda untuk tetap memiliki kontrol atas Papua. Bahkan ada yang menganggap cara Belanda tersebut hanya untuk mempertahankan prestise Belanda sebagai penjajah dan tidak mau kalah dari negara bekas jajahannya, Indonesia. Namun apapun alasan atau tuduhan atas pembentukan organisasi politik dan lembaga politik di Papua pada masa sebelum PEPERA 1969, praktek atau apa yang dilakukan oleh Belanda tersebut telah memicu rasa nasionalisme

masyarakat Papua. Rasa nasionalisme ini kemudian membentuk kolektivitas diantara orang Papua untuk dapat mengatur masyarakat, wilayah, dan seluruh nilai kebudayaan Papua sendiri. Rasa kolektif inilah yang menjadi dasar dalam politik yang kemudian akan berujung pada pengaturan distribusi nilai-nilai sosial yang dimiliki Papua demi kebaikan hidup bagi orang Papua itu sendiri.

Karena politik pada hakikatnya adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh seluruh atau mayoritas masyarakat. Usaha untuk menggapai kehidupan yang baik ini menyangkut bermacam-macam kegiatan antara lain menyangkut proses penentuan berbagai tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Belanda telah mengajarkan bangsa Papua untuk mengatur kehidupan sosialnya sendiri, yang dimulai dengan proses Papuanisasi melalui pendidikan para misionaris Kristen yang dimulai sejak tahun 1855 melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam penyebaran agama, pendidikan dengan sistem berasrama. Dua poin penting inilah yang menjadi pemicu munculnya rasa kePapuaan. Yang kemudian berdampak pada munculnya rasa nasionalisme Papua sebagai sebuah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan fisik, wilayah, dan budaya. Selanjutnya rasa nasionalisme mulai dilembagakan pada tahun 1960 yang ditandai dengan munculnya Partai Politik di Papua (Rathgeber, 2006).

Berbagai perjalanan pembentukan rasa kePapapuaan, Papuanisasi, hingga pelembagaan rasa nasionalisme Papua tersebut telah berdampak pada terbentuknya keinginan politis masyarakat Papua. Sehingga proses PEPERA pada tahun 1969 yang tidak didasarkan pada asas *one man one vote* dalam menentukan nasib sendiri bagi orang Papua menjadi perjalanan sejarah yang harus dikaji ulang. Pengkajian bukan untuk melegitimasi segala usaha para nasionalis Papua pasca integrasi yang bersifat vandalism, namun lebih kepada pengakuan politis bahwa telah terjadi pengkhianatan secara politik atas hak politik masyarakat Papua di masa lampau. Hal ini diharapkan mampu memberikan sebuah persepsi yang sama bagi setiap orang di negeri ini mengenai Papua, baik itu aspek kebenaran sejarah, HAM, dan distribusi nilai-nilai sosial yang selama ini telah termarginalkan bagi orang Papua sendiri.

## **2. Analisis Kritis Konsep Integrasi Terhadap PEPERA 1969**

Jika kita memahami konsep integrasi nasional bahwa integrasi nasional adalah tentang suatu proses atau kondisi penyatuan bagian-bagian bangsa yaitu masyarakat yang hidup di wilayah negara yang bersangkutan memiliki persamaan sejarah, kesatuan simbol dan perasaan subjektif yang mengikat antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. *Pertama*, mengenai persamaan sejarah, jika sejarah Indonesia dan nusantara pada umumnya didasarkan pada kebesaran dua kerajaan masa lampau, Majapahit dan Sriwijaya, maka itu saja tidak cukup karena dua kerajaan ini musnah bahkan sebelum praktek kolonialisme itu muncul. Selanjutnya jika kita menekankan persamaan sejarah pada kesamaan penjajah, yaitu Belanda, maka kita akan terjebak pada pertanyaan, apakah benar Belanda menjajah seluruh Nusantara pada waktu yang sama?. Meskipun kolektivitas yang muncul adalah kolektivitas kesamaan perasaan dan penderitaan karena dijajah, sehingga memunculkan semangat yang sama untuk bebas dan merdeka, maka kita akan sampai pula pada pertanyaan, apakah keinginan merdeka merupakan keinginan seluruh masyarakat nusantara? dan kemerdekaan yang diinginkan apakah dalam satu negara yang sama?. Karena kita semua paham benar bagaimana perjuangan kemerdekaan untuk membentuk sebuah negara bernama Indonesia, dibentuk dan dipusatkan di Indonesia bagian barat saat ini dan sebagian Indonesia Tengah, dan Timur, namun ide-ide tersebut tidak benar-benar merambah hingga akar rumput (masyarakat kelas bawah yang menjadi mayoritas di nusantara kala itu). Di sisi lain pada masa tersebut pemahaman akan keIndonesiaan, kesamaan budaya, bahasa, dan geografis, menjadi tantangan utama yang dapat membantah segala ide persamaan sejarah tersebut. Sehingga aktor pemersatu Indonesia yang kemudian diklaim karena ketokohan Soekarno, dapat dibantah dengan sebuah pertanyaan sederhana, apakah ketika Soekarno berpidato atau ketika dibuang dan diasingkan ke daerah-daerah dia berbicara dengan bahasa daerah dimana dia dibuang dan diasingkan?, jika tidak, dan dia berbicara maupun berpidato dalam bahasa Indonesia yang kita tahu saat ini, pertanyaan lain muncul, apakah saat itu seluruh masyarakat di Nusantara telah berbicara dalam bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia?. Karena jika dilihat kenyataan saat ini saja, hampir di seluruh pelosok negeri

ini masih banyak manusia, suku, kelompok masyarakat yang tidak benar-benara memahami bahasa Indonesia maupun berbicara secara fasih.

Di sisi lain keputusan sebagian elit republikan Indonesia saat agresi Militer II Belanda setelah Jepang menyerah yang berujung pada Konferensi Meja Bundar (di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*), yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia), yang didalam konferensi tersebut memutuskan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah semua wilayah Hindia Belanda (seluruh wilayah bekas jajahan Belanda). Konferensi yang kemudian diakhiri dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara bebas dan merdeka yang berhak mengatur negara dan bangsanya sendiri. Namun dimanakah persoalan kritisnya dari pembahasan mengenai konsep integrasi?. Analisis kritis dari pembahasan ini adalah keinginan untuk bersatu dalam sebuah negara yaitu Indonesia apakah merupakan keinginan seluruh rakyat Hindia Belanda saat itu?, apakah ini bukannya sebuah perjanjian keinginan segelintir elit yang hadir dan datang dalam Konferensi Meja Bundar?. Apakah sebelumnya telah dilakukannya Jajak Pendapat mengenai keinginan masyarakat?.

Hasil Konferensi Meja Bundar ini kemudian secara berturut-turut diikuti oleh berbagai resolusi dan keputusan PBB yang memperkuat kedudukan Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa merdeka. Pada tanggal 24 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semua negara anggota, yaitu: Membebaskan Presiden dan Wakil Presiden serta pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948, dan Memerintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember 1948. Hasil-hasil keputusan PBB lainnya adalah: Piagam Pengakuan Kedaulatan 27 Desember 1949, Pembentukan RIS (Republik Indonesia Serikat), Pembentukan Uni Indonesia-Belanda, Pembubaran tentara KNIL dan KL yang diintegrasikan kedalam APRIS, Piagam tentang kewarganegaraan, Persetujuan tentang ekonomi keuangan, dan Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali setahun kemudian.

Lalu pengakuan terhadap HAM terletak dimana dalam sebuah proses integrasi?. Howard Wrigings mengajarkan kita bahwa Integrasi bangsa berarti menyatukan bagian-bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa. Artinya disini adalah tentang kesediaan dan kerelaan sebuah kelompok masyarakat untuk menyatukan diri dengan kelompok masyarakat lainnya dalam sebuah wilayah, menyatukan diri berarti menemukan kesamaan simbol, nilai, dan ideologi yang merepresentasikan kelompok-kelompok yang menyatu tersebut. Penyatuan tersebut juga merupakan hasil kesepakatan seluruh manusia dalam kelompok masyarakat yang bersatu. Karena integrasi ini menyangkut hidup manusia di masa depan, sehingga disinilah letak pengakuan terhadap HAM. Persoalan ini jika dibawa ke dalam konteks demokrasi, maka sangatlah jelas bahwa demokrasi merupakan ideologi dan sistem pemerintahan yang sangat menjunjung tinggi pengakuan atas HAM.

Selanjutnya jika kita membawa pembahasan ini ke dalam konteks Papua, artinya integrasi Papua ke Indonesia, maka kita perlu secara bersama menyadari betul bahwa pembahasan mengenai nasib Papua di masa depan pada tahun 1960-1969 adalah ditentukan oleh kedua negara, yaitu Indonesia dan Belanda. Hal ini dapat terlihat jelas ketika tidak diikutsertakannya wakil Papua dalam berbagai perundingan mengenai nasib Papua, terutama dalam *New York Agreement* tahun 1962. Perundingan di New York ini kemudian menjadi dasar bagi pengintegrasian Papua ke dalam Indonesia, meskipun secara prosedural nanti akan dilangsungkannya PEPERA pada tahun 1969, namun pengkonstruksian atas nasionalisme dan integrasi ke Indonesia terlihat jelas dalam isi perjanjian dan praktek yang menyatakan bahwa sejak tahun 1963 Indonesia menjalankan pemerintahan secara administratif di Papua. Ketika poin ini disetujui dan dilaksanakan maka disinilah terlihat jelas bahwa Belanda sudah pasti tidak akan dipilih dalam PEPERA 1969 nantinya.

Jika kembali jawaban dari pertanyaan tersebut adalah hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar, maka bukankah sudah terlihat jelas bahwa Konferensi tersebut secara substansial telah mengkhianati pengakuan terhadap HAM untuk berintegrasi?. Sehingga ketika dua pilihan tersebut dihadapkan pada masyarakat Papua pada tahun 1969, ini

merupakan bukti kelanjutan dari pengkhianatan terhadap HAM, dan ketidakpedulian kedua negara (Indonesia dan Belanda) terhadap hak orang Papua baik sebagai manusia, sebagai objek politik, dan sebagai bagian dari demokrasi. Sudah semestinya HAM dipahami secara humanistik sebagai hak-hak yang inheren dengan harkat martabat kemanusiaan dan demi kemuliaan manusia. Konsep tentang HAM dalam konteks modern dilatarbelakangi oleh pemaknaan yang lebih manusiawi, sehingga konsep HAM diartikan sebagai “*Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings*”. Dengan pemahaman seperti itu, konsep HAM disifatkan sebagai suatu *common standard of achievement for all people and all nations*, yaitu sebagai tolok ukur bersama atau standar umum tentang prestasi kemanusiaan yang perlu dicapai oleh seluruh masyarakat dan negara di dunia. Pengakuan terhadap HAM juga telah tertuang di dalam Konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Seturut dengan itu, ketentuan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menentukan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Selanjutnya obligasi negara tersebut diteguhkan kembali dalam ketentuan pasal berikut:

Pasal 71 :Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.

Pasal 72 :Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.

Jika penegakkan dan pengakuan terhadap HAM menjadi dasar negara Indonesia, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Indonesia tidak mampu menegakkan HAM di Papua?. Pengakuan HAM secara substansial adalah pengakuan atas Hak untuk hidup secara mandiri bagi setiap manusia tanpa terkecuali, hak untuk hidup berarti hak untuk mengatur hidup sendiri. Hak untuk menentukan nasib sendiri juga merupakan Hak Asasi Manusia Papua. Namun ketika pilihan hidup yang diberikan hanyalah pilihan untuk bergabung dalam negara lain (Indonesia dan Belanda), maka disinilah letak

pengkhianatan atas HAM yang saya maksud. Dalam konteks Indonesia inilah selain pengkhianatan terhadap HAM juga merupakan pengkhianatan terhadap Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri.

Kita memahami benar bahwa nasionalisme merupakan sebuah nilai dan semangat suatu bangsa yang disatukan oleh persamaan sejarah, budaya, nilai, norma, yang diwujudkan dalam simbol-simbol termasuk pembentukan negara dan sistem pemerintahan. Nasionalisme Indonesia yang disemaikan ke dalam masyarakat Papua berlangsung dalam waktu yang sangat singkat terutama dilangsungkan pasca New York Agreement, pasca diserahkannya kekuasaan oleh UNTEA kepada pemerintah Indonesia. Pembentukan nasionalisme secara substansial yang benar-benar mengakar bukan dilakukan dalam waktu singkat, nasionalisme tumbuh dan berkembang dalam waktu yang panjang, menjadi lebih singkat jika terdapat semangat atau nilai subjektif yang berkembang secara radikal.

Penyemaian nasionalisme Indonesia yang sangat singkat dan bersamaan dengan penguasaan sistem pemerintahan di Papua pada 1963-1969 oleh Indonesia sebelum PEPERA secara historis digambarkan sebagai masa-masa yang penuh dengan praktek propaganda, sekritisasi dan pengkonstruksian apa yang menjadi pilihan bangsa Papua, yaitu integrasi Indonesia. Mengapa terdapat praktek demikian?, menurut penulis hal ini karena pemerintah Indonesia menyadari betul bahwa sangat tidak mungkin jika nasionalisme Indonesia telah tumbuh dan hidup di Papua pada saat itu. Hal ini kemudian diungkapkan secara lisan dalam wawancara penulis dengan Pendeta Keboba Wanimbo yang merupakan Tokoh Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Ketua Sinode Pertama dan Pelaku PEPERA 1969 Usia 82 Tahun (Beliau berbicara dalam bahasa suku Lanny) (Hasil wawancara dengan Pdt. Keboba Wanimbo).

“Dari tahun 1963 saja sudah ada militer di seluruh pelosok tanah Papua. Sebelum PEPERA itu Indonesia mengirim pasukan militer organik dan non organik ke seluruh tanah Papua, kami dari kampung berangkat ke Wamena ibu kota kabupaten Jayawijaya, karena seluruh Pegunungan Tengah (pedalaman) pada saat itu belum ada kabupaten jadi kami semua di jemput oleh tentara dan mereka bilang yang kami pilih yang kepala suku saja berangkat dan yang tidak kepala suku tidak berangkat tidak tahu maksud militer Indonesia, kami pun pasrah dan ikuti maunya militer. Perjalanan 4 hari dari kampung ke kota kabupaten. Malam hari kami tidur di hutan,

dan dijaga dengan bersenjata lengkap oleh militer Indonesia, kalau kami bergerak sedikit pasti dipukul, dan interogasi terus menerus. Oleh para anggota TNI kami disuruh memilih Indonesia, dan kalau kami bilang Papua kami akan ditembak, itu kejadian malam hari. Dan aneh lagi itu kami dikasih perempuan pada malam hari dan diharuskan untuk berhubungan intim dengan para pelacur tersebut.

Kejadian pada hari “H” nya adalah tidak melakukan seperti pemilihan satu orang satu suara. Pada saat itu seluruh peserta yang lapangan itu hanya disuruh baris berbaris lalu orang dari utusan PBB tapi orang Jawa berambut lurus kulit biru coklat menggunakan pengeras suara berbicara bahasa Indonesia lalu kami semua disuruh angkat tangan karena malam hari dan pagi hari sebelum baris mereka sudah bilang kita kalau bilang Papua jangan angkat tangan tetapi kalau bilang Indonesia angkat tangan dan dengar aba-aba dari depan saja lalu komando dari depan mereka teriak bilang *Indonesia* kami semua angkat tangan sesuai perintah, kalau dia bilang Papua kami tidak angkat tangan. Tapi sebelum hari H di seluruh kota Wamena itu ada bendera merah putih, dan poster pamflet pun di jalan-jalan dan tempat-tempat umum seperti bandara, pasar, terminal darat dan lain-lain”.

Wawancara yang sangat singkat karena keterbatasan kemampuan berkomunikasi karena kesehatan beliau yang sudah memprihatinkan.

Namun dari hasil wawancara singkat tersebut dapat dilihat bahwa proses Integrasi yang dimulai sejak 1962 hingga 1969 merupakan proses penentuan pendapat rakyat Papua sesuai keinginan pemerintah Indonesia, bukan keinginan riil masyarakat Papua kala itu. Pernyataan beliau senada dengan apa yang ditulis oleh Aditjondro, Ali Murtopo sebagai ketua OPSUS aktif membujuk para anggota Dewan Musyawarah Pepera, serta melakukan praktek teror agar mereka mau memilih integrasi dengan Indonesia daripada Papua merdeka. Mulai dari intimidasi, berwisata ke tempat-tempat pelacuran di Jawa, sampai dengan operasi pembagian beras, Radio 4 Ban Merk Transistor, diberi uang secara cuma-cuma oleh PT. Irian Bahkti yang merupakan *front* bagi OPSUS pimpinan Ali Murtopo (Aditjondro, 1998).

Pengakuan praktek militeristik dan berbagai propaganda serta intimidasi yang dilakukan diungkapkan secara gamblang oleh Letjen (Purn) Sintong Panjaitan dalam biografinya. Panglima Kodam XVII/Tjendrawasih Brigjen TNI Sarwo Edhie, diangkat sebagai ketua Proyek Pelaksana Daerah yang tugasnya mengendalikan, mengerahkan, dan melakukan koordinasi seluruh kegiatan aparat pemerintah daerah, sipil, dan swasta serta seluruh unsur ABRI di Irian. Sarwo Edhie melancarkan Operasi Wibawa dengan mengerahkan pasukan organik setempat dan pasukan dari luar Irian dengan kekuatan total

5. 220 orang, yang bertujuan mengamankan PEPERA, Menghancurkan OPM (TPNPB), serta menumbuhkan dan memelihara wibawa dan nasionalisme terhadap pemerintah Indonesia (Subroto, 2009). Terakhir yang disebutkan merupakan contoh praktek penumbuhan nasionalisme dan kepercayaan terhadap Indonesia yang dilakukan dengan praktek militeristik yang tentu saja tidak akan jauh dari kekerasan serta sekuritisasi pada pihak-pihak atau kelompok yang menolak nasionalisme Indonesia.

Adapun militer Indonesia yang diturunkan sebelum PEPERA di Irian Barat dinamakan pasukan Karsayudha yang dibawahnya terdapat grup pasukan yang dinamakan Prayudha, masing-masing Prayudha memiliki anggota 26 orang. Setiap Prayudha ditempatkan di seluruh daerah di Irian Barat. Prayudha melakukan pendekatan terhadap setiap kepala suku, tokoh masyarakat di kota, kepala pemerintahan setempat, unsur-unsur partai, pemuka masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang kemudian dipilih dan diangkat menjadi anggota DMP. Dalam prakteknya Prayudha melakukan intimidasi serta infiltrasi terhadap orang atau kelompok-kelompok radikal di Papua yang menolak kehadiran Indonesia. Komandan Karsayudha Wibawa, Kapten Feisal Tanjung menceritakan bahwa masyarakat Papua kala itu dirayu dan diiming-imingi bahwa jika memilih Indonesia maka keadaan ekonomi, sosial, dan pembangunan di Irian Barat akan jauh lebih baik, dan aspirasi masyarakat Irian Barat akan selalu dilindungi, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, agama didalam NKRI (Subroto, 2009).

Letjen Sintong Panjaitan sebagai seorang perwira militer secara lugas mengakui tindakan sekuritisasi dan intimidasi agar masyarakat Papua memilih integrasi, tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dari Pengambilan kekuasaan politik, dan administratif di Papua juga keamanan sejak 1963-1969 (PEPERA) oleh Indonesia bukan oleh pihak ketiga seperti PBB, selanjutnya praktek intimidasi dan sekuritisasi juga doktrinasi koersif nasionalisme Indonesia sebagai kausalitas dari penguasaan Indonesia, dan berakhir pada praktek PEPERA Papua yang tidak demokratis.

Menurut Saafroedin Bahar Pada fase peralihan (1963-1969) ada beberapa masalah di Irian Jaya, yang menyebabkan bangkitnya kembali sikap beberapa kalangan di Irian Jaya antara lain (Bahar, 1996):

- a. Sikap sebagian pejabat di Irian Jaya seperti orang yang baru “menang perang”, sehingga menumbuhkan persepsi dikalangan penduduk asli bahwa pendatang itu adalah “*The New Colonial Masters*”.
- b. Beberapa pejabat sipil dan militer juga mengangkut barang-barang peninggalan Belanda di Irian Jaya, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah pejabat itu “merampok Irian”, walaupun sebenarnya tidak sedikit pejabat pemerintah yang benar-benar berdedikasi dengan semangat untuk membangun Irian Jaya. Namun seperti peribahasa Indonesia “karena nila setitik maka rusak susu sebelanga”. Oleh karena itu timbul pula sikap anti-Indonesia di Irian Jaya.
- c. Indonesia pada saat itu tengah mengalami masa sulitnya ekonomi. Dampak ekonomi juga merembet ke Irian Barat. Dampak pertama adalah kesulitan untuk membangun Irian Barat, yaitu kebutuhan pokok penduduk pada saat itu sulit didapat di pasar, walaupun ada harganya sangat tinggi. Kesulitan yang kedua adalah banyaknya migrasi penduduk dari Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur ke Irian Barat. Khususnya dari Sulawesi Selatan dan Tenggara untuk mengadu nasib di wilayah Irian Barat. Hal ini sangat mengecewakan penduduk asli yang bukan saja tidak menikmati pembangunan, tetapi juga terpentol dari posisi sebagai pedagang di pasar Irian Barat.
- d. Keinginan pemerintah untuk memantapkan tertib administrasi di Irian Jaya, yang menyebabkan banyak orang-orang Irian yang terpentol dari posisi di pemerintahan. Pada masa pemerintahan Belanda tidak sedikit orang Irian yang duduk dipemerintahan sebagai pegawai rendah dan menengah. Pemerintah Indonesia menganggap pegawai dari Irian tidak memenuhi standar kepegawaian, sehingga perlu diganti. Namun dampak politiknya timbul pandangan bahwa telah terjadi pengalihan posisi dari penduduk asli terhadap pendatang.

Penulis kemudian berusaha merangkum secara umum berbagai kritik mengenai PEPERA 1969 dari berbagai pustaka, antara lain :

- a. Pasal XVIII ayat (d) *New York Agreement* mengatur bahwa :“*The Eligibility of all adults, male and female, not foreign national to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice ...*” aturan ini berarti bahwa penentuan nasib sendiri harus dilakukan oleh setiap orang dewasa (perkiraan 600. 000 orang dewasa) pria dan wanita yang merupakan penduduk Papua pada saat penandatanganan *New York Agreement* namun yang mengikuti PEPERA adalah segelintir orang yang dipilih secara khusus oleh Pemerintah Indonesia, dan dikelompokkan dalam Dewan Musyawarah PEPERA (DMP).

- b. Pelaksanaan pepera tidak menggunakan prinsip "one man one vote" (satu orang satu suara) atau setiap orang datang dan memberikan suaranya tetapi malah menggunakan prinsip perwakilan/utusan berdasarkan "musyawarah untuk mufakat".
- c. Diserhkannya administrasi pelaksanaan PEPERA kepada pemerintah Republik Indonesia seperti yang diatur dalam *New York Agreement*, sesungguhnya dianggap sebagai suatu keputusan yang sewenang-wenang serta merupakan sumber utama pelanggaran hak-hak politik dan hak-hak asasi manusia bangsa Papua. Sebagai pihak yang bermasalah, Indonesia tidak patut menjadi penyelenggara Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua, dan yang seharusnya dipegang oleh pihak ketiga (penengah) yang netral.
- d. Keterlibatan militer Indonesia dalam mengarahkan masyarakat dalam memilih menunjukkan bahwa memang HAM di Papua tidak pernah di hormati atau diakui oleh pemerintah Indonesia.

### **3. Ulasan Singkat Akibat Nasionalisme Papua**

Pembahasan mengenai nasionalisme Papua dan berbagai persoalan mengenai PEPERA 1969 dan berbagai kegiatan yang melatar belakanginya yang dianggap cacat hukum dan tidak berdasarkan pada HAM pada akhirnya memicu berbagai persoalan di masa-masa pasca integrasi hingga saat ini di Papua. Mulai dari tuntutan pengakuan telah terjadinya pelanggaran HAM di Papua oleh Indonesia, tuntutan untuk menentukan nasib sendiri secara demokratis, tuntutan untuk meluruskan kembali sejarah integrasi sesuai fakta hingga keinginan untuk memisahkan diri atau merdeka. Keinginan untuk memisahkan diri sebagai sebuah negara merdeka merupakan sebuah tuntutan yang relevan jika kita melihat proses pendalaman nasionalisme Indonesia yang dipaksakan sementara nasionalisme Papua telah hidup jauh lebih lama, proses integrasi yang menggunakan intimidasi dan tidak demokratis, hingga ketika bersatu di dalam NKRI selama hampir 50 tahun tidak terjadinya perubahan di Papua, kemiskinan, marjinalisasi, eksploitasi SDA yang merusak alam Papua namun tidak ada kontribusi pembangunan di Papua, hingga permasalahan pendidikan dan kesehatan yang masih minim, serta masih

banyak daerah yang masih terisolir, semakin membuat gerakan ini semakin kuat dicetuskan baik secara militan maupun diplomasi. Kesamaan nasib serta pengalaman sejarah yang sama-sama dialami seluruh masyarakat Papua, dan rasa nasionalisme Papua yang tumbuh mulai dari nasionalisme etnik semakin membawa pemahaman kita bahwa integrasi Papua semakin terwujud kuat.

Pada tahun 1964 Terianus Aronggear memproklamasikan negara Papua di Ayamaru, sebagai bentuk perlawanan terhadap penguasaan Indonesia pasca UNTEA berkuasa, namun dia ditangkap militer Indonesia. Pada awalnya Terianus Aronggear menyusun suatu dokumen perjuangan yang akan diselundupkan ke badan PBB di New York untuk menanyakan tentang status Irian Jaya dan meminta peninjauan Persetujuan New York 15 Agustus 1962. Persetujuan itu dinilai tidak adil, sebab tidak melibatkan wakil bangsa Papua dalam perundingan sebagai pihak yang dipersengketakan. Namun sebelum dokumen itu diserahkan oleh Terianus Aronggear (SE) kepada Hendrik Joku di Jayapura, untuk selanjutnya diselundupkan ke luar negeri melalui perbatasan Papua New Guinea, Terianus Aronggear (SE) ditangkap oleh pihak keamanan di Biak pada tanggal 12 Mei 1965 (Djopari, 1993).

Hal ini kemudian memicu pemberontakan oleh Permenas dibawah pimpinan Ferry Awom dengan menyerang asrama militer Indonesia di Arfai Manokwari pada 28 Juli 1965. Embrio Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM (TPNPB)) lahir dari pemberontakan ini. Nama OPM (TPNPB) adalah nama yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada setiap organisasi atau faksi, baik di Irian Jaya maupun di luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra pro-Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan atau memerdekakan Irian Jaya (Papua Barat) lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya berdasarkan penelitian R. G Djopari gerakan pemberontakan ini kemudian melakukan 17 peristiwa perlawanan bersenjata, 2 peristiwa penyanderaan, 4 peristiwa demonstrasi massa, 4 peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora, penyebaran pamflet atau selebaran yang bersifat provokasi atau ajakan untuk merdeka. Perjuangan yang berlangsung di medio 1962-1969 selama sebelum PEPERA dilaksanakan merupakan wujud dari ketidakpuasan karena tidak adanya kesempatan bagi masyarakat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri, sehingga kemudian ini memicu stigma

kolonialisme Indonesia oleh para nasionalis Papua (Kossay, 2001). Pada tahun 1967 Mayor Tituler Lodewijk Mandatjan masuk hutan dan mendukung Permanes Ferry Awom atau mendukung Organisasi Papua Merdeka dengan kekuatan 14.000 orang suku Arfak. Kekuatan ini didukung oleh Kapten Tituler Barents Mandatjan dan Lettu Tituler Irogi Meidotga. Di Saukorem, Organisasi Papua Merdeka melakukan beberapa kali penghadangan yang menyebabkan beberapa anggota ABRI gugur. Di Ransiki gerombolan Organisasi Papua Merdeka yang dipimpin J. Rumbiak, E. Rumaropen dan David Werfandu menghadang pasukan ABRI dan terjadi kontak senjata yang menelan korban meninggal di pihak Organisasi Papua Merdeka sebanyak 13 orang (Taufik, 2001).

Selanjutnya berturut-turut muncul gerakan OPM (TPNPB) yang melancarkan serangan fisik antara lain (Taufik, 2001, dan Djopari, 1993):

- a. Pada tanggal 28 Juli 1965 di Arfai Manokwari dan beberapa kota lainnya secara spontan didirikan beberapa organisasi ilegal yang diberi nama IPARI, IRPARI, SAMPARI yang memberikan dukungan dan semangat kepada Organisasi Papua Merdeka.
- b. 21 Januari 1968, kurang lebih 150 orang gerombolan Organisasi Papua Merdeka yang dipimpin oleh Daniel Wanma, Zadrak dan T. M. Osok di Makbon.
- c. 2 Februari 1968, gerombolan Organisasi Papua Merdeka yang dipimpin oleh Julianus Wanma dan David Prawar dengan kekuatan 200 orang di Saosapor.
- d. 4 Maret 1968, yaitu gerombolan Organisasi Papua Merdeka pimpinan Joseph Indey di Irai Anggi.
- e. 5 Juli 1969 di kampung Dubu wilayah Kecamatan Ubrub Kabupaten Jayapura telah terjadi serangan oleh rakyat yang dipimpin oleh Bernadus Wally selaku pemimpin gerombolan Organisasi Papua Merdeka.
- f. Pemberontakan oleh rakyat di Enarotali dari bulan Februari 1969 dan berakhir pada tanggal 30 Agustus 1969 dengan turunnya A. R. Wamafma mantan KPS Tigi sebagai tokoh yang paling bertanggung jawab.
- g. Peristiwa Pyramid Jayawijaya terjadi pada tanggal 21 Juli 1969 yaitu pembunuhan atas dua anggota KODIM 1702 Wamena yaitu Kopka D. Hutadjulu dan Koptu Suwarso. Pembunuhan itu dilakukan oleh rakyat dari kampung Alogonik. Peristiwa itu didalangi oleh Organisasi Papua Merdeka yang diorganisir oleh B. Zonggonau mantan KPS Baliem.
- h. Pada tahun 1972 di Merauke dibentuk suatu gerakan yang bernama Gerakan Nasional Papua (GENAPA), Natural Papua Nasional (NAPAN) dan Santa Perawan Maria (SPM). Berbagai gerakan atau organisasi ini dipimpin oleh Petrus Kmur, Karel Runawir dan E. P. Ius. Sedangkan aktifitas organisasi itu yang paling utama adalah menanamkan ideologi Organisasi Papua Merdeka kepada rakyat Irian Jaya, menyebarkan pamflet dengan isi yang anti-

Indonesia serta memberikan semangat bagi perjuangan Organisasi Papua Merdeka, mengajak rakyat untuk melakukan sabotase, pengacauan dan menyebarkan rasa permusuhan dengan Indonesia

- i. Pada tahun 1975 di Nabire dan Serui, Organisasi Papua Merdeka mengadakan aksi yaitu membuat pernyataan Rakyat Yapen Waropen untuk membentuk dan mempertahankan bangsa dan negara Papua.
- j. Menjelang pemilihan umum pada tahun 1977 terjadi suatu gejolak sosial atau pemberontakan Organisasi Papua Merdeka yang dipimpin oleh Alex Degey dan Matias Tabuni di kabupaten Jayawijaya.
- k. Di Jayapura, pada 16 Mei 1978 Marten Tabu dan para pengikutnya melakukan pemberontakan dengan kegiatan menyerang pos-pos ABRI dan pusat-pusat Kecamatan serta aksi penyanderaan terhadap aparat pemerintah dan ABRI.
- l. Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK) di Irian Jaya semakin meningkat. GPK menyandera 25 orang di Mapemduma Kecamatan Tiom Kabupaten Jayawijaya tercatat yang paling menarik dunia internasional, karena adanya 7 WNA yang ikut tersandera.
- m. Pada tanggal 14 Agustus 1980, enam orang wanita mengibarkan bendera Organisasi Papua Merdeka didepan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya. Pada tanggal 3 Juli 1982 juga terjadi pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka di depan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya. Pelakunya sembilan mahasiswa Universitas Negeri Cenderawasih, Jayapura.
- n. Pada bulan Maret 1981, sebuah petisi ditandatangani oleh 50 orang dan diserahkan kepada Gubernur Irian Jaya. Petisi berisi 3 butir pernyataan: (a) Protes terhadap penyelenggaraan *Act of Free Choice* tahun 1969, dimana seharusnya dilakukan pemungutan suara bagi seluruh penduduk/rakyat (satu orang satu suara) sebagaimana yang dilakukan pada pemilihan umum tahun 1971 dan 1977 di Irian Jaya; (b) Suatu pernyataan dukungan terhadap perjuangan untuk kemerdekaan Papua Barat; (c) Suatu seruan kepada pemerintah Indonesia untuk mengakui kemerdekaan dari rakyat Papua Barat.

Masih banyak lagi gerakan pemberontakan yang terus dilakukan oleh para Nasionalis Papua sejak tahun 1969 hingga saat ini.

Nazaruddin Syamsuddin dalam Djopari juga menegaskan bahwa OPM (TPNPB) merupakan gerakan separatis bukan gerakan protes belaka, sebagai bentuk hadangan terhadap integrasi Irian Barat karena lebih banyak diwarnai dimensi horizontal yang bertujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen (Djopari, 1993). Bentuk gerakan ini selain yang ditulis di atas juga berupa aksi vandalism, pembentukan

organisasi sayap di daerah-daerah, pelintasan wilayah Indonesia dengan Papua Nugini dan masih banyak aksi gerilya lainnya.

Sebagai reaksilangsung dari perlakuan yang tidak adil terhadap kepentingan Papua, yaitu masyarakat Papua mulai mengorganisasi artikulasi politik. Sepanjang tahun 1969, di beberapa kota di Papua masyarakat mengadakan demonstrasi menentang referendum dan untuk menyuarakan penolakan terhadap proses penyatuan Papua ke dalam wilayah Indonesia yang dinilai sarat kecurangan. Demonstrasi digelar pada tanggal 14 Juli di Merauke, 16 Juli di Jayawijaya, 19 Juli di Paniai, 23 Juli di Fak-fak, 26 Juli di Sorong, 29 Juli di Manokwari, 31 Juli di Teluk Cenderawasih, dan 2 Agustus di Jayapura (Rathgeber, 2006).

Periode 1996 – 1998 dilakukan operasi militer menumpas OPM (TPNPB) pimpinan Kelly Kwalik yang menyandera para ilmuwan barat di wilayah Mapnduma, Pegunungan Tengah Papua Barat dalam jangka waktu 1996-1998. Dibentuknya IRJADISC oleh kelompok Kristen Protestan yang berbasis di lembaga Antropologi Uncen, yang khusus untuk melihat kemungkinan bagaimana cara mengangkat permasalahan-permasalahan HAM di Papua ke permukaan, termasuk ke tingkat Internasional. IRJA DISC kemudian menjadi lembaga hukum yang solid dengan diberi nama Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa. (YPMD). Tahun 1984, gerakan masyarakat sipil ini dalam situasi yang rumit. Karena Arnold Ap salah satu pendirinya dituduh otak dibalik eksodus 10.000 orang ke Papua New Guinea dan dituding sebagai Menteri Kebudayaan Republik Papua Merdeka dibawah Komando Brigjen Zeth Rumkorem. Ia ditangkap oleh Kopasanda, dijebak dan melarikan diri dan dibunuh di Pasir 6. Pada Agustus 1998, selang beberapa pekan setelah dilakukan pembungkaman demonstrasi kemerdekaan di Jayapura, Sorong, Wamena dan Biak, para intelektual, pemuka gereja dan aktivis membentuk Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya (FORERI). Foreri berupaya untuk mencari peluang bagi orang Papua untuk mengelola masalah mereka sendiri, melalui otonomi, sistem federal atau kemerdekaan. Ada kesadaran diantara para aktivis di Jayapura khususnya bahwa mereka perlu menjauhkan diri dari OPM (TPNPB) setelah peristiwa penculikan Ekspedisi Lorentz pada tahun 1996. FORERI dengan dukungan tiga gereja terbesar (Gereja Kristen Injil, Gereja Katolik, dan Gereja Kristen Injil Indonesia), pemuka intelektual dan LSM

serta sejumlah pemuka adat, muncul sebagai wahana utama bagi cita-cita orang Papua. Foreri menjadi mitra dialog dengan pemerintah Indonesia dalam serangkaian pertemuan– pertemuan informal menuju pertemuan Tim 100 Pemimpin Papua dengan Presiden Habibie pada Februari 1999. Pada pertemuan Tim 100 dan Presiden Habibie inilah Tom Beanal sebagai pemimpin Tim 100 membacakan pernyataan sikap bahwa Irian Jaya ingin memisahkan diri dari Indonesia dan agar dibentuk pemerintahan peralihan di Irian jaya di bawah pengawasan PBB dan bila perlu PBB menjadi bagian dari dialog internasional antara Pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua (ICG, 2002).

Di masa kini aksi ingin memisahkan diri cenderung mengutamakan *soft act* berupa diplomasi total dengan mengedepankan isu sensitif (pelanggaran HAM, Genosida, kemiskinan, marginalisasi, dan kesehatan yang buruk) yang dibuat dengan tujuan mampu mendapatkan simpati dari pihak ketiga yaitu negara-negara adikuasa, organisasi internasional, maupun lembaga seperti PBB. Ujung dari transformasi gerakan sosial yang dilakukan oleh FORERI adalah terlaksananya MUBES (Musyawarah Besar) Papua 2000 pada 23-26 Februari 200 dan Kongres Papua II pada Mei-Juni 2000. Pada MUBES Papua inilah didirikan PDP (Presidium Dewan Papua) yang menjadi organisasi politik utama dalam perjuangan kemerdekaan Papua. Gerakan ini kemudian berlanjut pada lahirnya *International Lawyer For West Papua* (ILWP) di Oxford-London, Inggris pada 12 Oktober 2011, yang bertujuan untuk menggugat hasil dan pelaksanaan PEPERA 1969. Dibentuknya Forum Negara-Negara Kepulauan Pasifik (PIF) pada 4 september 2015 yang salah satu agendanya adalah penanganan dan solusi pelanggaran HAM di Papua Barat. PIF berusaha mendesak PBB agar mengeluarkan keputusan dekolonisasi seperti Tahiti. Pelanggaran HAM di Papua berupa penangkapan aktivis politik Papua Merdeka, dan penangkapan terduga separatis dan peristiwa bersenjata di Papua juga menjadi pembahasan utama dalam Sidang Ke-29 Dewan HAM PBB pada 21 Juni 2015.

Setidaknya pergerakan dan usaha-usaha di atas didasari pada perasaan untuk menentukan nasib sendiri bagi masyarakat dan tanah Papua, oleh orang Papua sendiri. Sehingga mengutip apa yang dikatakan oleh Organski sebagai Nasionalisme tahap I dari tahap perkembangan politik kesatuan nasional primitive (*the political of primitive unification*). Selanjutnya niat atau alasan yang mendasari berbagai gerakan diatas senada

dengan apa yang dikatakan oleh Schulz bahwa nasionalisme pada umumnya merupakan gerakan yang bertujuan akan eksistensi politik yang tersendiri dengan otonomi menentukan nasib sendiri yang seluas-luasnya. Nasionalisme tidak pernah puas dengan pemerintah sendiri yang sebagian (*partial self- government*) tetapi selalu menghendaki pemerintah sendiri yang lengkap. Nasionalisme karena itu juga merupakan sumber dari pada apa yang dinamakan penentuan nasib sendiri dari bangsa-bangsa (*the principle of self determination*).

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Organski diatas, Filep Jakob Samuel Karma (Nasionalis Papua/Mantan Tahanan Politik) yang dijadikan sebagai tahanan politik sejak tahun 2004 menyatakan bahwa (Hasil wawancara dengan Filep Jakob Samuel Karma, 2019):

Alasan Rakyat Irian Jaya ingin keluar dari NKRI adalah: Rakyat Irian Jaya merasa diperlakukan tidak adil; Rakyat Irian Jaya merasa diterlantarkan, kurang mendapat perhatian yang serius dan disepelekan; Aspirasi rakyat Irian Jaya kurang diakomodir sebagai bagian dari suatu bangsa.

Perjuangan gerakan untuk memisahkan diri bagi sebagian besar orang Papua merupakan gerakan yang sudah seharusnya dilakukan sebagai bentuk tuntutan hak orang Papua atas diri mereka sendiri dan atas wilayah Papua yang merupakan warisan leluhur Papua. Perbedaan nasib dan perbedaan sejarah antara Papua dan Indonesia telah menjadi landasan bagi terbentuknya nasionalisme yang berbeda dari dua bangsa ini, sehingga ketika ada penyatuan yang dilakukan dengan tidak adanya transparansi maka sudah seharusnya kedua bangsa ini kemudian introspeksi diri untuk sama-sama menunjukkan niat baik untuk meluruskan apa yang salah di masa lalu.

Jika kita adalah manusia demokrasi dengan melandaskan nilai hidup kita pada kebebasan dan pengakuan terhadap hak dasar manusia, maka sudah seharusnya Indonesia dan Papua serta didukung oleh PBB sama-sama memberikan kesempatan kepada bangsa Papua untuk menentukan nasib di masa depan, apakah dengan Indonesia atau Papua berdiri sendiri?. Namun saya secara pribadi menginginkan Papua berdiri di kaki sendiri sebagai sebuah bangsa berdaulat, karena sudah terlalu lama bangsa Papua mengalami ketidakadilan, mengalami penindasan, dan mengalami penyimpangan dalam semua pembangunan di Papua.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Integrasi Papua atau Irian Barat (1962-1969) yang ditandai dengan PEPERA sehingga menjadi bagian dari Indonesia merupakan sebuah pengkhianatan terhadap hak politik masyarakat Papua untuk menentukan, mengurus, dan mengatur masyarakat dan wilayahnya sendiri. Sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup yang artinya memiliki hak untuk mengurus hidupnya sendiri yang diwujudkan dalam hak politik, telah direkayasa, dikonstruksikan, dan dipaksa serta dihilangkan untuk bergabung dengan Indonesia dengan tanpa membentuk sebuah negara sendiri.

Hal ini terjadi karena dalam proses integrasi yang ditandai dengan PEPERA, Indonesia yang merupakan salah satu pilihan (pilihan lainnya adalah Papua), bertindak sebagai penyelenggara PEPERA dan sebagai pihak yang menjalankan pemerintahan dan keamanan di Papua sejak 1962-1969 (Pelaksanaan PEPERA), maka tidak heran bahwa Pelaksanaan PEPERA kemudian menjadi tidak Jujur, Tidak Adil, dan Tidak Bebas. Seharusnya PEPERA diselenggarakan oleh pihak ketiga dan pemerintahan di Papua sejak tahun 1962-1969 seharusnya dijalankan oleh PBB atau pihak keempat selain Belanda, Indonesia, dan masyarakat Papua sendiri.

Sebagai kelompok masyarakat yang telah hidup secara berkelompok maka secara otomatis manusia Papua telah mampu berpolitik, sehingga hak-hak dasar politik telah disadari oleh manusia Papua sebagai perwujudan dari nilai kemanusiaan bangsa Papua. Karena politik adalah wujud dari usaha manusia untuk memperbaiki hidup manusia sendiri berupa proses pengaturan nilai dan tata kehidupan sosial, seras distribusi nilai-nilai sosial. Hal ini telah disadari oleh bangsa Papua sejak masa kolonial hingga proses pelembagaan politik modern yang didukung Belanda berupa pembentukan partai politik dan Dewan Nieuw Guinea. Meskipun tuduhan terhadap pembentukan lembaga politik tersebut dianggap sebagai usaha pembentukan negara boneka oleh Belanda, namun proses tersebut telah mendidik bangsa Papua untuk mampu berpolitik, berorganisasi, menyatakan pendapat, serta mewujudkan nilai-nilai kePapuaan dalam wujud sebagai satu

bangsa dan satu negara. Hal ini menjadi penting diwujudkan karena dalam proses integrasi Papua ke Indonesia ternyata pada hakikatnya tidak membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat Papua berupa perbaikan ekonomi, sosial, SDM, maupun distribusi nilai-nilai sosial secara adil bagi masyarakat Papua. Hubungan pusat (Jakarta) dan daerah (Papua) yang selalu bersitegang dan penuh kecurigaan merupakan hubungan kausalitas yang timbul sejak tahun 1961 yang kemudian secara berturut-turut diwarnai oleh sikap intimidasi, kekerasan, sekuritisasi, dan ketidakadilan hingga saat ini.

Proses integrasi dan penyemaian atau doktrin nasionalisme Indonesia yang berlangsung dalam waktu singkat pada akhirnya tidak berdampak pada keinginan masyarakat Papua untuk secara sadar menginginkan integrasi, sehingga kemudian proses integrasi diwarnai dengan praktek-praktek seperti di atas. Praktek-praktek di atas juga kemudian menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia yang akhirnya tumbuh pada keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia bahkan sejak sebelum PEPERA berlangsung hingga saat ini. Berbagai pembahasan dalam karya ilmiah ini hingga pada akhirnya berakhir pada kesimpulan bahwa hak politik masyarakat Papua telah diabaikan oleh pemerintah Belanda, Amerika Serikat, dan terutama oleh pemerintah Indonesia.

## **B. SARAN**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam karya ilmiah ini serta kesimpulannya, penulis sebagai mahasiswa Ilmu Politik dan sebagai generasi muda Papua merasa bertanggungjawab untuk memberikan saran kepada pemerintah Indonesia sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap nasib Papua saat ini :

1. Pemerintah Indonesia (termasuk Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat) diharuskan untuk secara sadar dan berbesar hati meluruskan serta mengungkapkan kebenaran sejarah bangsa Papua dan proses integrasi melalui 1969. Sebagai bentuk pengakuan atas hak sosial budaya masyarakat Papua itu sendiri.
2. Sebagai perwujudan pengakuan hak politik dan didukung saran pada poin 1, asas substansial legitimasi PEPERA 1969 harus dikaji ulang kebenarannya. Sebagai upaya membuktikan kebenaran sejarah sebuah bangsa.

3. Jika pemerintah Indonesia memang tidak menginginkan adanya pemisahan diri oleh Bangsa Papua maka sudah seharusnya pemerintah Indonesia mengakui hak politik masyarakat Papua dalam segala aspek termasuk mewujudkan nilai-nilai serta simbol-simbol budaya bangsa Papua itu sendiri.
4. Mendukung kalimat awal dalam poin 3, Pemerintah Indonesia juga diharuskan untuk segera melakukan pembangunan ekonomi, SDM, kesehatan, dan budaya, sehingga masyarakat di 2 provinsi Papua mampu keluar dari kemiskinan, keterbelakangan, dan marginalisasi sehingga mimpi integrasi yang ditawarkan oleh Indonesia dalam PEPERA 1969 dapat diwujudkan.
5. Jika pemerintah Indonesia tidak mampu mewujudkan poin 4 karena sudah hampir 50 tahun Integrasi (PEPERA 1969) berlangsung namun keadaan Papua masih terbelakang dan miskin, maka sudah seharusnya pemerintah Indonesia memberikan hak politik bangsa Papua untuk menentukan nasibnya sendiri sama seperti yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 1945-1948 yang menolak kolonialisme dan menuntut hak politiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Agung B. Perwita, Anak & M. Yani, Yanyan. 2006. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Edisi kedua. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Agung, Ide Anak Agung Gde. 1985. *Dari Negara Indonesia Timur Ke Republik Indonesia Serikat*, Yogyakarta; Gajah Mada University Press.
- Al Rahab, Amiruddin. 2000. *Heboh Papua, Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*, Jakarta: Komunitas Bambu.
- Ake, Claude. 1967. *A Theory of Political Integration*, (Home Wood. Illinois: The Dorsey Press.
- Bahar, Saafroedin. 1996. *Integrasi Nasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chauvel, Richard. 2005. *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, And Adaptation*, East-West Center, Policy Studies 14, Washington.
- Dwipayana G. dan Ramadhan K. H. 1989. *Soeharto Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya*, Jakarta: PT Citra Larntoro Gung Persada.
- Drooglever Pieter, J. 2009. *An Act of Free Choice Decolonization and the Right to Self Determination in West Papua*. Terj. Theresa Stantin, Maria van Yperen dan Marjolijn de Jager. England.
- Fahardian, Charles. 2007. *Kisah-Kisah Hidup Tokoh Papua: Kesaksian Mereka Yang Ditindas*. Jayapura: Penerbit Deiyai.
- F. Kennedy, John: Secret, April 2, 1962, dalam Socratez Sofyan Yoman, 2005. *Orang Papua Bukan Separatis, Maker Dan OPM*, Jakarta; Lerhamkot.
- F. J. Isjwara. 1992. *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta.
- Frederick Hertz, *Nationality in History and Politics, A Psychology and Sociology of National Sentiment and Nationalism*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1951). Lihat dalam bahasa Indonesia F. J. Isjwara.
- G. J. Aditjondro. 1998. *Evolusi Nasionalisme Papua*, Republika.
- Hamid, H. Zukfikfli. 1996. *Politik Di Melanesia*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Herlina, J. 1965. *Pending Emas*, Jakarta: Gunung Agung.
- J. Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jopari, J. R. G. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Kabalmay. 2002. *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publication.
- Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar. 1963. *Penduduk Irian Barat*, Jakarta: PT Penerbitan Universitas. Hlm. 216-231.
- Kossay, Paskalis. 2013. *Jalan Panjang Yang Berliku; Refleksi 50 Tahun Integrasi Papua Kedalam NKRI*, Jakarta; Toolegi.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Konflik Papua Akar Masalah Dan Solusi*, Jakarta; Tollegi.
- R. Z Leirissa Et. Al, 2009 *Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya*, Depdikbud, Diksjara, Proyek Inventaris Dan Dokumen Sejarah Nasional, Jakarta.

- Liang Gie, The dan F. Istanto, Soegeng, *Pertumbuhan Pemerintahan Di Propinsi Irian Barat*, Yogyakarta ;Penerbit Sospol Universitas Gadjah Mada.
- May Rudy, T. 2002. *Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin*, Refika Aditama, Bandung.
- Meteray, Bernada. 2011. *Penyemaian Dua Nasionalisme; Papua Dan Indonesia Di Nederlands Nieuw Guinea Pada Masa Pemerintahan Belanda 1925-1962*. Pascasarjana Departemen Sejarah, Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_2012. *Nasionalisme Ganda Orang Papua*, Jakarta; Kompas.
- Mudjanto, G. 1998. *Indonesia Abad ke-20*, Jilid II, Yogyakarta, Kanisius.
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasikun. 1993. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasikun. 1996. *Nasionalisme Refleksi Kritis Kaum Ilmuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Natalis Pigay, Decky. 2000. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Panggabean, M. 1993. *Berjuang dan mengabdikan*, Jakarta: pustaka sinar harapan.
- Pujosuwarno, Sayekti. 1992. *Petunjuk Praktis Pelaksanaan Konseling*. Yogyakarta: Menara Mas Offset.
- Rauf, Maswadi. 1984. *Konflik dan Integrasi Nasional*, dalam Safroedin Bahar etal. , *Integrasi Nasional Teori Masalah dan Strategi*, Jakarta: Galia Indonesia.
- Rathgeber, Theodor. 2006. *Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Di Papua Barat, Studi Realitas Sosial Dan Perspektif Politis*, Jakarta; Sinar Harapan.
- Schoorl, Pim. 2001. *Belanda Di Irian Jaya*, Jakarta; Garba Budaya.
- Subroto, Hendro. 2009. *Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*, Jakarta; Kompas.
- Surbakti, Ramlan, 1992 *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta; PT. Gramedia.
- Suharsimi, Arikunto. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Andi Mahasatya, 1998.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryabrata, Sumadi. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Taufik A, Tuhana. 2001. *Mengapa Papua Bergolak*, Yogyakarta: Gama Global Media.
- Tim Sekretariat Keuskupan Papua Jayapura. *Membangun Budaya Damai Dan Rekonsiliasi: Dasar Menangani Konflik Di Papua*. Jayapura: Tim Skp, 2005.
- W. Creswell, John. 2002. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Terj. Angkatan III dan IV KIK-UI bekerja sama dengan Nur Khabibah, Chryshnanda DL dan Bambang Hastobroto. Jakarta: KIK Press.
- Widjojo, Muridan. 2009. *Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future* (Jakarta: YOI, LIPI, Tifa Foundation. Yoman, Socrates Sofyan (2011), *West Papua: Persoalan Internasional* (Numbay/Jayapura: Cendrawasih Press.
- Williams, Simon. 2012. *The Role of the National Interest in the National Security Debate*. UnitedKingdom: Royal College of Defence Studies.

**2. MEDIA DAN ARSIP**

ICG. *Sumberdaya Dan Konflik Di Papua*, Update Briefing, Asia Briefing No. 39. Jakarta/Brussels, 13 September 2002.

Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Ed. 4, 1998.

Koleksi Dokumentasi Online, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (Elsam) 2012. [www. arrahmah. com](http://www.arrahmah.com)

The Jakarta post, 30 november 2004.

Hasil Wawancara Dengan Pelaku Pepera 1969, Pdt. Keboba Wanimbo

Hasil wawancara dengan Filep Jakob Samuel Karma (Nasionalis Papua/Mantan Tahanan).

Majalah Polkam. Soedarjanto, *Politik Dan Keamanan: Demokrasi, Integrasi, Dan Supremasi Hukum*. Bulan Juli Tahun 2000.

## LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

### **HASIL WAWANCARA BAPAK Pdt. KEBOBA WANIMBO DI KAMPUNG DUGOBAK DISTRIK KELILA KAB. MAMBERAMO TENGAH PAPUA MELALUI TELEPON**

**Beliau adalah Tokoh Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Ketua Sinode Pertama dan Pelaku PEPERA 1969 Usia 82 Tahun lahir tahun 1930.**

**1. Bagaimana pendapat bapak mengenai situasi awal orang Papua mengenal peradaban?**

Pulau Papua ini sebelum masuk bangsa-bangsa dari negara lain, pertama kali injil masuk di pulau Mansina, Manokwari Papua Barat pada 1855, nama orangnya (**Otto dan Geisler dari Belanda**) walaupun Jepang pernah singgah namun itu hanya mencari rempah-rempah, sampai saat itulah dimana orang Papua mengalami peradaban Sumberdaya Manusia (SDM). Setelah itu 5 Tahun kemudian injil masuk di daerah pedalaman Papua di Dau Hitigima 5 Mei 1859 setelah itu menyebar ke seluruh wilayah Pegunungan Tengah Papua (pedalaman).

Mengapa orang asli Papua (OAP) masih pegang teguh dan mempertahankan janji-janji politik Belanda sampai saat ini, walaupun PEPERA sudah Final bagi Indonesia, karena Belanda datang ke Papua Barat adalah bukan jajah orang Papua tetapi untuk mendidik orang Papua supaya kedepan bisa menentukan nasibnya sendiri mengatur diri mereka tanpa intervensi oleh bangsa lain di dunia ini.

**2. Bagaimana Awal Orang Papua mengenal Jati diri sebagai suatu bangsa?**

Belanda didik orang Papua dalam berbagai bidang setelah itu orang asli Papua yang sudah terdidik bentuk partai politik (parpol) dan ikut pemilihan parlemen disebut (DEWAN NIEUW GUINEA). Dalam dewan Nieuw Guinea yang masuk perwakilan orang Papua adalah asli anak-anak Papua yang sudah didik dari Belanda dan merekalah yang Deklarasi (Manifesto Politik Papua Barat) dimana kejadian sejarah orang Papua pada tanggal 1 Desember 1961 di Holandia (Jayapura), mereka mengenalkan Ideologi orang Papua kepadadunia internasional bahwa orang Papua bisa mengatur sendiri dimana memperkenalkan simbol-simbol negara mulai dari Bendera Bintang Fajar, Lambang negara burung Mambruk, lagu kebangsaan *Hai Tanah ku Papua* dan lain sebagainya.

### 3. **Bagaimana awal orang Papua mengalami militerisme Indonesia?**

Setelah Bung karno dengar bahwa negara Papua Barat telah dideklarasikan sebagai negara sendiri dari Belanda, Bung karno pidato politik (Bubarkan Neagara Boneka Buatan Belanda dan Kibarkan Pusaka Merah Putih di Seluruh Irian Jaya) untuk bubarkan negara Papua tersebut. Yang kita kenal dengan Tri Komando Rakyat (TRIKORA), di alun-alun Jogjakarta 8 hari kemudian setelah manifesto politik orang Papua 1 desember 1961 di Holandia militer Indonesia, organik dan non organik, diterjunkan dengan kekuatan sangat besar di seluruh Papua waktu itu. Pada tahun 1962-63 sudah mulai operasi militer, orang Papua dibunuh, dibantai, diteror, intimidasi dan pemerkosaan pun terjadi pada waktu itu, militer Indonesia sangat kejam kepada rakyat sipil, juga dikenal penenggelaman kapal perang Indonesia dibawa pimpinan Jenderal Yos sudarso, dan baik operasi yang dilakukan oleh militer Indonesia dibawa komandan Suharto sebagai panglima tinggi Angkatan Darat. Secara tidak langsung wilayah Papua itu sudah diambil alih oleh Indonesia waktu itu, padahal teritori Papua itu masih di bawah kekuasaan Belanda. Pemerintah Indonesia, PBB, Belanda dan Amerika melakukan PEPERA hanya formalistas dan kami lihat kebelakang di wawancara ini jelas-jelas Papua sudah dikuasai oleh militer Indonesia. Menyikapi kekejaman militerisme di Papua pada 26 juli 1965 para pemuda Papua yang sudah terdidik dalam bidang militer mereka melakukan perlawanan di Manokwari pertama yang disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM (TPNPB)) .

### 4. **Apa yang bapak alami ketika menjelang PEPERA 1969?**

Dari tahun 1962-1963 saja sudah ada militer di seluruh pelosok tanah Papua, yang jelas-jelas PEPERA penuh dengan intimidasi. Sebelum PEPERA itu diterjunkan pasukan militer organik dan non organik ke seluruh tanah Papua, kami pun dari kampung berangkat ke Wamena ibu kota kabupaten Jayawijaya, karena seluruh Daerah Pegunungan Tengah (pedalaman) pada saat itu belum ada kabupaten jadi kami semua di jemput oleh tentara dan mereka bilang yang kami pilih yang kepala suku saja berangkat dan yang tidak kepala suku tidak berangkat tidak tahu maksud militer Indonesia, kami pun pasrah dan ikuti maunya militer. Perjalanan 4 hari dari setiap kampung-kampung ke kota ibu kota kabupaten. Saat malam hari kami tidur di hutan, dan militer Indonesia berjaga di sekitar kami dengan bersenjata lengkap dan kalau kami bergerak sedikit pun dipukul, dan diinterogasi terus menerus oleh para anggota TNI secara bergantian lalu kata militer “*he, kamu bilang indonesia ya besok pagi pas hari H nya, kalau bilang Papua kami tembak kamu semua dan akan mati nanti*”, itu kejadian malam hari. Kalau kejadian siang hari mereka kasih kami pisau dapur, kapak, kamera tustel, radio, parang, panci masak, kual, secara gratis. Mereka masak dan kasih kami makan nasi dan mereka bilang “*kalau kamu bilang*

*indonesia kamu pasti makan makanan yang enak terus, kalau kamu bilang Papua kami tembak kamu mati*". Dan aneh lagi itu kami dibawa perempuan pelacur pada malam hari dan paksa kami berhubungan intim dengan para pelacur itu. Kejadian pada hari "H" nya adalah tidak melakukan seperti pemilihan satu orang satu suara yang kami tahu. Tetapi pada saat itu seluruh peserta yang di lapangan itu hanya di suruh baris berbaris lalu, orang dari utusan PBB, tapi orang Jawa berambut lurus kulit putih, baju coklat dia pake Toa (pengeras suara) dan teriak "*Indonesia*" lalu kami semua disuruh angkat tangan, karena malam hari dan pagi hari sebelum baris mereka sudah bilang kita kalau bilang Papua jangan angkat tangan tetapi kalau bilang indonesia baru angkat tangan, dan dengar aba-aba dari depan saja lalu komando dari depan. Lalu yang anehnya itu sebelum PEPERA seluruh Wamena ada bendera Merah Putih, dan poster pamflet pun ditempel di pinggir jalan-jalan dan tempat-tempat umum seperti bandara, pasar, terminal darat dan lain-lain.

Demikian wawancara kami.

**LAMPIRAN SALINAN PERNYATAAN PEMBUBARAN ORGANISASI-  
ORGANISASI POLITIK DI IRIAN BARAT 1 DESEMBER 1963**

PERNYATAAN

- I. Bahwa Daerah Irian Barat adalah sebagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke.
- II. Bahwa hanya ada satu dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945, sedang Manipol merupakan haluan negara dan Pancasila merupakan ideologi negara.
- III. Bahwa semua ideologi negara yang berhaluan lain atau tidak sesuai dengan dasar-dasar yang sah dari Negara Republik Indonesia sebagai yang tersebut di atas maka itu adalah merupakan alat pemecah kesatuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan apa yang telah ditandaskan di atas dan sesuai pula dengan keinginan rakyat Irian Barat untuk tetap bersatu-padu dengan daerah-daerah lain di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dipisah-pisahkan lagi, maka dengan ini kami menyatakan bahwa:
  - 1 Semua partai-partai politik atau organisasi-organisasi politik lainnya yang didirikan pada waktu penjajahan Belanda mulai terhitung tahun 1950 s/d Agustus 1962, dinyatakan bubar, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan politik pada dewasa ini.
  - 2 Partai-partai politik dan organisasi-organisasi politik lainnya yang menyatakan bubar adalah
    - i. Commite National Papua
    - ii. Front Nasional Papua (FNP)
    - iii. Nasional Partij Papua (Nappa)
    - iv. Partai Nasional (Parna)
    - v. Democratische Volks Partij (DYP)
    - vi. Panai Papua Merdeka ePM)
    - vii. Kena U Embay (KUE)

- 3 Tanggal pembubaran mulai terhitung 1 Mei 1963 tepat dengan hari kembalinya Irian Barat ke wilayah kekuasaan Republik Indonesia.

Demikianlah pernyataan ini dibuat oleh kami bersama di Kotabaru pada tanggal yang tersebut di atas. Kotabaru/Irian Barat, 1 Desember 1963. Kami yang bertanda:

- 1 Willem Inury (ttd) mantan Ketua Komite Nasional Papua
- 2 Lodewijk Ajamiseba (ttd) mantan Ketua Umum Front Nasional Papua (FNP)
- 3 Nicolaas M. C. Tanggahma (ttd) mantan Anggota Nasional Partai Papua (Nappa)
- 4 Hermanus Wajoi (ttd) mantan Ketua Umum Partai Nasional (Parna)
- 5 Manuel Waromi (ttd) mantan Sekretaris Democratische Volks Partij (DVP)
- 6 Mozes Romainum (ttd) mantan Ketua Umum Partai Papua Merdeka (PPM)
- 7 Pilatus Keratua (ttd) mantan Penasehat Kena U Embay (KUE)
- 8 Essau Ittar (ttd) mantan Ketua Kena U Embay (KUE)

### **LAMPIRAN NASKAH PERSETUJUAN NEW YORK**

**New York Agreement: United Nations Treaty Series 1962, no. 6311**

**AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS CONCERNING WEST NEW GUINEA (WEST IRIAN). SIGNED AT THE HEADQUARTERS OF THE UNITED NATIONS, NEW YORK, ON 15 AUGUST 1962 (Registered on 21 September 1962 by the Secretariat acting on behalf of the Contracting Parties pursuant to paragraph 2 of article XXVIII of the Agreement.)**

The Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands,  
Having in mind the interests and welfare of the people of the territory of West New  
Guinea (West Irian) hereinafter referred to as "the territory",

Desirous of settling their dispute regarding the territory,  
Now, therefore, agree as follows:

### **Ratification of Agreement and Resolution of the General Assembly of the United Nations**

#### Article I

After the present Agreement between Indonesia and the Netherlands has been signed and ratified by both Contracting Parties, Indonesia and the Netherlands will jointly sponsor a draft resolution in the United Nations under the terms of which the General Assembly of the United Nations takes note of the present Agreement, acknowledges the role conferred upon the Secretary-General of the United Nations therein, and authorizes him to carry out the tasks entrusted to him therein.

### **Transfer of Administration**

#### Article II

After the adoption of the resolution referred to in article I, the Netherlands will transfer administration of the territory to a United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) established by and under the jurisdiction of the Secretary-General upon the arrival of the United Nations Administrator appointed in accordance with article IV. The UNTEA will in turn transfer the administration to Indonesia in accordance with article XII.

### **United Nations Administration**

#### Article III

In order to facilitate the transfer of administration to the UNTEA after the adoption of the resolution by the General Assembly, the Netherlands will invite the Secretary-General to send a representative to consult briefly with the Netherlands Governor of the territory prior to the latter's departure. The Netherlands Governor will depart prior to the arrival of the United Nations Administrator.

#### Article IV

A United Nations Administrator, acceptable to Indonesia and the Netherlands, will be appointed by the Secretary-General.

#### Article V

The United Nations Administrator, as chief executive officer of the UNTEA, will have full authority under the direction of the Secretary-General to administer the territory for the period of the UNTEA administration in accordance with the terms of the present Agreement.

#### Article VI

1. The United Nations flag will be flown during the period of United Nations administration.
2. With regard to the flying of the Indonesian and Netherlands flags, it is agreed that this matter will be determined by agreement between the Secretary-General and the respective Governments.

#### Article VII

The Secretary-General will provide the UNTEA with such security forces as the United Nations Administrator deems necessary; such forces will primarily supplement existing Papuan (West Irianese) police in the task of maintaining law and order. The Papuan Volunteer Corps, which on the arrival of the United Nations Administrator will cease being part of the Netherlands armed forces, and the Indonesian armed forces in the territory will be under the authority of, and at the disposal of, the Secretary-General for the same purpose.

The United Nations Administrator will, to the extent feasible, use the Papuan (West Irianese) police as a United Nations security force to maintain law and order and, at his discretion, use Indonesian armed forces. The Netherlands armed forces will be repatriated as rapidly as possible and while still in the territory will be under the authority of the UNTEA.

#### Article VIII

The United Nations Administrator will send periodic reports to the Secretary-General on the principal aspects of the implementation of the present Agreement. The Secretary-General will submit full reports to Indonesia and the Netherlands and may submit, at his discretion, reports to the General Assembly or to all United Nations Members.

### **First phase of the UNTEA Administration**

#### Article IX

The United Nations Administrator will replace as rapidly as possible top Netherlands officials as defined in annex A with non-Netherlands, non-Indonesian officials during the first phase of the UNTEA administration which will be completed on 1 May 1963. The United Nations Administrator will be authorized to employ on a temporary basis all Netherlands officials other than top Netherlands officials defined in annex A, who wish to serve the UNTEA, in accordance with such terms and conditions as the Secretary-General may specify. As many Papuans (West Irianese) as possible will be brought into administrative and technical positions. To fill the remaining required posts, the UNTEA will have authority to employ personnel provided by Indonesia. Salary rates prevailing in the territory will be maintained.

#### Article X

Immediately after the transfer of administration to the UNTEA, the UNTEA will widely publicize and explain the terms of the present Agreement, and will inform the population concerning the transfer of administration to Indonesia and the provisions for

the act of self-determination as set out in the present Agreement.

#### Article XI

To the extent that they are consistent with the letter and spirit of the present Agreement, existing laws and regulations will remain in effect. The UNTEA will have power to promulgate new laws and regulations or amend them within the spirit and framework of the present Agreement. The representative councils will be consulted prior to the issuance of new laws and regulations or the amendment of existing laws.

### **Second Phase**

#### Article XII

The United Nations Administrator will have discretion to transfer all or part of the administration to Indonesia at any time after the first phase of the UNTEA administration. The UNTEA's authority will cease at the moment of transfer of full administrative control to Indonesia.

#### Article XIII

United Nations security forces will be replaced by Indonesian security forces after the first phase of the UNTEA administration. All United Nations security forces will be withdrawn upon the transfer of administration to Indonesia.

### **Indonesian Administration and Self-Determination**

#### Article XIV

After the transfer of full administrative responsibility to Indonesia, Indonesian national laws and regulations will in principle be applicable in the territory, it being understood that they be consistent with the rights and freedoms guaranteed to the inhabitants under the terms of the present Agreement. New laws and regulations or amendments to the existing ones can be enacted within the spirit of the present Agreement. The representative councils will be consulted as appropriate.

#### Article XV

After the transfer of full administrative responsibility to Indonesia, the primary task of Indonesia will be further intensification of the education of the people, of the combating of illiteracy, and of the advancement of their social, cultural and economic development. Efforts also will be made in accordance with present Indonesian practice to accelerate the participation of the people in local government through periodic elections. Any aspects relating to the act of free choice will be governed by the terms of this Agreement.

#### Article XVI

At the time of the transfer of full administrative responsibility to Indonesia a number of United Nations experts, as deemed adequate by the Secretary- General after consultation with Indonesia, will be designated to remain wherever their duties require their presence. Their duties will, prior to the arrival of the United Nations Representative,

who will participate at the appropriate time in the arrangements for self-determination, be limited to advising on and assisting in preparations for carrying out the provisions for self-determination except in so far as Indonesia and the Secretary-General may agree upon their performing other expert functions. They will be responsible to the Secretary-General for the carrying out of their duties.

#### Article XVII

Indonesia will invite the Secretary-General to appoint a Representative who, together with a staff made up, inter alia, of experts referred to in article XVI, will carry out the Secretary-General's responsibilities to advise, assist and participate in arrangements which are the responsibility of Indonesia for the act of free choice. The Secretary-General will, at the proper time, appoint the United Nations Representative in order that he and his staff may assume their duties in the territory one year prior to the date of self-determination.

Such additional staff as the United Nations Representative might feel necessary will be determined by the Secretary-General after consultations with Indonesia. The United Nations Representative and his staff will have the same freedom of movement as provided for the personnel referred to in article XVI.

#### Article XVIII

Indonesia will make arrangements, with the assistance and participation of the United Nations Representative and his staff, to give the people of the territory the opportunity to exercise freedom of choice. Such arrangements will include:

1. Consultations (Musjawarah) with the representative councils on procedures and appropriate methods to be followed for ascertaining the freely expressed will of the population.
2. The determination of the actual date of the exercise of free choice within the period established by the present Agreement.
3. Formulation of the questions in such a way as to permit the inhabitants to decide (a) whether they wish to remain with Indonesia; or (b) whether they wish to sever their ties with Indonesia.
4. The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice, who are resident at the time of the signing of the present Agreement and at the time of the act of self-determination, including those residents who departed after 1945 and who return to the territory to resume residence after the termination of Netherlands administration.

#### Article XIX

The United Nations Representative will report to the Secretary-General on the arrangements arrived at for freedom of choice.

#### Article XX

The act of self-determination will be completed before the end of 1969.

#### Article XXI

1. After the exercise of the right of self-determination, Indonesia and the United Nations Representative will submit final reports to the Secretary-General who will report to the General Assembly on the conduct of the act of self-determination and the results thereof.
2. The Parties to the present Agreement will recognize and abide by the results of the act of self-determination.

#### **Rights of the Inhabitants**

#### Article XXII

1. The UNTEA and Indonesia will guarantee fully the rights, including the rights of free speech, freedom of movement and of assembly, of the inhabitants of the area. These rights will include the existing rights of the inhabitants of the territory at the time of the transfer of administration to the UNTEA.
2. The UNTEA will take over existing Netherlands commitments in respect of concessions and property rights.
3. After Indonesia has taken over the administration it will honour those commitments which are not inconsistent with the interests and economic development of the people of the territory. A joint Indonesian-Netherlands commission will be set up after the transfer of administration to Indonesia to study the nature of the above-mentioned concessions and property rights.
4. During the period of the UNTEA administration there will be freedom of movements for civilians of Indonesian and Netherlands nationalities to and from the territory.

#### Article XXIII

Vacancies in the representative councils caused by the departure of Netherlands nationals, or for other reasons, will be filled as appropriate consistent with existing legislation by elections, or by appointment by the UNTEA. The representative councils will be consulted prior to the appointment of new representatives.

#### **Financial matters**

#### Article XXIV

1. Deficits in the budget of the territory during the UNTEA administration will be shared equally by Indonesia and the Netherlands.
2. Indonesia and the Netherlands will be consulted by the Secretary-General in the preparation of the UNTEA budget and other financial matters relating to United Nations responsibilities under the present Agreement; however, the Secretary-General will have the final decision.
3. The Parties to the present Agreement will reimburse the Secretary-General for all costs incurred by the United Nations under the present Agreement and will make

available suitable funds in advance for the discharge of the Secretary-General's responsibilities. The Parties to the present Agreement will share on an equal basis the costs of such reimbursements and advances.

### **Previous Treaties and Agreement**

#### Article XXV

The present Agreement will take precedence over any previous agreement on the territory. Previous treaties and agreements regarding the territory may therefore be terminated or adjusted as necessary to conform to the terms of the present Agreement.

### **Privileges and Immunities**

#### Article XXVI

For the purposes of the present Agreement, Indonesia and the Netherlands will apply to United Nations property, funds, assets and officials the provisions of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.

In particular, the United Nations Administrator, appointed pursuant to article IV, and the United Nations Representative, appointed pursuant to article XVII, will enjoy the privileges and immunities specified in section 19 of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.

### **Ratification**

#### Article XXVII

1. The present Agreement will be ratified in accordance with the constitutional procedures of the Contracting Parties.
2. The instruments of ratification will be exchanged as soon as possible at the Headquarters of the United Nations by the accredited representatives of the Contracting Parties.
3. The Secretary-General will draw up a proces-verbal of the exchange of the instruments of ratification and will furnish a certified copy thereof to each Contracting Party.

### **Entry into Force**

#### Article XXVIII

1. The present Agreement will enter into force upon the date of the adoption by the General Assembly of the resolution referred to in article I of the present Agreement.
2. Upon the entry into force of the present Agreement, the Secretary-General of the United Nations will register it in accordance with Article 102 of the Charter.

### **Authentic Text**

#### Article XXIX

The authentic text of the present Agreement is drawn up in the English language.

Translations in the Indonesian and Netherlands languages will be exchanged between the Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized for that purpose by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE at the Headquarters of the United Nations, New York, on this fifteenth day of August 1962, in three identical copies, of which one shall be deposited with the Secretary-General and one shall be furnished to the Government of each of the Contracting Parties.

For the Republic of Indonesia :  
(Signed) SUBANDRIO

For the Kingdom of the Netherlands :  
(Signed) J. H. VAN ROIJEN  
(Signed) C. SCHURMANN

**LAMPIRAN FOTO PEPERA 1969**

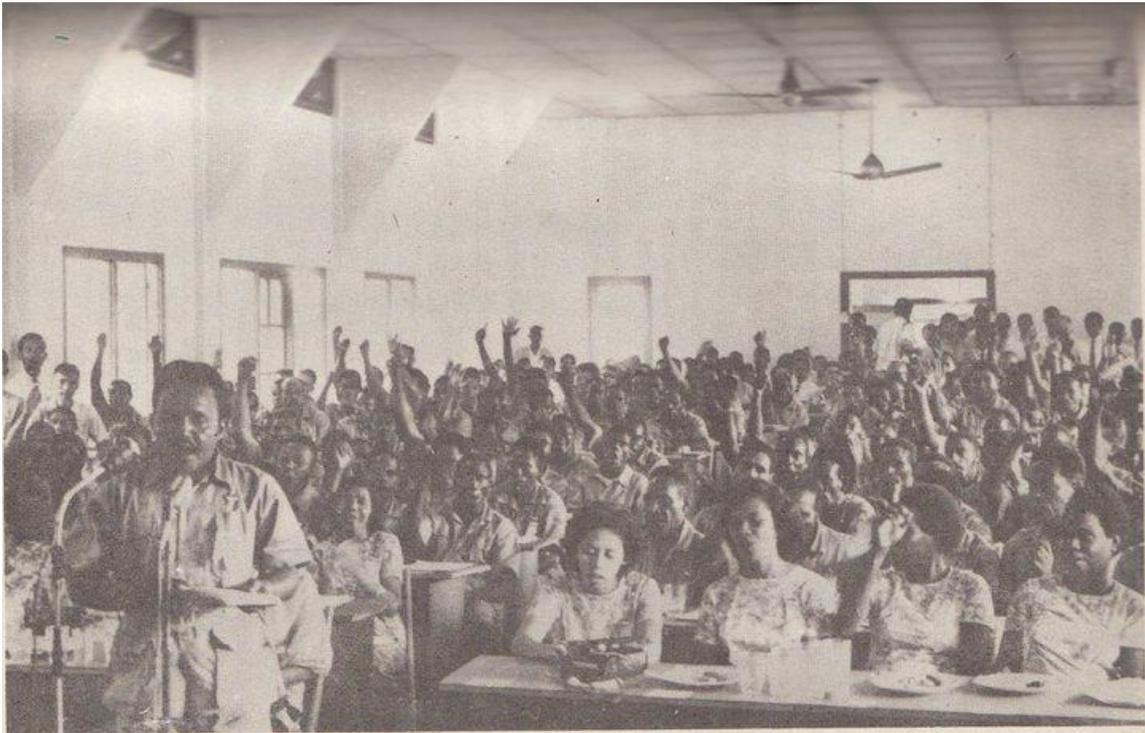


Tokoh2 utama dalam perundingan yang telah menghasilkan Persetujuan yang bersedjarah tentang Irian Barat, diabadikan bersama sesaat setelah upacara penandatanganan.  
Dari kiri kekanan : Dr. Subandrio, Wakil Indonesia; U Thant, Sekretaris Djenderal P.B.B.; Dr. J.H. van Rooyen, Wakil Nederland; Duta Besar Ellsworth Bunder, Perantara, dan Dr. O.W.A. Schuurmann, Wakil Nederland. (Rep. Leo Rosenthal Photo).

Foto Bersama Penanda Tanganan Perjanjian New York, 15 Agustus 1962. Dari kiri ke kanan: Soebandrio (Wakil Indonesia), SEKJEN PBB Uthant, DR. Van Royen (Wakil Belanda), Elsworth Bunker (Mediator), Schurman (Delegasi Belanda).



Suasana Sidang PEPERA di Kabupaten FAKFAK



Situasi Proses Jajak Pendapat (Referendum/PEPERA) di Kota Sorong yang dikawal ketat oleh militer Indonesia dalam ruang tertutup. (Doc. OPPB)



Sidang PEPERA di Wamena : Sudjarwo Tjondronegoro SH ketika menjampai-kan amanatnja sebagai Ketua Team Pelaksana PEPERA.

Sidang PEPERA Di Wamena: tampak Sudjarwo Tjondronegoro sedang berpidato sebagai Ketua Pelaksana PEPERA



*Mr. Fernando ORTIZ-SANZ, shortly after his arrival in Enarotali, with Mr. J. WHYTE (United Nations) at right welcomed by local people with a banner "WE DON'T WANT TO BE SEPARATED FROM INDONESIA". (Photo United Nations)*